



RENCANA AKSI NASIONAL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2014



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Januari, 2012

RENCANA AKSI NASIONAL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2014



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Januari, 2012

RENCANA AKSI NASIONAL

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 2012-2014

Diterbitkan oleh :

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Tim Penyusun :

Pengarah : Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, MA.

Ketua Tim : Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D.

Anggota : Pungky Sumadi, MCP, Ph.D; Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si;
Dra. Rahma Iryanti, MT; Dr. Hadiat, MA; Dr. Sanjoyo, M.Ec;
Dr. Ir. Subandi, Msc; Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci, M.Si;
Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP; Ir. R. Aryawan S. Poetro, M.Si;
Dadang Rizki R., SH, MPA; Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;
Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D; Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM;
Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc; Woro S. Sulistyaningrum, ST, MIDS;
Agus Manshur, SE, MA; Moris Nuaimi, SE, MT, MA; Karim, S.Ant;
Dr. Yulius, MA; Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc;
Fisca Miswari Aulia, S.Si; Annissa Sri Kusumawati, ST.

Pendukung : Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP; Sidik Permana, ST;
Novi Susanto, SAP; Herman Ferdiansyah, SE.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
2012

KATA PENGANTAR



Penurunan tingkat kemiskinan nasional dalam dua tahun terakhir ini cenderung mengalami pelambatan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran penurunan kemiskinan secara jangka menengah sesuai dengan RPJMN 2010-2014, terutama apabila penanganan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan (*business as usual*). Di lain pihak, implementasi dari dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, terutama selama periode 2012-2014, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi penurunan tingkat kemiskinan secara nasional.

Kedua hal tersebut diatas menjadi latar belakang dari kajian jangka menengah (*mid-term review*) terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Kajian tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PPK) 2012-2014.

Secara substansial, RAN-PPK merupakan review terhadap strategi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan disusun dengan memperhitungkan kemungkinan perubahan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen MP3EI serta dampaknya terhadap penurunan kemiskinan secara realistis sampai tahun 2014. Penurunan kemiskinan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan maupun penajaman strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terealisasi dalam perubahan sasaran dan alokasi anggaran masing-masing kegiatan. Dengan demikian, RAN-PPK dapat menjadi rujukan dalam proses perencanaan tahunan baik dalam RKP maupun Renja-K/L, serta proses penganggarannya melalui APBN.

Penyusunan RAN-PPK ini tidak terlepas dari dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang sedang dalam proses penyusunan. RAN-PPK akan menjadi tahapan awal penurunan kemiskinan dalam MP3KI.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014. Kita berharap semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS)

Armida S. Alisjahbana



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan RAN-PPK	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RAN-PPK	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan RAN-PPK	2
1.4 Sistematika RAN-PPK	2
BAB II PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	5
2.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia	5
2.2 Perkembangan Program Penanggulangan Kemiskinan	10
2.2.1 Program Bantuan dan Jaminan Sosial (Klaster 1)	12
2.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat (Klaster 2)	36
2.2.3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Klaster 3)	41
2.2.4 Program-Program Pro-Rakyat (Klaster 4)	48
BAB III ANALISIS DAN PROYEKSI KEMISKINAN	51
3.1 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	51
3.2 Skenario Optimis dan Moderat dalam Proyeksi Kemiskinan 2012-2014	53
3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan berdasarkan Skenario Optimis	54
3.2.2 Proyeksi Pertumbuhan berdasarkan Skenario Moderat	56
3.3 Proyeksi Kemiskinan Nasional	59
3.4 Proyeksi Kemiskinan Tingkat Provinsi	60
BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	67
4.1 Strategi dan Kebijakan Makro	67

4.2	Strategi dan Kebijakan Klaster	69
4.2.1	Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1	69
4.2.2	Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 2	75
4.2.3	Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 3	77
4.2.4	Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 4	78
4.3	Strategi Khusus	80
4.4	Keterkaitan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan Prioritas Nasional Bidang Lainnya	85
BAB V	RENCANA AKSI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	89
5.1	Penjelasan Matriks Rencana Aksi	89
5.2	Ringkasan Rencana Aksi	90
5.3	Matriks Rencana Aksi	92
5.3.1	Rencana Aksi Klaster 1	92
5.3.2	Rencana Aksi Klaster 2	116
5.3.3	Rencana Aksi Klaster 3	128
5.3.4	Rencana Aksi Klaster 4	135
BAB VI	PENUTUP	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Periode 2000-2011	6
Tabel 2.	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kriteria Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin	7
Tabel 3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2010-2011	7
Tabel 4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Wilayah Tahun 2011	8
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi, Tahun 2011	9
Tabel 6.	Lokasi Pelaksanaan PKH	13
Tabel 7.	Indikator Perkembangan PKH 2007-2010 dan Rencana 2011	14
Tabel 8.	Perkembangan Program Raskin 2004-2010	17
Tabel 9.	Rincian Program Raskin tahun 2011	17
Tabel 10.	Jumlah Kelembagaan Masyarakat PNPM Mandiri	38
Tabel 11.	Jumlah Fasilitator/Konsultan dan Tenaga Kerja Melalui PNPM Mandiri	40
Tabel 12.	Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2011	43
Tabel 13.	Realisasi Penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2011	44
Tabel 14.	Garis Kemiskinan (GK) Makanan dan Non Makanan Periode 2002-2011 (rupiah/kapita/bulan)	52
Tabel 15.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kriteria Garis Kemiskinan Periode 2000-2010	53
Tabel 16.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2012-2014 berdasarkan Skenario Optimis	54
Tabel 17.	Proyeksi Pertumbuhan Kesempatan Kerja 2012-2014 berdasarkan Skenario Optimis	56
Tabel 18.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2012-2014 berdasarkan Skenario Moderat	57
Tabel 19.	Proyeksi Pertumbuhan Kesempatan Kerja 2012-2014 berdasarkan Skenario Moderat	58
Tabel 20.	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Per Provinsi 2012-2014	61
Tabel 21.	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi berdasarkan Skenario Optimis	64
Tabel 22.	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi berdasarkan Skenario Moderat	65

Tabel 23.	Instansi Pelaksana Strategi Makro Penanggulangan Kemiskinan	68
Tabel 24.	Perencanaan PKH 2011-2014	69
Tabel 25.	Perencanaan Subsidi Siswa Miskin 2012-2014	72
Tabel 26.	Proyeksi Kemiskinan per Koridor Tahun 2012-2014	84
Tabel 27.	Penjelasan Matriks RAN-PPK 2012-2014	89
Tabel 28.	Ringkasan Anggaran RAN-PPK 2012-2014	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1976–2011	5
Gambar 2.	Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011	8
Gambar 3.	Perbandingan Alokasi Pendanaan dan Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2010	11
Gambar 4.	Alur Penyaluran Beras Program Raskin	18
Gambar 5.	Jumlah Sasaran Subsidi Siswa Miskin, 2008 – 2011	24
Gambar 6.	Alokasi Tanah Obyek <i>Land Reform</i> 1961-2008	27
Gambar 7.	Penerima Manfaat Tanah Obyek <i>Land Reform</i> , 1961-2008	28
Gambar 8.	Perkembangan besaran BLM PNPM Mandiri dan Jumlah Kecamatan, 2007-2011	38
Gambar 9.	Realisasi BLM PNPM Mandiri 2007-2011	39
Gambar 10.	Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2011 (1 Januari – 31 Desember 2011)	43
Gambar 11.	Proyeksi Penurunan Angka Kemiskinan 2012-2014	60
Gambar 12.	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Per Provinsi berdasarkan skenario Optimis pada Tahun 2014	62
Gambar 13.	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Per Provinsi berdasarkan skenario Moderat pada Tahun 2014	63
Gambar 14.	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi berdasarkan skenario Optimis Tahun 2014	81
Gambar 15.	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi berdasarkan skenario Moderat Tahun 2014	82
Gambar 16.	Keterkaitan Prioritas Nasional Bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Prioritas Lainnya	88



DAFTAR SINGKATAN

A

AMHP	Alat Medis Habis Pakai
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARAM	Angka Ramalan
Askeskin	Asuransi Kesehatan Masyarakat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
ATAP	Angka Tetap

B

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
BLM	Bantuan Langsung Mandiri
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BULOG	Badan Urusan Logistik

C

CCT	<i>Conditional Cash Transfer</i>
CPR	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>

D

DO	<i>Delivery Order</i>
DKI	Daerah Khusus Ibukota

F

FCC	<i>Food Crisis Center</i>
-----	---------------------------

G

Gemasko	Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi
GK	Garis Kemiskinan

H

HGU	Hak Guna Usaha
HPB	Harga Pembelian Beras
HPP	Harga Pembelian Pemerintah

I

IKK	Ibukota Kecamatan
INA-DRGs	<i>Indonesia-Diagnosis Related Groups</i>
INA-CBGs	<i>Indonesia-Case Based Groups</i>

J	
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JPKMM	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
JPS	Jaring Pengamanan Sosial
K	
Kadivreg	Kepala Divisi Regional
KaKansilog	Kepala Kantor Seksi Logistik
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Kasubdivreg	Kepala Sub-Divisi Regional
KBI	Kawasan Barat Indonesia
KIA-KB	Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana
KK	Kepala Keluarga
KKMB	Konsultan Keuangan Mitra Bank
Korwil	Koordinator wilayah
KPS	Keluarga Pra Sejahtera
KS1	Keluarga Sejahtera I
KSP-KJKS	Koperasi Simpan Pinjam-Koperasi Jasa Keuangan Syariah
KTI	Kawasan Timur Indonesia
KUR	Kredit Usaha Rakyat
L	
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LCGC	<i>Low Cost and Green Car</i>
LDP	Lembaga Diklat Profesi
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
M	
MA	Madrasah Aliyah
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i>
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MP3EI	Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
N	
NPL	<i>Non- Performing Loan</i>
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTP	Nilai Tukar Petani
NTT	Nusa Tenggara Timur
O	
Opsus	Operasi Pasar Khusus
P	
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
Perum	Perusahaan Umum
PKH	Program Keluarga Harapan
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-KP	PNPM Kelautan dan Perikanan
PNPM-MP	PNPM Mandiri Perdesaan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
Pokmas	Kelompok Masyarakat
POLRI	Polisi Republik Indonesia
Polindes	Pondok Bersalin Desa
Poskesdes	Pondok Bersalin Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
P4T	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
PP	Peraturan Pemerintah
PPI	Pangkalan Pendaratan Ikan
PPK	Program Penanggulangan Kemiskinan
PPKD	Pusat Pengembangan Kebijakan Daerah
PPLS	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPP	<i>Public Private Partnership</i>
PT	Pendidikan Tinggi
PTA	Pendidikan Tinggi Agama
PTPN	PT Perkebunan Nusantara
PUAP	PNPM Usaha Agribisnis Perdesaan
PUGAR	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
PUMP	Pengembangan Usaha Mina Perdesaan
PUS	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
R	
RAN	Rencana Aksi Nasional
Raskin	Program Beras untuk Masyarakat Miskin
RI	Republik Indonesia
RKM	Rencana Kerja Masyarakat
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RS	Rumah Sakit
RTM	Rumah Tangga Miskin
RTHM	Rumah Tangga Hampir Miskin
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTS	Rumah Tangga Sasaran
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
RTS-PM	Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat
S	
Satker	Satuan Kerja
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDKI	Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SHAT	Sertifikasi Hak Atas Tanah
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKP	Surat Keabsahan Peserta
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama

SPA	Surat Perintah Alokasi
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar
SPDKP	Survey Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
SPDN	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Daerah Nelayan
SPPB	Surat Perintah Pengeluaran Barang
SSM	Subsidi Siswa Miskin
Susenas	Survey Sosial Ekonomi Nasional
T	
TD	Titik Distribusi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TUK	Tempat Uji Kompetensi
U	
UKM	Usaha Kecildan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
UPPKH	Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
UPPKS	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
W	
Wardes	Warung Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan RAN-PPK

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam proses pembangunan nasional. Mengingat karakteristik kemiskinan yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi-periode, pemerintah masih terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Adanya kecenderungan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional dikhawatirkan akan berpengaruh negatif pada pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2014 (akhir periode RPJMN) apabila penanganan program penanggulangan kemiskinan masih bersifat *business as usual*. Sementara itu, implementasi dari dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 diharapkan juga untuk dapat memberikan peluang yang cukup signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, yang pada gilirannya diharapkan akan berkontribusi untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan secara nasional.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi latar belakang diperlukannya sebuah kajian jangka menengah (*mid-term review*) dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan upaya penurunan angka kemiskinan dalam bentuk sebuah Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PPK). RAN-PPK diharapkan dapat menjadi tinjauan menyeluruh yang mencakup proyeksi penurunan angka kemiskinan secara realistis serta penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ada baik melalui perhitungan kembali alokasi anggaran, penajaman sasaran dan target program maupun perbaikan dalam pengelolaan program secara keseluruhan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RAN-PPK

Maksud dan tujuan penyusunan RAN-PPK 2012-2014 adalah untuk mempertajam strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan agar mampu mengantisipasi adanya berbagai perubahan eksternal yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap upaya pencapaian target penurunan kemiskinan sesuai RPJMN 2010-2014.

Dokumen RAN-PPK diharapkan untuk dapat memperhitungkan perubahan yang terjadi pada ekonomi

nasional setelah pelaksanaan MP3EI dan memperkirakan dampaknya pada pencapaian penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

RAN-PPK akan menjadi sebuah pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena memuat perkembangan pelaksanaan program, evaluasi menyeluruh terhadap hambatan dan kendala di dalam pelaksanaan program, proyeksi kemiskinan, dan strategi serta kebijakan untuk mencapai target dalam proyeksi yang telah dirumuskan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan RAN-PPK

Dasar hukum yang melandasi penyusunan dokumen RAN-PPK 2012-2014 adalah keputusan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 26 Mei 2011 berupa penugasan dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk menyiapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan tahun 2012-2014. Selanjutnya, konsep rencana aksi yang telah disusun tersebut akan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya akan mengkoordinasikan proses finalisasi penyusunannya.

1.4 Sistematika RAN-PPK

Dokumen RAN-PPK terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

1. Pendahuluan
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan RAN-PPK, maksud dan tujuan penyusunan RAN-PPK, dasar hukum, dan sistematika penulisan RAN-PPK.
2. Perkembangan Kemiskinan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
Bab ini berisi uraian mengenai perkembangan kemiskinan dalam jangka panjang (1976-2011) dan menengah (2000-2011) serta perkembangan pelaksanaan program-program afirmatif (keberpihakan) dalam 4 (empat) klaster kebijakan penanggulangan kemiskinan.
3. Analisis dan Proyeksi Kemiskinan
Bab ini berisi uraian mengenai analisis dan proyeksi kemiskinan berdasarkan adanya perkembangan mutakhir terkait dengan tren pelambatan penurunan kemiskinan dan rencana implementasi dokumen MP3EI.
4. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Bab ini berisi uraian mengenai strategi dan kebijakan baru yang merupakan penyempurnaan dari strategi dan kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMN 2010-2014 sebagai respon terhadap perubahan eksternal yang ada.

5. Rencana Aksi Program Penanggulangan Kemiskinan

Bab ini berisi uraian mengenai rencana tindakan/aksi berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masing-masing program penanggulangan kemiskinan yang akan diklasifikasikan dalam keempat klaster yang ada (berikut matriks penyesuaian target dan indikasi anggaran).

6. Penutup

Bab ini berisi uraian mengenai kaidah pelaksanaan dokumen RAN-PPK baik dalam kerangka perencanaan maupun penganggaran serta beberapa hal lainnya yang perlu ditekankan agar implementasi dokumen ini dapat berjalan lancar.

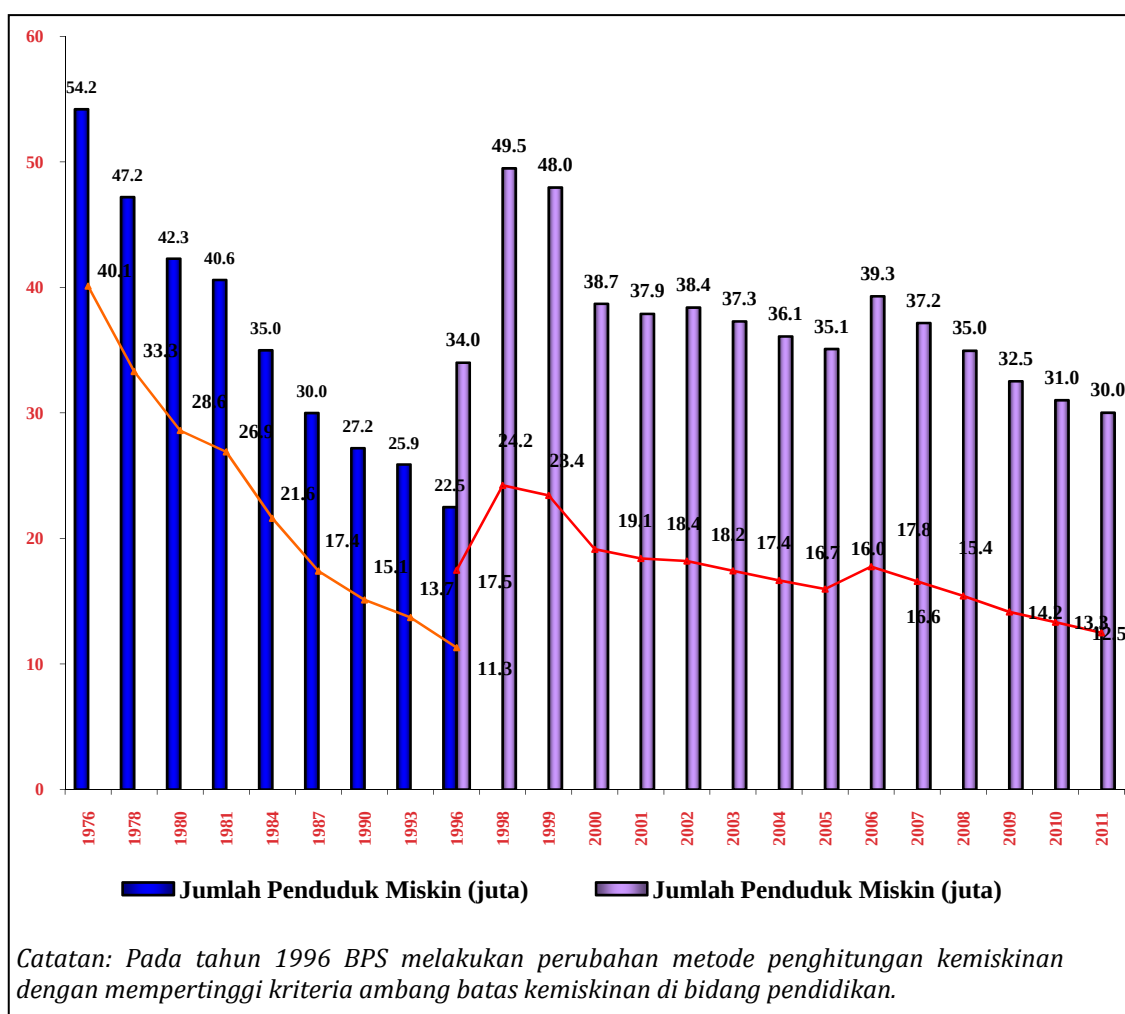


BAB II PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011 telah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 1976, lebih dari 54 juta penduduk Indonesia (sekitar 40 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Selama dua dekade pembangunan telah terjadi peningkatan kesejahteraan sehingga pada tahun 1996 tercatat jumlah penduduk miskin berkurang hingga menjadi 22,5 juta jiwa (13,7 persen). Namun demikian adanya krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah penduduk miskin hingga menjadi 49,5 juta jiwa (hampir 25 persen) pada tahun 1998 (lihat gambar 1).

Gambar 1.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 1976–2011



Sumber: Diolah dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) beberapa tahun, BPS.

Secara nasional, jumlah penduduk miskin yang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2011 adalah sebesar 30,02 juta jiwa (12,49 persen). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 yaitu sebesar 31,02 juta jiwa (13,33 persen), maka telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara sangat signifikan yaitu sekitar 1 juta jiwa, atau telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,84 persen. Namun demikian, keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini masih terhitung moderat apabila dibandingkan dengan penurunan pada paruh dekade sebelumnya. Pada periode 2005-2009, tingkat kemiskinan menurun antara 1,16 sampai 1,27 persen per tahun dan mampu mengentaskan hampir tujuh juta jiwa dari garis kemiskinan selama periode tersebut (lihat tabel 1).

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Periode 2000-2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)	Persentase terhadap total penduduk (Poverty Incidence)	Persentase Perubahan Tingkat kemiskinan	
2000	38,70	19,14		
2001	37,90	18,41	2000-2001	-0,73
2002	38,40	18,20	2001-2002	-0,21
2003	37,30	17,42	2002-2003	-0,78
2004	36,15	16,66	2003-2004	-0,76
2005	35,10	15,97	2004-2005	-0,69
2006	39,30	17,75	2005-2006	1,78
2007	37,17	16,58	2006-2007	-1,17
2008	34,96	15,42	2007-2008	-1,16
2009	32,53	14,15	2008-2009	-1,27
2010	31,02	13,33	2009-2010	-0,82
Maret 2011	30,02	12,49	2010-2011	-0,84

Sumber: Susenas beberapa tahun, BPS.

Selanjutnya, penurunan angka kemiskinan pada periode 2000-2011 juga masih belum diikuti dengan penurunan jumlah penduduk yang masih rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) mengalami penurunan dari 12,13 juta pada tahun 2005 menjadi 9,8 juta pada tahun 2008. Namun demikian, jumlah rumah tangga hampir miskin (RTHM) justru meningkat dari 6,97 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 7,66 juta jiwa pada tahun 2008. Data ini mengindikasikan

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi disisi lain juga menunjukkan bahwa kerentanan masyarakat terhadap gejolak ekonomi dan sosial masih tinggi. Penduduk yang berada pada kategori rumah tangga hampir miskin masih sangat rentan untuk terjatuh kedalam kemiskinan bila terjadi krisis ekonomi berkepanjangan yang mempengaruhi daya beli, terutama kebutuhan pokok (lihat tabel 2).

Tabel 2.
Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kriteria Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin

Kategori	PSE-05		PPLS-08		
	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Anggota Rumah Tangga
RT SANGAT MISKIN	3.894.314	20,4	2.989.865	17,1	15.944.536
RT MISKIN	8.236.990	43,1	6.828.824	39,1	25.190.010
RT HAMPIR MISKIN	6.969.601	36,5	7.665.288	43,8	19.261.505
TOTAL	19.100.905	100,0	17.483.983	100,0	60.396.051

Sumber : PSE 2005 dan PPLS 2008, BPS.

Berdasarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan terlihat bahwa selama periode 2010-2011 telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Angka indeks kedalaman kemiskinan selama periode tersebut menurun dari 2,21 pada tahun 2010 menjadi 2,08 pada tahun 2011. Hal ini berarti bahwa tingkat konsumsi masyarakat miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Selanjutnya, angka indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama juga menurun dari 0,58 pada tahun 2010 menjadi 0,55 pada tahun 2011 (lihat tabel 3). Hal ini berarti bahwa tingkat ketimpangan antar penduduk miskin semakin menyempit atau berkurang.

Tabel 3.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Tahun 2010-2011

Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
Maret 2010	1,57	2,80	2,21
Maret 2011	1,52	2,63	2,08
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂)			
Maret 2010	0,40	0,75	0,58
Maret 2011	0,39	0,70	0,55

Sumber : Diolah dari data Susenas Maret 2010 dan Maret 2011, BPS.

Perkembangan kemiskinan di Indonesia juga dapat dilihat secara regional berdasarkan kawasan atau wilayah kepulauan besar. Pada tahun 2011, Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki wilayah dengan persentase penduduk miskin yang lebih besar daripada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4).

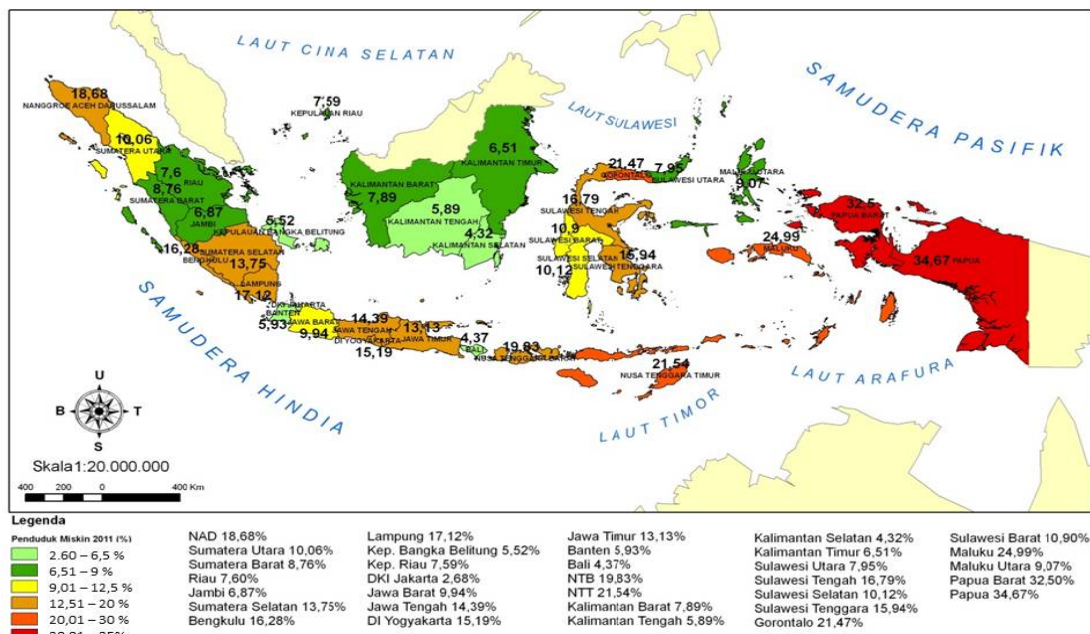
Tabel 4.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Berdasarkan Wilayah Tahun 2011

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	2 135,75	4 315,91	6 451,66	10,63	13,80	12,56
Jawa	7 518,72	9 208,27	16 726,99	9,32	16,12	12,14
Bali dan Nusa Tenggara	658,13	1 415,78	2 073,91	12,63	17,57	15,63
Kalimantan	265,44	704,11	969,55	4,49	8,70	6,92
Sulawesi	354,98	1 789,60	2 144,58	6,00	15,35	12,20
Maluku dan Papua	113,74	1 538,52	1 652,26	5,70	35,20	25,95
Indonesia	11 046,75	18 972,18	30 018,93	9,23	15,72	12,49

Sumber : BPS, 2011.

Tercatat bahwa wilayah Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin hingga mencapai 25,95 persen. Dari wilayah tersebut tercatat provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin sekitar 34,67 persen dan provinsi Papua Barat sekitar 32,5 persen (lihat gambar 2).

Gambar 2.
Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011



Sumber : Diolah dari data Susenas, BPS.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai sebaran penduduk miskin adalah dengan memperbandingkan angka kemiskinan per provinsi. Konsentrasi penduduk miskin pada tahun 2011 masih berada di wilayah pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat (4,7 juta jiwa), Jawa Tengah (5,1 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,4 juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,07 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa), dan Nusa Tenggara Timur (1,01 juta jiwa). Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar secara nasional, sedangkan provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar secara nasional (lihat tabel 5).

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Per Provinsi, Tahun 2011

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	DKI Jakarta	363,42	3,75
2	Bali	166,23	4,20
3	Kalimantan selatan	194,62	5,29
4	Bangka Belitung	72,06	5,75
5	Banten	690,49	6,32
6	Kalimantan Tengah	146,91	6,56
7	Kalimantan Timur	247,90	6,77
8	Kepulauan Riau	129,56	7,40
9	Riau	482,05	8,47
10	Sulawesi Utara	194,90	8,51
11	Kalimantan Barat	380,11	8,60
12	Jambi	272,67	8,65
13	Sumatera Barat	442,09	9,04
14	Maluku Utara	97,31	9,18
15	Sulawesi Selatan	832,91	10,29
16	Jawa Barat	4.648,63	10,65
17	Sumatera Utara	1.481,31	11,33
18	Sulawesi Barat	164,86	13,89
19	Jawa Timur	5.356,21	14,23
20	Sumatera Selatan	1.074,81	14,24
21	Sulawesi Tenggara	330,00	14,56
22	Jawa Tengah	5.107,36	15,76
23	Sulawesi Tengah	423,63	15,83
24	DI Yogyakarta	560,88	16,08

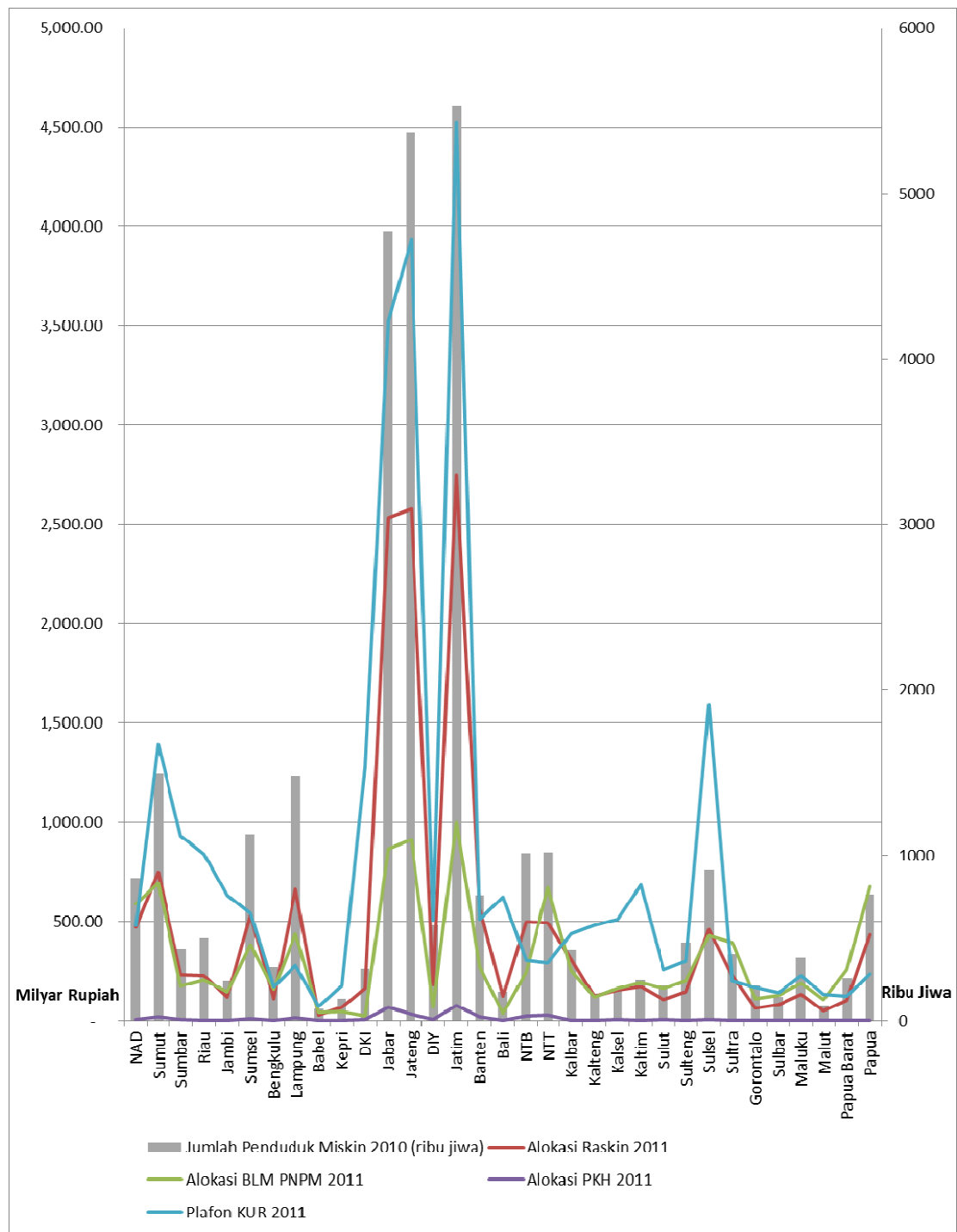
No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
25	Lampung	1.298,71	16,93
26	Bengkulu	303,60	17,50
27	Gorontalo	198,27	18,75
28	Aceh	894,81	19,57
29	Nusa Tenggara Barat	894,77	19,73
30	Nusa Tenggara Timur	1.012,90	21,23
31	Maluku	360,32	23,00
32	Papua Barat	249,84	31,92
33	Papua	944,79	31,98
Indonesia		30.018,93	12,49

Sumber : diolah dari data kemiskinan BPS tahun 2011.

2.2 Perkembangan Program Penanggulangan Kemiskinan

Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat kemiskinan nasional pada akhir tahun 2014 sebesar 8-10 persen sesuai dengan target RPJMN 2010-2014, pemerintah telah merumuskan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat keberpihakan (*affirmative*) kepada masyarakat miskin. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program, usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan ketepatan alokasi pendanaan sehubungan dengan sebaran penduduk miskin seperti telah diuraikan dalam bab perkembangan kemiskinan di atas. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan tingkat kesesuaian alokasi antara 4 program penanggulangan kemiskinan terbesar dengan jumlah penduduk miskin di daerah yang bersangkutan.

Gambar 3.
Perbandingan Alokasi Pendanaan dan Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2010



Catatan: Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 menjadi acuan penyusunan alokasi anggaran pada tahun 2011

Selanjutnya, untuk mempertajam fokus pelaksanaan setiap program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam 4 (empat) klaster sebagai berikut:

1. Klaster 1 adalah Program Bantuan dan Jaminan Sosial, yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Klaster 2 adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Klaster 3 adalah Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas usahanya agar kehidupan masyarakat miskin semakin stabil dan pendapatannya meningkat.

Klaster 4 adalah Program Pro-Rakyat, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan dan membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termarginalkan.

2.2.1 Program Bantuan dan Jaminan Sosial (Klaster 1)

Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial sebelumnya dilakukan berbasis rumah tangga, tetapi sistem terkini telah mengalihkan konsentrasi penanggulangan kemiskinan menjadi berbasis keluarga. Program-program pada klaster ini meliputi:

1. Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung ini dapat berupa bantuan tunai bersyarat berupa bantuan langsung bersyarat (*conditional cash transfer*); bantuan langsung dalam-bentuk barang, misalnya pemberian subsidi beras bagi masyarakat miskin (*raskin*); serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lanjut usia, yatim/piatu dan sebagainya.
2. Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua (*parenting education*), berkaitan dengan kesehatan dan gizi melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Bantuan pendidikan berupa Subsidi Siswa Miskin (SSM) mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Program
Keluarga
Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Syarat yang harus dipenuhi berupa kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Penerima bantuan merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). RTSM merupakan penduduk dengan pendapatan terendah yang diperoleh melalui pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS'08) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan PKH diharapkan mampu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals-MDGs*. Ada 5 (lima) komponen *MDGs* yang secara tidak langsung terbantu pencapaiannya jika PKH dilaksanakan optimal, yaitu: (i) pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; (ii) peningkatan akses pendidikan dasar; (iii) kesetaraan gender; (iv) pengurangan angka kematian bayi dan balita; serta (v) pengurangan kematian ibu karena melahirkan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Pada awal pelaksanaan, PKH hanya mencakup 387.928 RTSM yang tersebar di 7 Provinsi, 48 Kabupaten/Kota, dan 337 Kecamatan (lihat tabel 6).

Tabel 6.
Lokasi Pelaksanaan PKH

Tahun 2007	Pelaksanaan awal di 7 Provinsi (DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, NTT), 48 Kabupaten/Kota, dan 337 Kecamatan. Jumlah penerima sebanyak 387.928 RTSM.
Tahun 2008	Dikembangkan di 6 Provinsi (Banten, Aceh, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan NTB) sehingga menjadi 13 Provinsi, 70 Kabupaten/Kota, dan 629 Kecamatan. Jumlah penerima sebanyak 620.484 RTSM.
Tahun 2009	Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Provinsi dan 43 Kabupaten/Kota (Lokasi PKH 2007-2008) dengan tambahan penerima sebanyak 105.892 RTSM, sehingga menjadi 726.376 RTSM.
Tahun 2010	Dikembangkan di 7 Provinsi (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi 20 Provinsi, 88 Kabupaten/Kota, 954 kecamatan. Jumlah penerima sebanyak 816.376 RTSM.
Tahun 2011	Dikembangkan di 5 Provinsi (Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Maluku Utara), sehingga menjadi 25 Provinsi, 118 Kabupaten/Kota, 1.351 kecamatan. Jumlah penerima sebanyak 1.116.000 RTSM.

Sumber : Kementerian Sosial, 2011

Berdasarkan Evaluasi Deteksi Dini Dampak PKH 2007 terhadap Kesehatan dan Pendidikan (Bappenas, 2009), pelaksanaan program belum menunjukkan perubahan terlalu signifikan, namun beberapa indikator menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas belum terlihat karena implementasi relatif secara efektif baru satu tahun (pada waktu evaluasi deteksi dini dampak dilaksanakan). Dampak PKH terhadap peningkatan siswa terdaftar setingkat SMP adalah 3,1 persen. Di samping itu, tingkat kehadiran dan fasilitas pendukung pendidikan juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, dalam bidang kesehatan, PKH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesehatan RTSM. Hal ini dapat terlihat dari kondisi imunisasi pada anak balita yang mengalami peningkatan yang signifikan. Status malnutrisi anak usia 0-36 bulan juga mengalami penurunan. Dampak positif lainnya yaitu peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas yang meningkat. Dalam hal daya beli masyarakat, belanja rumah tangga untuk komponen kesehatan dan pendidikan meningkat secara signifikan setelah pelaksanaan PKH.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan, program ini telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam sasaran maupun cakupan wilayah. Walaupun demikian masih terdapat ruang untuk perbaikan program dengan mengidentifikasi kendala-kendala seperti sulitnya menjangkau RTSM yang menjadi sasaran program (isu *targeting*).

Secara spesifik, tidak tercapainya target RPJMN 2010-2014 untuk menjangkau 816.000 RTSM pada tahun 2010 disebabkan oleh beberapa hal seperti: (i) pergerakan RTSM menjadi tidak *eligible* terhadap kriteria PKH (pindah rumah, anak lulus dari SMP, dll); (ii) data PPLS 2008 yang digunakan sudah mengalami perubahan. Data RTSM penerima PKH pun hanya sekitar 88,6 persen yang layak (*eligible*).

Tabel 7.
Indikator Perkembangan PKH 2007-2010 dan Rencana 2011

Indikator Perkembangan	2007	2008	2009	2010	Rencana 2011
Jumlah RTSM	387.928	620.484	726.376	816.000	1.116.000
Jumlah Provinsi	7	13	13	20	25
Jumlah Kab./Kota	48	70	70	88	103
Jumlah Kecamatan	337	637	781	946	1.151

Indikator Perkembangan	2007	2008	2009	2010	Rencana 2011
Jumlah Operator	192	279	334	455	510
Jumlah Pendamping	1.305	2.448	3.036	3.452	4.072
Anggaran	843,6 Miliar Rupiah	1,006 Triliun Rupiah	1,1 Triliun Rupiah	1,3 Triliun Rupiah	1,610 Triliun Rupiah

Sumber : Kementerian Sosial, 2011

Melalui Laporan Hasil *Spot Check* PKH (Bappenas, World Bank, Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2010) dapat dicermati bahwa selama pelaksanaan PKH terdapat beberapa permasalahan dan hambatan. Hal utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah pendataan peserta program. Aspek pendataan masih mengalami masalah di lapangan, terutama banyaknya kasus salah sasaran. Selain itu pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data masih belum sempurna. Dalam hal layanan pendidikan, penerima PKH yang dapat mengakses subsidi siswa miskin hanya sekitar 18 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan layanan kesehatan. Penerima PKH yang sudah termasuk dalam kepesertaan Jamkesmas sekitar 69 persen. Kondisi ini terjadi karena dukungan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah belum memadai.

Sistem informasi manajemen PKH termasuk baik jika dibandingkan dengan program lain, namun pelaksanaan verifikasi belum mencapai 100 persen. Kerjasama yang lebih baik antar berbagai pihak seperti dari fasilitas pendidikan dan kesehatan pun perlu ditingkatkan. Kondisi yang terjadi masih ada sebagian petugas pada layanan kesehatan (bidan) dan pendidikan (guru) yang keberatan dalam melakukan verifikasi secara kontinu. Di samping itu, peran PT. Pos juga perlu dirasionalisasi karena di beberapa daerah pengembalian formulir verifikasi masih sepenuhnya dilakukan oleh pendamping. Selain kendala-kendala tersebut, masih terdapat permasalahan teknis seperti distribusi formulir verifikasi di beberapa kabupaten/kota yang disebabkan oleh tantangan kondisi geografis. Dalam hal sistem pengaduan masyarakat, prosedur dan tindak lanjut pengaduan juga masih belum dapat berjalan dengan optimal.

Keberhasilan pelaksanaan program sangat tergantung dari proses sosialisasi sementara strategi sosialisasi belum berjalan dengan baik. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sektor utama sosialisasi belum seperti yang diharapkan. Lemahnya sosialisasi tersebut menyebabkan pemangku kepentingan tidak memahami bahwa PKH adalah bantuan bersyarat. Kondisi ini juga menyebabkan koordinasi antar

Kementerian dan Dinas Teknis serta koordinasi di tingkat Provinsi belum optimal.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan kelembagaan PKH sendiri. Struktur kelembagaan dan peran koordinator wilayah (Korwil) masih belum baik. Selain itu terjadi proses rekrutmen personil yang tidak tepat padahal tugas mereka menuntut mobilitas yang tinggi, responsif dan pengalaman lapangan yang memadai. Pelaksanaan desentralisasi kewenangan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat dan lembaga Korwil belum seimbang.

**Program Subsidi
Beras untuk
Masyarakat
Miskin (Raskin).**

Program Raskin diawali dengan pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (Opsus) Beras pada tahun 1998. Pada waktu itu, opsus beras merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak krisis moneter/ekonomi. Peningkatan harga beras akibat krisis ekonomi sejak bulan Mei 1997 berdampak pada penurunan tingkat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Penurunan daya beli, kenaikan biaya hidup, hilangnya sumber pendapatan, dan penurunan produksi pangan menimbulkan terjadinya rawan pangan yang bila tidak segera diatasi akan menimbulkan kerawanan sosial dan politik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan sejumlah upaya diantaranya membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan sebagai *Food Crisis Center* dan program bantuan pangan (melalui Opsus beras). Opsus beras merupakan mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat rawan pangan. Selanjutnya, program Opsus beras ini menjadi rintisan program bantuan sosial lainnya dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang saat ini menjadi Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin).

Karena berbagai kendala, upaya untuk membuat program Raskin terus dapat mencakup seluruh rumah tangga miskin baru dapat diwujudkan sejak tahun 2008, ketika persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin mampu mencapai seluruh rumah tangga miskin (100 persen). Tahun 2009, pada awalnya, Program Raskin dialokasikan mencakup seluruh rumah tangga miskin (100 persen) sejumlah 18,5 juta RTS, 15 kg/RTS, selama 10 bulan, dan harga tebus Rp 1.600, dan total subsidi sebesar Rp 12,987 triliun. Perkembangan program Raskin tahun 2004-2010 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Perkembangan Program Raskin 2004-2010

URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah RT Miskin (juta KK)	15,75	15,79	15,50	19,10	19,10	18,50	17,50
Rumah Tangga Sasaran (juta KK)	8,59	8,30	10,83	15,78	19,10	18,50	17,50
Persentase Rumah Tangga Sasaran (%)	54,56	52,56	69,86	82,62	100,00	100,00	100,00
Alokasi beras (Kg) per RTS per bulan	20	20	15	10	15	15	13 (5 bln) 15 (7 bln)
Durasi (bulan)	12	12	10	11	12	12	12
Harga Pembelian Beras (HPB) (Rp/kg)	3.549	3.351	4.275	4.275	4.619	5.500	6.285
Harga tebus masyarakat (Rp)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
Subsidi harga beras (Rp)	2.549	2.351	3.275	3.275	3.019	3.900	4.685
Jumlah subsidi 1 tahun (Rp triliun)	5,3	4,7	5,3	5,7	10,1	12,99	13,9

Sumber: Kemenkokesra, Bulog (2011)

Pada tahun 2011 ini, Program Raskin mencakup seluruh keluarga miskin sebagai rumah tangga sasaran (RTS). Total dana sebesar Rp 15,27 triliun dipergunakan untuk menyalurkan beras sebanyak 3,15 juta ton kepada sebanyak 17,5 juta keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan beras sebanyak 15 kg selama 12 bulan. Harga yang harus dibayarkan oleh RTS adalah sebesar Rp 1.600,- per kg (lihat tabel 9).

Tabel 9.
Rincian Program Raskin tahun 2011

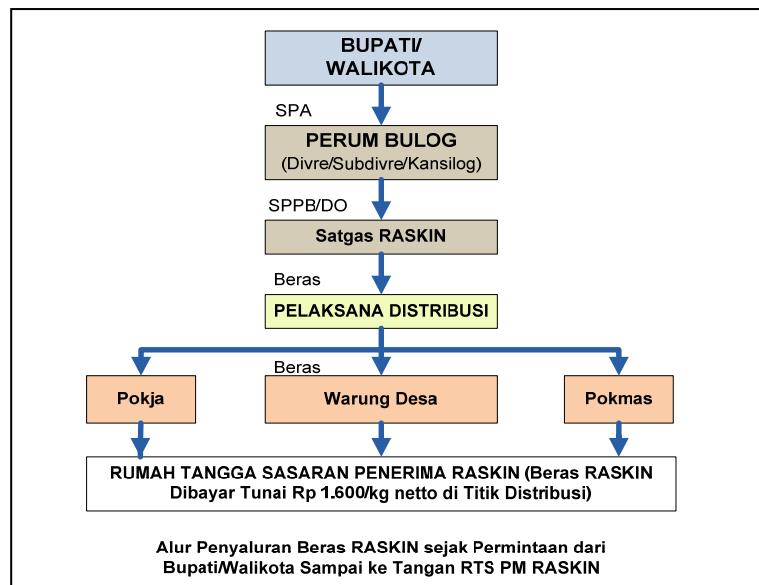
URAIAN	SATUAN	ALOKASI
Sasaran RTS	Juta RTS	17,50
Alokasi	Kg/RTS	15
Durasi	Bulan	12
Jumlah Pagu Beras	Juta Ton	3,147
Harga Tebus	Rp/Kg	1.600

Sumber : Kemenkokesra, Bulog (2011)

Proses dan mekanisme penyaluran beras pada Program Raskin adalah sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) (Kepala Divisi Regional (Kadivreg)/Kepala Sub-Divisi Regional (Kasubdivreg)/Kepala Kantor Seksi Logistik (KaKansilog) Perum BULOG). Perum BULOG akan melihat usulan tersebut berdasarkan pagu

Raskin (tonase dan jumlah RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi (TD), Perum BULOG mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin. Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi. Di Titik Distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat) Raskin dilakukan oleh salah satu dari 3 (tiga) Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa (Wardes), atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di Titik Distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS-PM Raskin ke Pelaksana Distribusi (lihat gambar 4).

Gambar 4.
Alur Penyaluran Beras Program Raskin



Sumber: Bulog, 2011

Sejauh ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Raskin, antara lain keterlambatan penetapan dan penyaluran program Raskin, ketidaktepatan dalam penyaluran program Raskin, jaminan cakupan masyarakat miskin, dan ketersediaan beras Raskin.

Permasalahan yang pertama merupakan yang paling krusial untuk dicermati. Sebagai contoh, pada tahun 2009 telah terjadi keterlambatan penetapan dan penyaluran program Raskin, disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi pada proses perencanaan dan implementasi program.

Saat ini juga masih terjadi beberapa ketidaktepatan (dalam kuantitas, kualitas, dan harga) dalam penyaluran program Raskin. Di sebagian besar daerah, ketidaktepatan kuantitas (jumlah beras yang diterima masyarakat lebih sedikit dari pagu yang ditetapkan per RTS) sering dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama, dengan alasan untuk membantu pula rumah tangga miskin yang tidak memperoleh Program Raskin. Sementara, ketidaktepatan harga (RTS membeli beras dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan) sebagian besar didasarkan pada perlunya biaya tambahan untuk transportasi dari titik distribusi ke RTS.

Cakupan jangkauan Raskin dan ketersediaan logistik untuk dapat mendistribusikan beras Raskin tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat masih merupakan salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan program ini. Saat ini, pemerintah pusat masih belum dapat menjamin cakupan seluruh masyarakat miskin secara tepat. Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan perlunya dana tambahan terutama untuk biaya transportasi sampai dengan rumah tangga penerima manfaat.

Ketersediaan beras untuk program Raskin di gudang Perum BULOG juga menjadi isu penting. Pada tingkat nasional, dengan terjadinya harga pasar beras yang lebih tinggi daripada Harga Pembelian Pemerintah (HPP), maka Perum BULOG mengalami kendala dalam melakukan pembelian beras yang akan didistribusikan pada Program Raskin ini. Pada tingkat daerah, sebagian besar divisi regional Perum Bulog mempunyai ketersediaan yang cukup untuk program Raskin ini, karena perencanaan kegiatan telah dipersiapkan dengan baik. Bila ditemukan divisi regional Perum Bulog yang tidak mempunyai cadangan beras yang mencukupi, maka internal Perum Bulog telah mempunyai mekanisme penyaluran beras dari divisi regional yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

**Program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas).**

Pemerintah telah mengimplementasikan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H mengenai kesehatan sebagai hak dasar tiap individu dan warga Negara secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. Program dan kebijakan menyangkut jaminan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perkembangan terkini pada tataran hukum, Sistem Jaminan Sosial telah dimasukkan ke

dalam perubahan UUD 1945 dan telah terbit UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Pelaksanaan program Jamkesmas tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU SJSN. Program Jamkesmas Tahun 2011 dilaksanakan dengan beberapa perbaikan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan, sejak tahun 2010 telah dilakukan upaya perluasan cakupan, melalui penjaminan kesehatan kepada masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) serta masyarakat miskin akibat bencana pasca-tanggap darurat, sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana. Peserta yang telah dicakup sejak tahun 2008 meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada dalam kuota, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), gelandangan, pengemis dan anak telantar. Kementerian Kesehatan saat ini telah mencanangkan Jaminan Kesehatan Semesta pada akhir Tahun 2014, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan masuk dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (*universal coverage*).

Dalam rangka perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan mencapai sekitar 59,07 persen pada akhir Desember tahun 2010. Cakupan tersebut terdiri dari asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI/POLRI) sebesar 7,32 persen, Jamsostek sebesar 2,08 persen, asuransi perusahaan sebesar 2,72 persen, asuransi swasta lainnya sebesar 1,21 persen, 32,37 persen jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan 13,37 persen tercakup dalam

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk miskin.

Jamkesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit (RS), terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas, mulai tahun 2010 telah disediakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas dan jaringannya terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan preventif dan promotif, yang mencakup Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana (KIA-KB), gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Dalam aspek pelayanan, dalam rangka mewujudkan kendali mutu dan kendali biaya pada tahun 2009 diperkenalkan *prospective payment system* dengan menerapkan paket “Indonesia-Diagnosis Related Groups (INA-DRGs)” versi 1.5. Pada tahun 2010 dilakukan penyempurnaan dengan versi 1.6 yang lebih sederhana, lebih terintegrasi serta mudah dipahami dan diaplikasikan. Pada akhir tahun 2010 telah dilakukan perubahan penggunaan *software grouper* dari INA-DRG’s ke paket “Indonesia-Case Based Groups (INA-CBGs)” sebagai perbaikan lebih lanjut.

Seiring dengan penambahan kepesertaan maka diperlukan perluasan jaringan fasilitas kesehatan rujukan dengan meningkatkan jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan rujukan setempat. Pada aspek pendanaan, Kementerian Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas terus melakukan upaya perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dana Jamkesmas, agar dana yang dikirimkan sebagai uang muka kepada fasilitas kesehatan dapat segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif.

Dalam aspek pengorganisasian dan manajemen, dilakukan penguatan peran Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama peningkatan kontribusi pemerintah daerah di dalam pembinaan dan pengawasan serta peningkatan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan kepesertaan melalui Jamkesda dan memberikan bantuan tambahan (suplementasi dan komplementasi) pada hal-hal yang tidak dijamin oleh program Jamkesmas.

Meskipun perbaikan terus dilakukan, masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Jamkesmas antara lain dalam hal kepesertaan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, pendanaan program, dan pengorganisasian peran dan fungsi Pemerintah Daerah.

Dalam hal kepesertaan, basis data peserta Jamkesmas 2010 masih mengacu pada data makro Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2005, dan ditetapkan *by name by address* oleh Bupati/Walikota Tahun 2008. Dengan demikian masih banyak terjadi kendala perubahan-perubahan data di lapangan seperti banyaknya kelahiran baru, kematian, pindah tempat tinggal, perubahan tingkat sosial ekonomi, dan masih terdapatnya penyalahgunaan rekomendasi dari institusi yang berwenang. Selain hal-hal tersebut masih juga ditemukan penyalahgunaan kartu oleh yang tidak berhak. Di beberapa lokasi pelaksanaan program juga ditemukan peserta yang kesulitan mendapatkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) bagi bayi baru lahir dari peserta Jamkesmas, masyarakat miskin penghuni panti sosial dan lapas/rutan, sertamasyarakat miskin korban bencana pascatanggap darurat. Permasalahan tersebut di atas disebabkan masih belum adanya kesamaan persepsi antara Verifikator Independen, Petugas Askes di lapangan dan fasilitas kesehatan. Berbagai kendala tersebut menyebabkan banyak daerah yang meminta tambahan kuota dan atau merubah Surat Keputusan Bupati/Walikota yang sudah diterbitkan meskipun sasaran kepesertaan 2010 adalah tetap sebesar 76,4 juta penduduk.

Kendala dalam pelayanan kesehatan antara lain: (a) masih terdapat (meskipun kasusnya sangat sedikit) penolakan pasien Jamkesmas dengan alasan kapasitas RS sudah penuh; (b) sistem rujukan belum berjalan dengan optimal; (c) belum semua RS menerapkan kendali mutu dan kendali biaya; (d) peserta masih dikenakan urun biaya dalam mendapatkan obat, Alat Medis Habis Pakai (AMHP) atau darah; (e) penyediaan dan distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan obat program Jamkesmas; dan (f) penetapan status kepesertaan Jamkesmas atau bukan peserta Jamkesmas sejak awal masuk Rumah Sakit, belum dipatuhi sepenuhnya oleh peserta.

Dalam hal pendanaan program, pertanggungjawaban pendanaan fasilitas kesehatan pada pelaksanaan Jamkesmas 2010 masih memiliki dua permasalahan pokok yaitu mengenai teknis penerapan INA-DRGs dan ketepatan waktu pengiriman klaim. Permasalahan teknis dalam penerapan pola pembayaran INA-DRGs antara lain: (a) belum komprehensifnya pemahaman

penyelenggaraan pola pembayaran dengan INA-DRGs terutama oleh dokter dan petugas lainnya yang menyebabkan belum terlaksananya pelayanan yang efisien dan mengakibatkan biaya pembayaran paket seringkali dianggap tidak mencukupi, (b) belum semua RS memiliki kode RS dan penetapan kelas RS, (c) belum semua RS pengampu dapat memberikan pembinaan tentang pola pembayaran dengan INA-DRGs kepada RS di sekitarnya secara optimal. Permasalahan waktu pengiriman klaim, yaitu ketidaktepatan waktu dalam mengirimkan pertanggungjawaban klaim, bahkan masih ditemukan beberapa rumah sakit belum dapat menggunakan format INA-DRGs secara benar.

Dalam hal pengorganisasian, peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2010 dirasakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi adalah operasional kegiatan seperti kegiatan sosialisasi, advokasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam keuangan serta kinerja pelayanan kesehatan masih belum berjalan sebagaimana seharusnya. Kendala tersebut dapat dipahami mengingat tidak tersedianya dana operasional tahun 2010 dari Pusat dan bantuan dana dari Daerah juga tidak tersedia. Beban kerja Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi, Kabupaten/Kota semakin tinggi dengan adanya daerah-daerah yang melaksanakan Jamkesda termasuk pemanfaatan tenaga verifikator independen oleh daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program Jamkesmas dan Jamkesda masih dimungkinkan terjadinya duplikasi anggaran.

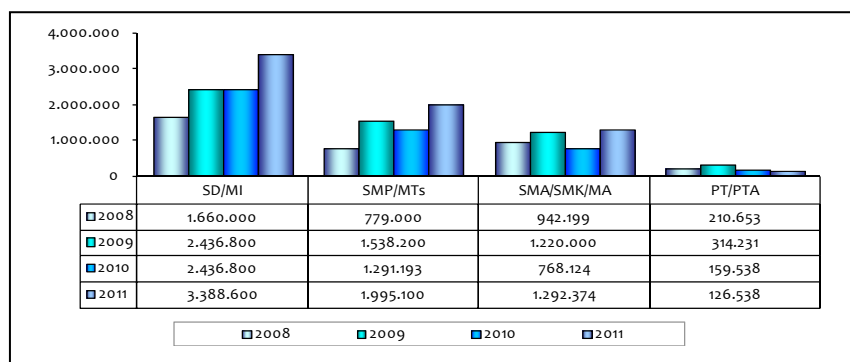
Program Subsidi Siswa Miskin (SSM, sebelumnya bantuan siswa miskin)

Dalam rangka meningkatkan akses khususnya bagi masyarakat miskin usia sekolah untuk dapat bersekolah, pemerintah menyediakan subsidi siswa miskin (SSM) untuk semua jenjang pendidikan dari SD/MI hingga Pendidikan Tinggi (PT) dan Pendidikan Tinggi Agama (PTA) dengan satuan biaya yang berbeda menurut jenjang pendidikan. Kebijakan pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin ini memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan jumlah subsidi untuk siswa tidak mampu terutama di daerah dengan angka partisipasi pendidikan rendah merupakan bagian dari kebijakan pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi didorong untuk menyediakan dana sejenis untuk memperluas cakupan penerima subsidi siswa miskin.

Dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antar tingkat sosial ekonomi, pemerintah telah berupaya meningkatkan pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui

pemberian subsidi siswa miskin untuk jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Sejak tahun 2008 hingga 2011, jumlah sasaran penerima subsidi siswa miskin mengalami peningkatan khususnya untuk jenjang SD/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA). Pada tahun 2011, jumlah sasaran penerima subsidi siswa miskin untuk seluruh jenjang mencapai 6,8 juta siswa/mahasiswa dan direncanakan meningkat menjadi 8,13 juta di tahun 2012 (lihat Gambar 5).

Gambar 5.
Jumlah Sasaran Subsidi Siswa Miskin, 2008 – 2011



Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beberapa tahun, Bappenas

Berbagai upaya ini telah berhasil menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok status ekonomi yang terlihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang pernah diikuti oleh penduduk berusia 13–15 tahun. Pada tahun 2007, 94,2 persen penduduk di kuantil terkaya berhasil menamatkan jenjang SD/MI dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 96,9 persen. Pada periode tahun yang sama, angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs juga meningkat dari 92,8 persen menjadi 95,1 persen. Hal yang sama terlihat pada penduduk di kuantil termiskin, dimana angka tamat jenjang SD/MI-nya meningkat dari 79,5 persen pada tahun 2007 menjadi 83,1 persen pada tahun 2009. Sementara itu, angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs meningkat dari 61,6 persen menjadi 69,4 persen pada periode yang sama. Capaian tersebut menggambarkan telah terlaksananya perbaikan efisiensi internal pendidikan, yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan pendidikan.

Walaupun demikian, dalam pelaksanaan program subsidi siswa miskin masih ditemui beberapa masalah dan kendala, antara lain terbatasnya kapasitas pengelolaan pemberian subsidi siswa miskin baik di tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan,

termasuk ketepatan pendataan, penentuan sasaran, dan mekanisme penyalurannya.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga masih belum optimal dalam proses pemberian subsidi siswamiskin. Akibatnya, proses pencairan dana menjadi terlambat dan dikhawatirkan bisa mengganggu proses kegiatan belajar-mengajar siswa yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa terbatasnya dana *safeguarding* telah menyebabkan belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam proses pendataan siswa miskin, verifikasi, dan penyaluran dana.

Pemberian subsidi siswa miskin juga dirasakan belum sepenuhnya mampu untuk mengurangi angka putus sekolah, mengulang kelas dan lama penyelesaian sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah. Selain itu, optimalisasi manfaat subsidi siswa miskin belum didukung oleh tersedianya beasiswa transisi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga upaya meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya belum optimal.

Subsidi siswa miskin yang dialokasikan oleh pemerintah selama ini masih terbatas dan belum optimal untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Saat ini dukungan mekanisme pembiayaan melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) yang sangat diperlukan untuk mendukung pemberian bantuan siswa/mahasiswa miskin masih sangat terbatas. Dengan demikian peran pihak swasta untuk mendukung dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberian bantuan masih belum optimal.

**Program
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional
(Redistribusi
Tanah)**

Pada tahun 2011, BPS mencatat bahwa sebanyak 12,49 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 30,02 juta penduduk hidup dibawah garis kemiskinan (BPS, 2011). Sekitar 63,20 persen dari jumlah penduduk miskin tersebut atau 18,97 juta jiwa merupakan penduduk miskin yang tinggal di perdesaan. Mereka umumnya bekerja pada sektor pertanian. Dari sekitar 119,4 juta angkatan kerja di Indonesia, jumlah angkatan kerja di sektor pertanian mencapai 42,47 juta jiwa dari total angkatan kerja.

Pada sektor pertanahan, kepemilikan tanah-tanah pertanian oleh petani menunjukkan angka-angka yang memprihatinkan. Para petani rata-rata memiliki tanah-tanah pertanian yang tidak cukup produktif untuk usaha di bidang pertanian. Tidak sedikit petani memiliki tanah tidak lebih dari 0,5 ha atau petani gurem (petani yang mengolah tanah garapan seluas kurang dari 0,5

hektar). Petani khususnya petani gurem termasuk kelompok penduduk yang rentan miskin.

Kondisi tersebut selain menyebabkan petani menjadi tidak produktif juga sulit mencapai kesejahteraan hidup. Permasalahan agraria atau pertanahan merupakan salah satu permasalahan strategis terhadap penciptaan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, penataan P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) tetap perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih berkeadilan, terutama bagi kalangan kurang mampu.

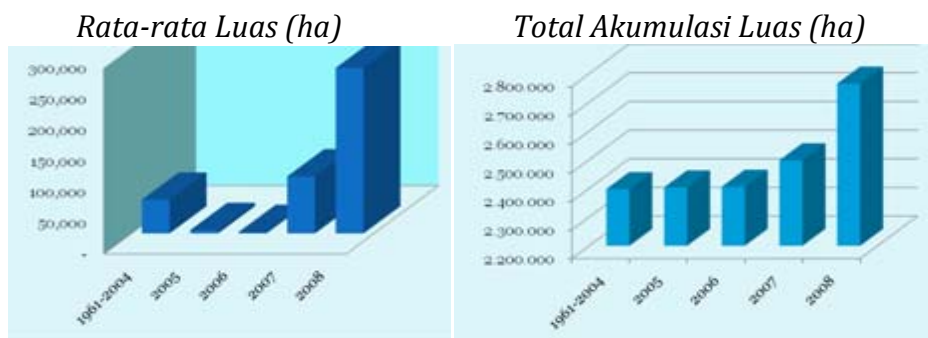
Karena sektor agraria/pertanahan akan berpengaruh secara nyata terhadap jumlah masyarakat miskin, Pemerintah telah berupaya membangun sektor agraria/pertanahan dengan melaksanakan agenda Reforma Agraria yang merupakan suatu kebijakan untuk melakukan penyempurnaan hal-hal sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi maupun dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembaruan Agraria. Ketetapan ini mencakup: (i) penyempurnaan peraturan perundangan di bidang agraria/pertanahan; (ii) penyelenggaraan *Land Reform (asset reform)*; dan (iii) penyelenggaraan *access reform*, yaitu pembukaan aset-aset masyarakat berupa tanah ke sumber-sumber produksi, ekonomi, politik dan permodalan. Tujuan dari penyelenggaraan kebijakan Reforma Agraria tersebut adalah: (i) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil; (ii) mengurangi kemiskinan; (iii) menciptakan lapangan kerja; (iv) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, politik dan permodalan; (v) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (vi) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan (vii) meningkatkan ketahanan pangan terutama ketahanan pangan rumah tangga. Reforma Agraria tersebut secara gradual telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

Salah satu upaya dalam Pembaruan Agraria Nasional adalah melaksanakan Redistribusi Tanah dimana kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional pembangunan bidang Penanggulangan Kemiskinan. Redistribusi tanah merupakan suatu upaya peningkatan dan penanggulangan kemiskinan sehingga petani penggarap dapat memanfaatkan tanahnya secara penuh dengan memilikinya. Kegiatan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Peraturan ini menyatakan bahwa pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar untuk kepentingan masyarakat dan negara dilakukan melalui reforma agraria dan program strategis negara

serta untuk cadangan negara lainnya.

Dalam rangka pengurangan ketimpangan P4T, telah diselenggarakan Reforma Agraria melalui inventarisasi dan redistribusi tanah-tanah pertanian kepada masyarakat. Dari kegiatan inventarisasi tersebut maka dapat diperoleh tanah-tanah yang dialokasikan sebagai tanah obyek *Land Reform*, yang hingga akhir tahun 2008 mencapai seluas 2.747.520 Ha. Pengalokasian tanah untuk obyek *Land Reform* dalam kurun waktu 2005-2008 mengalami percepatan 60,3 persen dibandingkan dalam kurun waktu tahun 1961-2004, yaitu 54.500 Ha per tahun pada 1961-2004 dan 87.349 Ha per tahun pada 2005-2008 (lihat gambar 6).

Gambar 6.
Alokasi Tanah Obyek *Land Reform* 1961-2008



Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2008

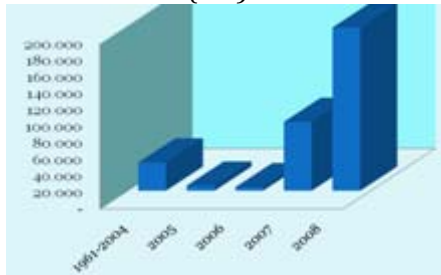
Tanah-tanah obyek *Land Reform* tersebut selanjutnya didistribusikan kepada para petani penerima manfaat. Hingga akhir tahun 2008, tanah obyek *Land Reform* telah didistribusikan seluas 1.521.386 Ha kepada petani penerima manfaat sebanyak 1.796.534 KK. Dalam jumlah luasan tanah yang didistribusikan maupun banyaknya jumlah petani penerima manfaat redistribusi tanah obyek *Land Reform*, pelaksanaan kebijakan tersebut dalam kurun waktu 2005-2008 mengalami percepatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan kebijakan dalam kurun waktu 1961-2004. Ini dapat terlihat dari pelaksanaan redistribusi tanah obyek *Land Reform* sebesar 250,6 persen dari 26.220 Ha per tahun pada 1961-2004 menjadi 91.925 Ha per tahun pada 2005-2008. Jumlah petani penerima manfaat redistribusi tanah obyek *Land Reform* mengalami percepatan sebesar 113,5 persen, yaitu 34.195 KK per tahun pada 1961-2004 dan 72.991 KK per tahun pada 2005-2008 (lihat gambar 7). Percepatan ini terjadi terutama disebabkan oleh konsistensi kebijakan pemerintah untuk tetap fokus terhadap perlindungan hak-hak masyarakat

tani dan konsistensi terhadap stabilitas serta produktivitas pertanian

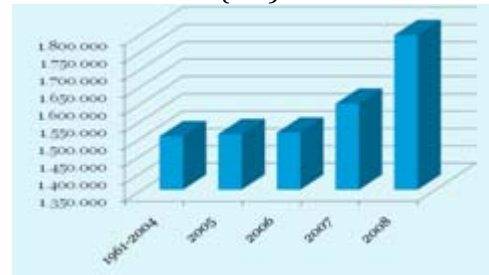
Gambar 7.

Penerima Manfaat Tanah Obyek *Land Reform*, 1961-2008

Rata-rata Penerima Manfaat
(KK)



Total Akumulasi Penerima Manfaat
(KK)



Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2008

Pada tahun 2009, dari target sebanyak 310.000 bidang tanah telah dapat direalisasikan sebanyak 232.374 bidang sedangkan dari kegiatan redistribusi swadaya teralisasi 1.801 bidang dari target 31.202 bidang. Adapun pada tahun 2010 ditargetkan redistribusi tanah sebanyak 210.500 bidang dan terealisasi sebanyak 203.161 bidang, sementara redistribusi tanah swadaya ditargetkan 15.550 bidang dan dapat terealisasi sebanyak 26 bidang. Redistribusi tanah di tahun 2011 ditargetkan sebanyak 182.575 bidang, sedangkan dari redistribusi swadaya tidak ditargetkan lagi.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam implementasi kegiatan pengelolaan pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya batas kawasan hutan sehingga tanah yang ditetapkan sebagai obyek *Land Reform* pada waktu dilakukan pengukuran ternyata digugat oleh pihak kehutanan.
2. Adanya penetapan kawasan pertambangan yang tumpang tindih dengan yang ditetapkan sebagai obyek *Land Reform* dikarenakan tidak adanya koordinasi antara pihak pertambangan dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional).
3. Kurangnya koordinasi dengan pihak lain sehingga tanah obyek *Land Reform* tumpang tindih dengan asset milik TNI (Tentara Nasional Indonesia, PTPN (PT. Perkebunan Nusantara), dan sebagainya.

4. Adanya permasalahan di lapangan seperti tanah-tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang disengketakan oleh masyarakat dan bekas pemiliknya, tanah-tanah obyek *Land Reform* yang didistribusikan namun belum diganti rugi kepada bekas pemiliknya, penggarap bukan petani dan tidak menguasai tanah tersebut.
5. Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi obyek *Land Reform*, pada kenyataannya sudah berubah penggunaannya atau dikuasai oleh pihak lain. Di samping itu, hal ini dapat juga dikarenakan adanya perubahan penggunaan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah tersebut.

**Program
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana (KB)**

Sampai dengan bulan November 2011 jumlah peserta KB baru dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS1) yang mendapatkan alat kontrasepsi adalah sebanyak 3,86 juta. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KS1 yang mendapatkan alat/obat kontrasepsi gratis adalah sebanyak 14,61 juta. Sebanyak 183 kabupaten/kota yang berada di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (*galcitas*) telah diupayakan untuk mendapatkan pelayanan KB. Program KB telah berhasil meningkatkan angka prevalensi pemakaian alat dan obat kontrasepsi/alokon (*contraceptive prevalence rate/CPR*) cara modern, meskipun tidak signifikan kenaikannya, yaitu dari sebesar 56,7 persen (SDKI 2002-2003) menjadi sebesar 57,4 persen (SDKI 2007).

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) KPS dan KS I anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menjadi peserta KB adalah sebesar 82,10 persen (dari 1.030.966). Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1,1 jt Peserta KB kelompok usaha ekonomi produktif) sebesar 190.797, sedangkan persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB sebesar 88,92 persen. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan KB telah diupayakan frekuensi pelayanan KB *mobile* di wilayah khusus di 33 provinsi sebanyak enam kali dalam setahun.

Peningkatan jumlah peserta KB menemui hambatan pada saat pemakaian kontrasepsi (CPR) telah mencapai di atas 50 persen. Upaya peningkatan kesertaan ber-KB masih terkendala oleh tantangan geografis, karena pasangan usia subur (PUS) yang belum ber-KB pada umumnya adalah kelompok-kelompok sulit yang tersebar. Berbagai upaya pembinaan yang lebih intensif dan inovatif kepada para kelompok masyarakat miskin dan rentan lainnya telah dilakukan melalui pemberian alat dan kontrasepsi gratis bagi para peserta KB miskin, dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan (poktan) di tingkat akar rumput, dengan menyediakan akses terhadap sumber permodalan.

Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 mengenai capaian pemakaian alat dan obat kontrasepsi (alokon)/CPR, masih ditemukan kesenjangan antar tingkat kesejahteraan. CPR kelompok miskin sebesar 53,0 persen sedangkan CPR pada kelompok kaya sebesar 63,5 persen. Begitu pula dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*). *Unmetneed* pada kelompok miskin adalah sebesar 12,7 persen sedangkan *unmetneed* pada kelompok kaya hanya sebesar 8,2 persen.

**Program
Perlindungan
Tenaga Kerja
dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan
(Peningkatan
Perlindungan
Pekerja
Perempuan dan
Penghapusan
Pekerja Anak)**

Dengan berbagai alasan yang utamanya adalah kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, seorang anak seringkali terpaksa meninggalkan bangku sekolah yang sesungguhnya merupakan hak mereka dan masuk ke pasar kerja. Bahkan, sebagian dari anak-anak yang bekerja tersebut bekerja di lapangan kerja yang terburuk untuk anak, seperti perbudakan, pelacuran dan pornografi, produksi dan perdagangan minuman keras dan narkoba, dan/atau pekerjaan lain yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pada tahun 2009, BPS memperkirakan bahwa terdapat sekitar 4 juta anak yang bekerja. Dari jumlah tersebut, terdapat hampir 2 juta anak yang bekerja dan tidak bersekolah. Pada umumnya anak-anak yang bekerja tersebut berasal dari rumah tangga miskin yang tidak mempunyai pilihan untuk meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke sekolah. Oleh karena itu, sejalan dengan Program PKH yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan anak dari rumah tangga miskin untuk tetap bersekolah, Pemerintah mengimplementasikan Program Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dengan tujuan untuk menarik pekerja anak dari pekerjaannya dan mengembalikannya ke satuan pendidikan atau membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.

Program Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) telah dilaksanakan pada tahun 2008, 2010, dan 2011. Program akan terus dilaksanakan sampai tahun 2014 sejalan dengan pelaksanaan Program PKH. Pada tahun 2008, sasaran program adalah 4.945 pekerja anak di 48 kabupaten/kota di 7 provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya 4.853 anak (98,1 persen) yang mendapat rekomendasi untuk difasilitasi ke dunia pendidikan dan dari jumlah anak yang direkomendasi tersebut, hanya 1.523 anak (31,4 persen) yang berhasil difasilitasi.

Pada tahun 2010, sasaran Program PPA-PKH mencakup pekerja anak dalam RTSM yang menjadi sasaran PKH di 50 kabupaten/kota di 13 provinsi, dengan kuota 3.000 orang anak.

Dari sasaran 3.000 orang, sebanyak 2.991 pekerja anak atau 99,7 persen mendapat pendampingan. Dari 2.991 pekerja anak, 73,8 persen telah difasilitasi untuk kembali ke dunia pendidikan, baik pendidikan kesetaraan, pendidikan formal, dan pelatihan keterampilan/kursus. Untuk tahun 2011 sasaran pekerja anak adalah sebanyak 3.360 orang di 56 kabupaten/kota di 15 provinsi. Dari jumlah tersebut, 3.271 anak (90,2 persen) berhasil difasilitasi ke dunia pendidikan, yang sebagian besar masuk ke pendidikan kesetaraan dan pendidikan formal.

Kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah koordinasi antara kementerian pelaksana penarikan pekerja anak dengan kementerian/lembaga atau institusi yang memberikan layanan pendidikan formal dan non-formal dan pelatihan keterampilan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan pekerja anak yang telah ditarik dari pekerjaannya dapat bersekolah atau memperoleh pelatihan keterampilan sesuai keinginannya.

Sejalan dengan waktu, koordinasi telah berjalan semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase pekerja anak yang berhasil difasilitasi ke dunia pendidikan. Kementerian Agama mendukung dengan Program Pendidikan Terpadu Anak Harapan, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan lembaga pendidikan formal dan paket-paket pendidikan kesetaraan untuk pekerja anak yang telah ditarik. Selain itu, Kemendikbud juga menyediakan subsidi siswa miskin untuk memastikan anak yang telah kembali ke sekolah tidak kembali putus sekolah karena tidak adanya biaya.

**Program
Rehabilitasi
Sosial (Anak,
Lanjut Usia, dan
Orang dengan
Kecacatan)**

Program rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tiga konsentrasi utama, yaitu rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, pelayanan sosial lanjut usia, dan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan. Kementerian Sosial telah melaksanakan ujicoba Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bersama *stakeholder* terkait sejak tahun 2009. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) diluncurkan dalam rangka merespon permasalahan anak yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembang yang sehat dan berada di luar pengasuhan keluarga. Program ini dikemas dengan paket bantuan untuk mencegah anak putus sekolah, proses advokasi dan bantuan hukum, pemenuhan gizi anak, penguatan keluarga dan kelembagaan yang bergerak dalam penanganan masalah anak.

Sasaran PKSA adalah balita telantar, anak jalanan/telantar, anak dengan kecacatan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Masing-masing sasaran mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga program

disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing sasaran. Bantuan sosial PKSA berbentuk tabungan tunai bersyarat dan diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Dalam pelaksanaan PKSA, berbagai tantangan dan peluang telah diraih, termasuk pendayagunaan potensi dan sumber dari masyarakat. Pada tahun 2010, jumlah sasaran PKSA adalah sebanyak 147.321 anak, yang terdiri dari 1.405 balita telantar, 141.187 anak telantar dan anak jalanan, 430 anak berhadapan dengan hukum, 2.258 anak dengan kecacatan, serta 2.041 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pada tahun 2011, jumlah sasaran PKSA meningkat menjadi 160.485 anak. Perincian sasaran PKSA pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. PKS-Anak Balita

Jumlah penerima PKS-Anak Balita sebanyak 6.275 anak balita telantar. Dalam pelaksanaannya, PKS-Anak Balita melibatkan 53 Tempat Penitipan Anak (TPA)/ Taman Balita Sejahtera (TBS)/TAS (Taman Anak Sejahtera) dan 54 pekerja sosial.

2. PKS-Anak Telantar

Jumlah penerima PKS-Anak Telantar yaitu 135.685 anak. Kegiatan ini melibatkan 5.800 Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) dan 90 pekerja sosial.

3. PKS-Anak Jalanan

Jumlah penerima PKS-Anak Jalanan sebanyak 4.827 anak. Kegiatan ini melibatkan 36 rumah singgah/yayasan dan 83 pekerja sosial.

4. PKS-Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Jumlah penerima PKS-ABH adalah 480 anak. Kegiatan ini melibatkan lima Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial-Anak Berhadapan dengan Hukum (KPRS-ABH) dan 27 pekerja sosial.

5. PKS-Anak dengan Kecacatan

Jumlah penerima PKS-Anak dengan Kecacatan sebanyak 1.720 anak. Kegiatan ini melibatkan sembilan Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK), satu yayasan, serta 20 pekerja sosial.

6. PKS-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)

Jumlah penerima PKS-AMPK yakni sebanyak 1.150 anak. Kegiatan ini melibatkan 8 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), sepuluh Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta 35 pekerja sosial.

Para penerima manfaat PKSA didampingi oleh pekerja sosial. Jumlah pendamping sosial PKSA atau pekerja sosial yang terlatih di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak telah mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Pada tahun 2009 jumlah pendamping sosial PKSA hanya sebanyak 80 orang sedangkan pada tahun 2010 jumlah pendamping sosial meningkat menjadi 228 orang. Pada tahun 2011, pendamping sosial PKSA akan ditambah menjadi 319 orang.

Pelaksanaan PKSA turut melibatkan Pemerintah Daerah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik nasional maupun internasional, dunia usaha, lembaga donor, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 semakin banyak Pemerintah Daerah yang bermitra dan berkontribusi dalam pelaksanaan PKSA melalui alokasi APBD.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak yaitu:

1. Metode pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial anak belum benar (masih berorientasi pada institusi/panti, metode pemberian bantuan tunai yang kurang tepat)
2. Cakupan bantuan dan layanan sangat kecil.
3. Proses penargetan yang belum baik. Belum tersedianya data target penerima manfaat terutama anak-anak marjinal yang orangtuanya tidak tercatat dalam sistem registrasi penduduk dan tidak dijadikan sasaran pendataan BPS dalam berbagai mekanisme pendataan nasional. Oleh karena itu, PKSA juga mengoptimalkan peran pekerja sosial untuk memverifikasi data.
4. Akses anak dan balita telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus terhadap layanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, tempat tinggal yang layak, air bersih, makanan yang bergizi, dan sebagainya) masih dihadapkan pada kendala administrasi kependudukan, birokrasi yang rumit, mekanisme yang kurang dipahami, dan hambatan lainnya.
5. Belum adanya kesamaan perspektif diantara lembaga/yayasan anak mengenai PKSA sebagai program peningkatan kesejahteraan sosial anak berbasis keluarga dan komunitas.

6. Masih lemahnya sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, UPT (Unit Pelayanan Terpadu), Unicef, dan LSM Internasional dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial lanjut usia pada tahun 2010 dilakukan melalui: (i) Ujicoba Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) telantar. Jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar diberikan kepada lanjut usia yang telah berusia 60 tahun ke atas agar mereka dapat memelihara taraf kesejahteraan sosial. Bantuan diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 300.000/bulan/penerima. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan dana kematian; (ii) Pelayanan dan perlindungan kedaruratan; (iii) Bantuan sosial lanjut usia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial; (iv) Peningkatan ketrampilan lanjut usia potensial; (v) Pengembangan uji coba dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Beberapa pencapaian pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia tahun 2010 lebih banyak menyangkut uji coba program. Beberapa uji coba tersebut berikut sasarannya adalah: (i) Jaminan Sosial Lanjut usia dengan sasaran 10.000 orang lanjut usia terlantar; (ii) Uji Coba Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia dengan menyasar 250 orang lanjut usia miskin; (iii) Uji Coba Pelayanan Harian Lanjut Usia telah dilaksanakan dengan sasaran 200 orang lanjut usia; (iv) Uji Coba Trauma Center Lanjut Usia dengan sasaran 50 orang lanjut usia; (v) Peningkatan ketrampilan lanjut usia potensial dengan sasaran 40 orang lanjut usia; (vi) Bantuan sosial lanjut usia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan jumlah sasaran 8.000 orang lanjut usia; (vii) Pelayanan kedaruratan dengan sasaran 80 orang lanjut usia; (viii) Pengembangan uji coba program yang dilakukan melalui dana dekonsentrasi sebanyak 815 orang lanjut usia dan pemberian bantuan pengembangan usaha dengan sasaran 2.681 orang lanjut usia; (ix) Pelayanan sosial lanjut usia yang dilakukan melalui Panti Sosial Tresna Werdha adalah 211 orang lanjut usia. Jumlah capaian sasaran pelayanan sosial lanjut usia secara keseluruhan tahun 2010 berjumlah 22.327 orang lanjut usia.

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia ditemukan beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:

1. Metode pelaksanaan pelayanan sosial pada lansia potensial masih perlu dikembangkan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih atau menguasai permasalahan lanjut usia dan proses penanganannya secara professional terutama dalam pelaksanaan program uji coba di daerah.
3. Jangkauan pelayanan yang sangat terbatas karena jumlah sasaran pelayanan tersebar sampai ke desa terpencil serta jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penerima pelayanan.
4. Komitmen Pemerintah daerah masih sangat rendah dalam hal penanganan lanjut usia terbukti dengan belum semua daerah mempunyai peraturan daerah dalam mendukung pelayanan sosial lanjut usia, dan
5. Terbatasnya data yang akurat dari masing-masing provinsi.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan dilaksanakan melalui komponen kegiatan: (i) Pemberian Jaminan Sosial bagi Orang dengan Kecacatan (JSODK) Berat. Jaminan sosial penyandang cacat berat diberikan kepada penyandang cacat yang kecacatannya tidak dapat lagi direhabilitasi dan dalam aktivitas kesehariannya tergantung bantuan orang lain. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp 300.000 per bulan. Pemanfaatan jaminan sosial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup permakanaan, peningkatan gizi, sandang, air bersih dan keperluan sehari-hari; (ii) Pemberian Bantuan Tambahan Pemenuhan Dasar bagi Orang dengan Kecacatan di dalam Panti/ Bantuan Sosial Orang dengan Kecacatan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial; (iii) Uji Coba Pemberdayaan Orang dengan Kecacatan Eks-Kusta; iv) Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan di dalam Panti dan di luar Panti.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan adalah sebagai berikut: (i) Pemberian bantuan sosial kepada 19.500 orang dengan kecacatan berat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (ii) Pemberian bantuan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial kepada 13.500 orang dengan kecacatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; (iii) Pelatihan ketrampilan untuk 40 orang dengan kecacatan eks-kusta sesuai dengan potensi masing-masing; (iv) Terselenggaranya rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan melalui proses layanan di dalam panti dan di luar panti.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan antara lain adalah: (i) Metode pelaksanaan pelayanan sosial pada penyandang cacat yang

masih belum sempurna; (ii) Pendataan penyandang cacat yang masih sulit dilakukan; dan (iii) Cakupan bantuan dan layanan sangat kecil. Beberapa hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan yaitu masih terbatasnya organisasi sosial (orsos) yang menangani orang dengan kecacatan eks-kusta, sehingga sulit menemukan orsos untuk bekerja sama dalam penggalan potensi orang dengan kecacatan eks kusta sekaligus memberikan motivasi dan pendampingan odh eks kusta. Di samping itu, terbatasnya anggaran *safeguarding* untuk membiayai sosialisasi dan uji petik ke lapangan membuat pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara global. Hal ini menyebabkan informasi yang diberikan tidak dapat diterima dengan optimal.

2.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat (Klaster 2)

Cakupan Klaster 2

Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing, mulai tahun 2007 pemerintah mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam satu payung kebijakan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam perkembangannya, komponen program dalam PNPM Mandiri bertambah, dan dapat dikelompokkan dalam program-program Inti dan Penguatan sebagai berikut:

- a. Program-program inti PNPM Mandiri, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan berdasarkan pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik kewilayahan terdiri atas: (a) PNPM Perdesaan, (b) PNPM Perkotaan, (c) PNPM Infrastruktur Perdesaan (RIS/PPIP), (d) PNPM Sosial-Ekonomi Wilayah (PISEW), dan (e) PNPM Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Pada tahun 2011 cakupan pelaksanaan program-program inti ini adalah di seluruh 6.623 kecamatan di Indonesia.
- b. PNPM Mandiri juga didukung oleh program-program yang berfokus untuk pencapaian target sektor tertentu, yaitu:
 - i. PNPM Generasi untuk mempercepat target pencapaian MDGs khususnya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2011 dilaksanakan di 290 kecamatan pada 39 kabupaten dan 8 provinsi.
 - ii. PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal, dan pada tahun 2011 dilaksanakan

melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 120 kabupaten. Sebagai catatan, pada tahun 2012 PNPM-KP menjadi bagian dari Klaster IV-Program-program Pro Rakyat.

- iii. PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang ditujukan untuk pengembangan usaha agribisnis melalui bantuan stimulan dan fasilitasi kepada gabungan kelompok petani (Gapoktan) di setiap desa. Hingga tahun 2011, bantuan telah diberikan kepada gapoktan di 39.013 desa.
- iv. PNPM Pariwisata dengan tujuan memperluas kesempatan berusaha dan mengembangkan kapasitas masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. Pada tahun 2011 telah dikembangkan di 569 desa pada 248 kabupaten/kota.
- v. PNPM Sanimas yang bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana air limbah permukiman masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2011 Sanimas akan mensasar 38 kabupaten/kota.

Perkembangan Kegiatan- kegiatan di Klaster 2

Melalui PNPM Mandiri, telah dikembangkan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan sistem pembangunan partisipatif. Selain konsultan dan pendamping masyarakat atau fasilitator, kelembagaan masyarakat dan penduduk setempat/lokal juga turut meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai tahap kegiatan PNPM Mandiri dan lembaga seperti antara lain Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan maupun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa dan kelurahan. Lembaga pengelola kegiatan dan aset masyarakat tersebut dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui forum di tingkat kecamatan/desa/kelurahan. Perkembangan jumlah kelembagaan masyarakat hingga tahun 2011 baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

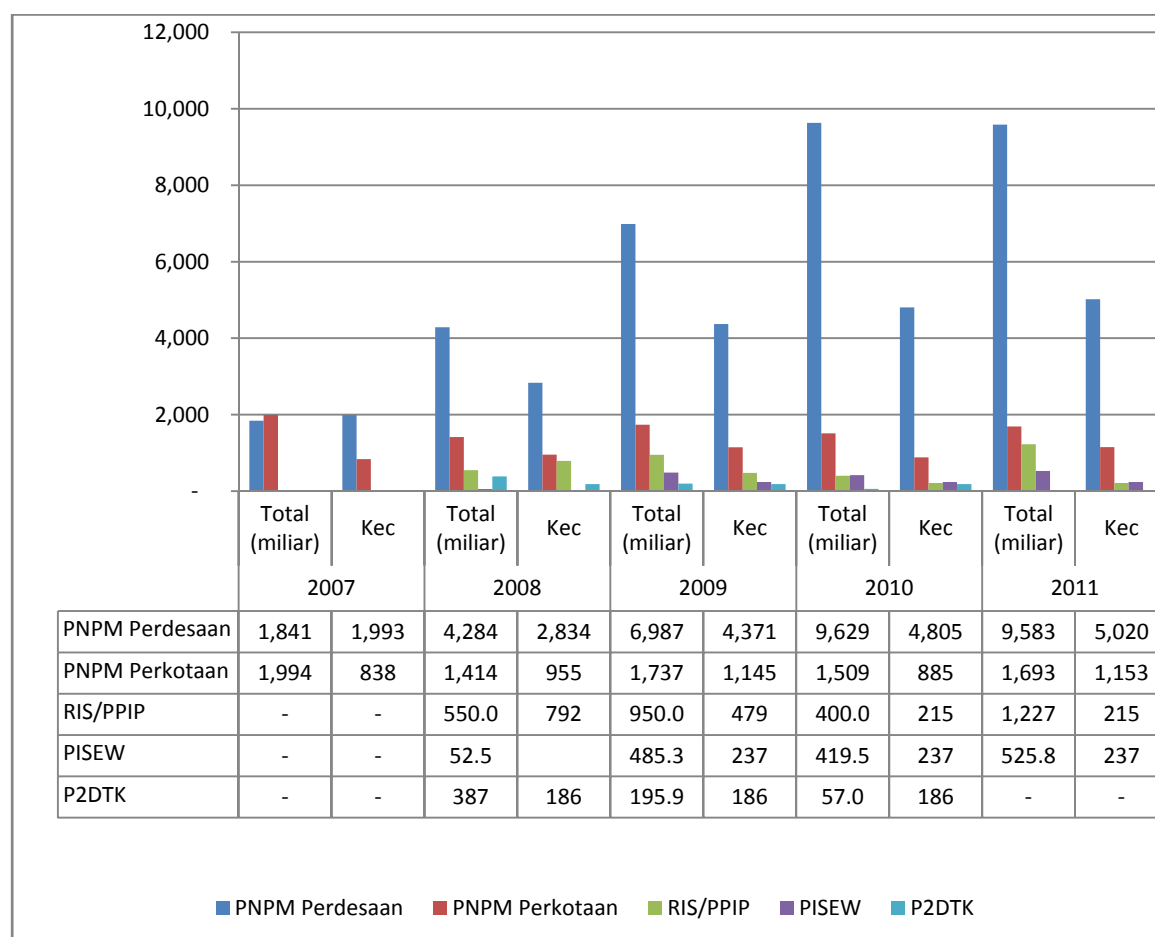
Tabel10.
Jumlah Kelembagaan Masyarakat PNPM Mandiri

Program	Jumlah Kelembagaan	Keterangan/unit
PNPM Perdesaan	5.020	Unit Pengola Kegiatan di Kecamatan
PNPM Perkotaan	224.574	Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan
PISEW	29.377	Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa
P2DTK	11.362	Lembaga Sosial Kemasyarakatan di Desa

Sumber: SIMPADU PNPM Mandiri

Melalui PNPM Mandiri, dialokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang umumnya bersifat stimulan dan *open menu* untuk mendanai berbagai kebutuhan masyarakat. Perkembangan BLM per komponen program inti PNPM Mandiri dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 8 di bawah ini.

Gambar 8.
Perkembangan besaran BLM PNPM Mandiri dan Jumlah Kecamatan, 2007-2011

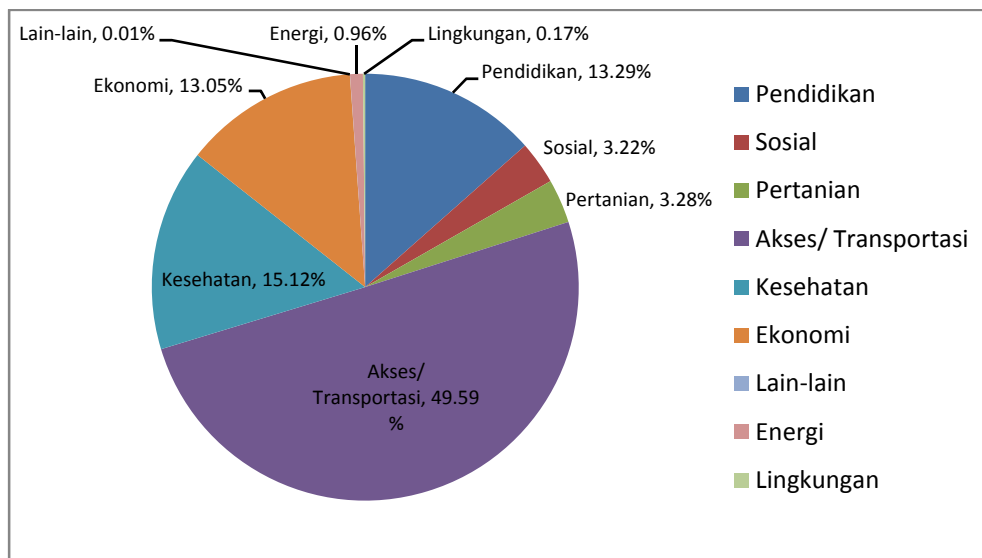


Sumber: SIMPADU PNPM Mandiri

Pemanfaatan BLM oleh masyarakat secara umum adalah untuk: (i) infrastruktur fisik; (ii) kegiatan sosial; dan (iii) kegiatan ekonomi. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri sejak tahun 2007, penggunaan BLM sebagian besar adalah untuk infrastruktur transportasi (49,6 persen), kesehatan (15,1 persen), pendidikan (13,3 persen), ekonomi (13 persen).

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 9, kegiatan yang diprioritaskan masyarakat umumnya berupa pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana dasar skala kecil seperti jalan, jembatan, irigasi, tambatan perahu, fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Polindes dan Posyandu beserta kegiatannya, bantuan seragam, biaya transportasi, menggaji guru bantu, pelatihan keterampilan ibu-ibu dan pemuda, serta dana perguliran kelompok yang umumnya digunakan untuk mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari, menyekolahkan anak, dan usaha mikro.

Gambar 9.
Realisasi BLM PNPM Mandiri 2007-2011



Sumber: SIMPADU PNPM Mandiri

Melalui berbagai kegiatan masyarakat di atas, PNPM Mandiri telah berkontribusi dalam penyediaan kesempatan kerja tidak saja untuk masyarakat, tetapi juga termasuk tenaga kerja terdidik untuk pengelolaan PNPM Mandiri hingga ke tingkat desa/kelurahan. Hingga saat ini, PNPM Mandiri tercatat telah mempekerjakan lebih dari 26 ribu konsultan dan pendamping masyarakat dan lebih dari 16 juta orang masyarakat. Gambaran

umum tenaga pendamping, kosultan dan tenaga kerja yang telah disediakan melalui PNPM Mandiri dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11.
Jumlah Fasilitator/Konsultan dan Tenaga Kerja Melalui PNPM Mandiri

NNo.	Program	Jumlah Fasilitator/Konsultan	Jumlah Tenaga Kerja
1.	PNPM Perkotaan	11.940	851.148
2.	PNPM Perdesaan	12.768	15.331.850
3.	PNPM PISEW	598	244.254
4.	PNPM RIS/PIIP	1.050	tidak ada data
5.	PNPM DTK	363	tidak ada data
Total		26.356	16.427.252

Sumber: SIMPADU PNPM Mandiri

Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Klaster 2

Dalam perkembangan pelaksanaannya, beberapa studi evaluasi menunjukkan bahwa PNPM mandiri telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengorganisir dan mengelola pembangunan secara partisipatif, terciptanya lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi masyarakat miskin yang umumnya tidak terlatih (*unskilled*), dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin sebagai stimulant bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, beberapa studi evaluasi juga menunjukkan beberapa kelemahan dan kendala dari pelaksanaan PNPM Mandiri yang cukup mengemuka, seperti antara lain:

1. Dampak positif PNPM Mandiri terhadap peningkatan konsumsi, akses kesehatan dan pendidikan, dan kesempatan kerja tidak terlalu signifikan dirasakan pada kecamatan yang tidak miskin.
2. PNPM Mandiri juga belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin, terutama kelompok terpinggirkan seperti misalnya rumah tangga yang dikepalai perempuan atau hanya berpendidikan dasar.
3. BLM yang diberikan kepada masyarakat belum dapat menciptakan kesempatan kerja dan menumbuhkan ekonomi produktif yang berkelanjutan karena kegiatan masyarakat melalui PNPM Mandiri seringkali hanya untuk jangka waktu tertentu, melengkapi kegiatan masyarakat yang telah ada.
4. Sejalan dengan berkembangnya kesejahteraan masyarakat dan pembelajaran dari penanganan dampak krisis, terdapat adanya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan

kegiatan ekonomi produktif yang menjamin keberlanjutan pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat. Untuk itu, keterkaitan berbagai upaya pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan perlu didukung oleh pemerintah daerah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin.

5. Terkait pengelolaan program, terdapat permasalahan pengadaan dan pengembangan kompetensi dan profesi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang selama ini merupakan ujung tombak pelaksanaan PNPM Mandiri. Selain itu, masih diperlukan perbaikan terhadap penanganan pengaduan masyarakat dan pengembangan sistem informasi dan data yang handal dalam mendukung supervisi, monitoring, dan evaluasi program yang telah mencakup seluruh kecamatan, terutama hingga daerah-daerah terpencil dan terisolir.
6. Berkembangnya Kelompok Simpan Pinjam melalui PNPM Mandiri, masih perlu disertai oleh peningkatan kapasitas teknis pengelolaan lembaga keuangan mikro yang profesional dan dasar lembaga yang mendukung pengembangannya lebih lanjut. Upaya ini perlu dilakukan untuk menjembatani pembinaan usaha mikro masyarakat sebelum mereka dapat memanfaatkan program KUR dan kredit lainnya.

Beberapa temuan studi dan evaluasi, baik positif maupun negatif, di atas perlu mendapatkan perhatian bagi perbaikan desain dan pelaksanaan program ke depan.

2.2.3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Klaster 3)

Cakupan Klaster 3

Pemerintah memfasilitasi rakyat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih memerlukan bantuan untuk akses permodalan, stabilitas tingkat pendapatan, dan peningkatan kesejahteraannya melalui pemberdayaan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Fasilitasi pemerintah tersebut dituangkan dalam program-program yang terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mendukung prioritas nasional Penanggulangan Kemiskinan, dan menjadi program-program utama yang mengisi strategi pada Klaster 3 penanggulangan kemiskinan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, program-program pada Klaster 3 tersebut dicakup dalam 2 fokus prioritas, yaitu (1) peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif; dan (2) peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Program-program dalam kedua fokus prioritas tersebut yaitu (1) program penempatan modal negara

dalam rangka mendukung program KUR; (2) program koordinasi kebijakan bidang perekonomian; dan (3) program pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ketiga program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa kegiatan, baik yang terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kegiatan-kegiatan non KUR. Cakupan dari kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya penempatan modal negara dalam rangka mendukung Program KUR, koordinasi kebijakan program KUR, penyediaan berbagai dukungan akses ke sumber permodalan, perluasan sumber-sumber pembiayaan bagi UMKM dan koperasi, sosialisasi KUR dan pendampingan bagi calon debitur KUR, pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi dan UMKM, dukungan pengembangan sarana usaha pemasaran, penerapan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu, peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, pemasyarakatan dan penyuluhan perkoperasian melalui gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP), serta penguatan lembaga Koperasi Simpan Pinjam-Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Mikro (KSP-KJKS/LKM). Fokus dari kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan pada fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil.

Perkembangan Kegiatan- kegiatan di Klaster 3

Secara umum, perkembangan populasi UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2010 sudah mencapai lebih dari 53,8 juta unit, dengan proporsi usaha mikro dan kecil (UMK) mencapai 99,91 persen. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto Nasional pada tahun yang sama sudah mencapai sekitar 57,8 persen, sedangkan proporsi tenaga kerja di UMKM telah mencapai 97,2 persen dari total kerja di Indonesia (BPS, Kementerian Koperasi dan UKM, 2011). Sementara itu perkembangan koperasi menunjukkan bahwa jumlah koperasi pada tahun 2010 telah mencapai 177.482 unit, dengan jumlah anggota sebesar 30.461.121 orang. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi sampai dengan Desember 2010 tercatat sebanyak 358.768 orang.

Khusus berkaitan dengan program KUR, penyalurannya saat ini terus mengalami peningkatan, baik dalam volume kredit maupun jumlah debitur. Penyaluran KUR sejak tahun 2007 sampai tanggal 31 Desember 2011 telah mencapai Rp 63,42 triliun untuk lebih dari 5,72 juta debitur. Rata-rata pembiayaannya mencapai Rp 11,08 juta per debitur. Pada tahun 2011 KUR telah disalurkan lebih dari Rp 29,00 triliun, yang berarti telah melampaui target penyaluran KUR pada tahun 2011 sebesar Rp 20 triliun. Jumlah debitur KUR pada tahun 2011 mencapai 1.909.912 debitur, dengan rata-rata KUR yang diterima per debitur yaitu sebesar Rp 15,19 juta (lihat tabel 12).

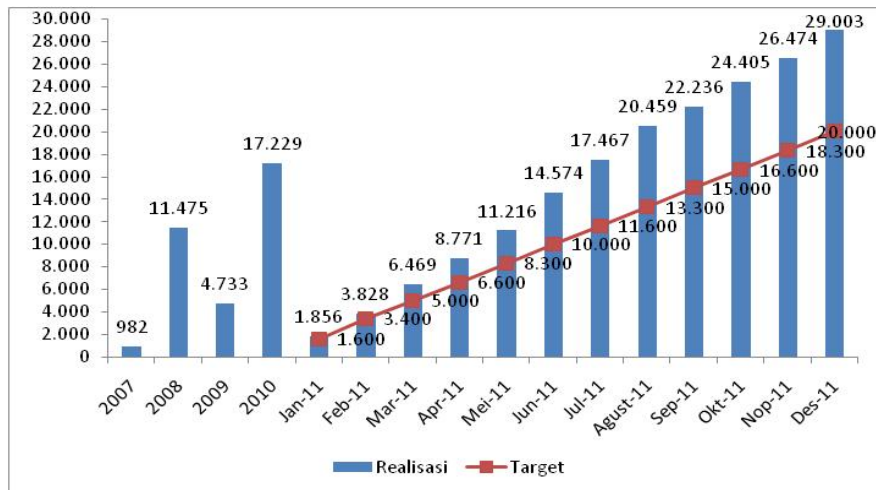
Tabel 12.
Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2011

Indikator	Periode 2007-2011		Tahun 2011 (1 Januari s/d 31 Desember 2011)	
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)
Volume	Rp 63,42 triliun		Rp 29,00 triliun	
6 Bank Umum	Rp 57,51 triliun	90,68	Rp 25,31 triliun	87,25
13 BPD	Rp 5,91 triliun	9,32	Rp 3,69 triliun	12,75
Debitur	5.722.470 debitur		1.861.378 debitur	
6 Bank Umum	5.647.704 debitur	98,69	1.861.378 debitur	97,46
13 BPD	74.766 debitur	1,31	48.534 debitur	2,54
Rata-rata kredit per debitur	Rp 11,08 juta		Rp 15,19 juta	
6 Bank Umum	Rp 10,18 juta		Rp 13,60 juta	
13 BPD	Rp 79,03 juta		Rp 76,18 juta	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011)

Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan *non performing loan* (NPL) hanya sebesar 2,10 persen. Secara umum, penyaluran KUR terus berada di atas target dan pencapaian ini selalu membaik setiap tahun (lihat gambar 10).

Gambar 10.
Realisasi Penyaluran KUR Tahun 2011
(1 Januari – 31 Desember 2011)



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011)

Berdasarkan sektor, penyaluran KUR terbesar diterima UMKM di wilayah Jawa dan Sumatera. Sebagian besar KUR disalurkan untuk UMKM dalam sektor perdagangan, baik perdagangan

besar maupun eceran, serta pertanian, perburuan dan kehutanan (lihat tabel 13).

Tabel 13.
Realisasi Penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2011

No.	Sektor Ekonomi	Proporsi (Persen)	
		Plafon	Debitur
1	Pertanian	17,02	13,50
	Pertanian, perburuan dan kehutanan	15,87	13,39
	Perikanan	1,14	0,11
2	Pertambangan	0,07	0,01
3	Industri Pengolahan	2,50	1,40
4	Listrik, Gas & Air	0,04	0,01
5	Konstruksi	1,95	0,11
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	61,01	72,33
	Perdagangan besar dan eceran	60,51	72,06
	Penyediaan akomodasi dan penyediaan mamin	0,50	0,27
7	Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi	0,96	0,24
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	3,81	1,60
	Perantara keuangan	0,87	0,03
	Real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan	2,94	1,56
9	Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat	2,28	1,47
10	Lain-lain	10,36	9,34

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2011)

Selain melalui KUR, perkuatan modal usaha mikro juga dilakukan melalui bantuan dana kepada 1.370 koperasi perdesaan dan perkotaan dengan nilai sebesar Rp 68,5 milyar. Bantuan dana tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas koperasi untuk memfasilitasi kebutuhan modal dari anggotanya yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan memiliki usaha yang belum *feasible* dan belum *bankable*. Di samping itu, mulai tahun 2011 bantuan modal juga diberikan kepada wirausaha pemula yang rata-rata adalah kaum muda yang terdidik yang belum tertampung oleh lapangan kerja. Bantuan modal kerja diberikan ke masing-masing wirausaha pemula sebesar Rp. 10 - 25 juta. Dukungan bagi usaha mikro dan kecil untuk mengakses sumber-sumber permodalan lainnya juga diberikan dalam bentuk (1) fasilitasi akses usaha mikro dan kecil ke Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pengusaha-pengusaha swasta; (2) pengembangan *linkage* program antara bank umum dan koperasi; dan (3) fasilitasi kerja sama antara koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan lembaga amal zakat nasional termasuk wakaf dalam rangka optimalisasi zakat dan wakaf untuk meningkatkan akses pembiayaan (modal awal usaha) bagi usaha mikro dan kecil. Upaya-upaya penguatan lembaga

pembiayaan bagi UMKM juga terus dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, kapasitas dan jangkauan layanan keuangan mikro bagi UMKM. Salah satu contohnya yaitu melalui sosialisasi badan hukum koperasi sebagai bentuk legalitas usaha bagi lembaga keuangan mikro (LKM) sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM dan Gubernur Bank Indonesia. Hasil yang dicapai yaitu sekitar 2.100 (60 persen) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan 40 persen KUBE sekarang sudah berbadan hukum koperasi. Untuk memberi kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai pelosok wilayah, saat ini pemerintah juga mendorong pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah (PPKD). Saat ini telah terbentuk 2 PPKD yaitu di Jawa Timur dan Bali, yang pada tahun 2012 mulai akan dilibatkan dalam penjaminan KUR. Bagi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang usahanya belum *feasible* dan *bankable*, pemerintah juga menyediakan kredit dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Kredit dana bergulir ini disediakan dengan syarat dan proses yang sederhana dan bunga yang terjangkau. Dalam tahun 2011, LPDB-KUMKM merencanakan menyalurkan dana sebesar Rp. 1,25 triliun kepada 126.400 UKM melalui 463 Koperasi dan 42 Lembaga untuk Koperasi.

Terkait dengan pengenalan teknologi tepat guna bagi usaha mikro, pada tahun 2011 telah dilakukan rintisan penerapan teknologi tepat guna untuk perkuatan kelembagaan koperasi garam dan peningkatan produktivitas dan mutu garam dalam rangka mendukung Program Pengembangan Usaha Garam Nasional (PUGAR) di 6 koperasi di 6 provinsi. Perbaikan akses pemasaran juga diupayakan pemerintah untuk membantu usaha mikro dan kecil di daerah tertinggal dan perbatasan melalui revitalisasi dua pasar tradisional di daerah tertinggal (Kahyong Utara, Kalimantan Barat dan Lombok Tengah, NTB) dan empat pasar di daerah bencana (Magelang dan Sleman, DIY; Mentawai Sumatera Barat; dan Wandoman Papua).

Sementara itu dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi usaha mikro dan kecil, pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi lebih dari 4.000 orang SDM koperasi dan UMKM yang meliputi diklat pembudayaan kewirusahaan bagi kelompok masyarakat marginal, diklat keterampilan teknis, dan diklat manajerial. Capacity Building Penguatan perkoperasian bagi aparat pembina koperasi di Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 1.056 orang. Capacity Building Perkoperasian dimaksudkan

untuk meningkatkan kemampuan dan output pembina koperasi. SDM ini juga disertai dengan peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk berorganisasi, terutama melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) yang mulai diluncurkan pada tahun 2010. GEMASKOP memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk berkoperasi, dan berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang ada.

**Permasalahan
dan Hambatan
dalam
Pelaksanaan
Klaster 3**

Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam Klaster 3 penanggulangan kemiskinan. Kinerja penyaluran KUR pada tahun 2011 sebenarnya telah melampaui target, namun jangkauan KUR masih sangat terbatas sehingga masih banyak koperasi dan UMKM yang masih belum bisa mengakses KUR. Selain itu, pelaksanaan program KUR masih menghadapi beberapa permasalahan seperti (1) persepsi bank mengenai resiko usaha pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kecil yang tinggi masih menjadi penghambat dalam penilaian kelayakan usaha di sektor-sektor produktif; (2) penerapan kebijakan KUR yang belum konsisten di tingkat pelaksana di lapangan; (3) keterbatasan jangkauan bank pelaksana dalam penyaluran KUR; (4) kurangnya sosialisasi kepada calon debitur KUR; (5) kurangnya koordinasi antara dinas teknis dan cabang bank setempat; (6) pendampingan calon debitur di daerah belum optimal; dan (7) masih rendahnya tindak lanjut bank pelaksana terhadap calon-calon debitur KUR potensial yang telah diidentifikasi oleh kementerian teknis.

Beberapa permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Klaster 3 secara umum yaitu kurangnya efektivitas pelaksanaan kegiatan yang disebabkan keterbatasan kapasitas aparat pembina, dan kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan terutama mengingat keragaman sektor dan lokasi usaha koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi permasalahan seperti kurangnya kesempatan usaha, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan perkembangan kegiatan ekonomi produktif di daerah belum mampu mendorong peningkatan pendapatan yang berkelanjutan yang dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut juga menghadapi permasalahan-permasalahan khusus seperti:

1. Kurang optimalnya layanan lembaga keuangan bukan bank, serta skim atau bantuan pendanaan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil.
2. Kurangnya sosialisasi peluang akses kredit/pembiayaan bank melalui *linkage*, serta informasi mengenai lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.
3. Masih rendahnya kemauan UMKM untuk memanfaatkan jasa pendampingan keuangan.
4. Terbatasnya data-data usaha mikro dan kecil (UMK) yang memanfaatkan sertifikasi hak atas tanah (SHAT) untuk mengakses pembiayaan belum ada.
5. Terbatasnya jangkauan dan cakupan sosialisasi KUR, serta rendahnya kesiapan koperasi dan UMKM di sektor hulu dan industri kecil untuk mengakses KUR.
6. Kurangnya pemahaman, motivasi dan kapasitas UMKM untuk berwirausaha.
7. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pemasaran, khususnya bagi koperasi dan UMKM di daerah tertinggal/perbatasan.
8. Kurangnya kesadaran dan kapasitas koperasi dan UMKM untuk menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna.
9. Belum adanya skema peningkatan kelembagaan koperasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
10. Masih rendahnya penerapan praktik berkoperasi seperti yang ditunjukkan dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan manfaat koperasi.
11. Keterbatasan jumlah pembina di daerah dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian, keterbatasan dana penyuluhan, serta seringnya mutasi pejabat yang menangani koperasi sehingga pemasyarakatan, pendampingan, penyuluhan dan pembinaan perkoperasian terputus.
12. Rendahnya pemahaman LKM untuk mau berkoperasi yang sebenarnya merupakan pilihan bentuk kelembagaan yang memungkinkan LKM untuk menjadi lembaga pembiayaan yang akuntabel; dan
13. Keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM.

2.2.4 Program-Program Pro-Rakyat (Klaster 4)

Cakupan Klaster 4

Untuk meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan yang afirmatif, dengan penegasan fokus keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan, dilakukan peningkatan dan perluasan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program-program ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut dituangkan kedalam Klaster 4 program pro-rakyat. Klaster 4 dilakukan melalui 6 program, yaitu: (1) pembangunan rumah murah dan sangat murah; (2) penyediaan angkutan umum murah; (3) penyediaan air bersih untuk rakyat; (4) penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau; (5) peningkatan kehidupan nelayan, dan; (6) peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Pembangunan rumah sangat murah bagi masyarakat miskin ditujukan untuk memfasilitasi dan menstimulasi pembangunan rumah melalui PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman. Sedangkan fasilitasi pembangunan rumah murah dilakukan melalui pembangunan PSU Kawasan dan bantuan pembiayaan perumahan melalui Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penyediaan rumah sangat murah dilakukan sedapat mungkin berbasis keswadayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan melalui lembaga keswadayaan masyarakat serta ditujukan untuk masyarakat nelayan, masyarakat daerah tertinggal, dan masyarakat miskin perkotaan yang termarjinalkan.

Penyediaan angkutan umum murah yang diutamakan untuk daerah perdesaan dilakukan melalui (a) pengembangan mobil perdesaan dengan daya mesin 650 cc dimulai dengan ujicoba produksi dan segitiga klaster industri tahun 2011 dan produksi awal serta perluasan segitiga klaster industri tahun 2012; dan (b) pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat hemat energi, ramah lingkungan, dan harga terjangkau (*low cost and green car/LCGC*) dengan dukungan kebijakan yang mendorong produksi dalam negeri dan kebijakan pemberian fasilitas fiskal dalam rangka investasi dan pengembangan pasar dalam negeri dan ekspor; yang diarahkan untuk dilaksanakan dengan bermitra dengan pihak swasta.

Penyediaan air bersih untuk rakyat ditujukan untuk percepatan pencapaian target MDG 2015 dengan penekanan pada daerah rawan air serta bebas daerah rawan air pada tahun 2025. Program ini dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum berbasis masyarakat di perdesaan,

kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, ibukota kecamatan (IKK), dan kawasan khusus lainnya (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), yang disertai dengan peningkatan kualitas sanitasi, terutama melalui pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem setempat dan komunal.

Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya penghematan pemanfaatan tenaga listrik. Penyediaan listrik murah ini dilakukan dari sisi penyediaan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik, menurunkan biaya pemasangan dan penyesuaian tarif, serta meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik. Adapun dari sisi pemanfaatan dilakukan dengan meningkatkan penggunaan lampu hemat energi, menggalakkan pemakaian listrik pra-bayar dan labelling untuk peralatan listrik yang hemat energi.

Peningkatan kehidupan nelayan yang diarahkan pada 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilakukan melalui: (a) kegiatan pembangunan rumah sangat murah dengan pemberian sertifikasi tanah nelayan dan pembangunan rumah ramah bencana di lokasi rawan bencana; (b) pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan berupa pengembangan usaha Mina Perdesaan perikanan dan pengembangan alternatif mata pencaharian pada kelompok budidaya perikanan, penyediaan peralatan pengolahan, perlindungan nelayan dan konversi BBM ke gas; (c) pengembangan skema UMK dan KUR melalui pembinaan konsultan keuangan mitra bank (KKMB); (d) pembangunan SPBU solar melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Daerah Nelayan (SPDN); (e) pembangunan *cold storage*, pabrik es dan pengembangan sarana sistem rantai pendingin; (f) pengembangan angkutan umum murah melalui penyediaan sarana pemasaran bergerak; (g) fasilitas sekolah dan puskesmas murah dilaksanakan melalui rehabilitasi gedung sekolah rusak dan pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak nelayan; dan (h) fasilitasi bank "rakyat" melalui penguatan Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) pesisir.

Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan mencakup pembangunan rumah murah atau upaya realokasi jika kondisi sangat buruk, pengembangan ekonomi masyarakat melalui KUR dan UKM juga penyediaan fasilitas khusus sekolah dan puskesmas.

Dari 6 (enam) program yang direncanakan, 4 (empat) program pertama ditargetkan untuk kelompok sasaran seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Sementara itu 2 program lainnya pada Klaster 4, yaitu program 5 dan 6, merupakan suatu program yang dikhususkan untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat nelayan dan masyarakat miskin perkotaan. Kelompok ini dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari berbagai program yang ada pada Klaster 4 dan ketiga klaster lainnya. Kelompok masyarakat pada program 5 dan 6, pada umumnya masuk pada 60 persen masyarakat termiskin, yaitu kelompok RTSM dan RTM, serta sebagian kecil dari RTHM.

**Permasalahan
dan Hambatan
dalam
Pelaksanaan
Klaster 4**

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2012 adalah a) terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan; b) terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; c) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

Dalam penyediaan air bersih untuk rakyat, permasalahan pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang secara umum diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: 1) belum memadainya perangkat peraturan; 2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; 3) belum optimalnya sistem perencanaan; dan 4) terbatasnya ketersediaan pendanaan, dan 5) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam usaha penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin, beberapa hambatan yang ditemui adalah kurangnya kelengkapan dan akurasi data kelayakan teknis (data potensi energi setempat, data geografis, *supply* dan *demand*) dan data dukung lokasi hingga level desa/penerima.

Beberapa permasalahan yang ditemui untuk peningkatan kehidupan nelayan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan untuk nelayan, yang diantaranya disebabkan oleh rendahnya kemampuan nelayan, pebudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam berusaha, menurunnya produksi perikanan tangkap di perairan pantai sehingga diperlukan penambahan kapasitas kapal perikanan, dan ketersediaan BBM untuk nelayan terbatas untuk beberapa wilayah pesisir.

3.1 Analisis Faktor- faktor yang Mempenga- ruhi Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan pada periode 2010-2011 sebagian besar didorong oleh hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga terjadi kenaikan upah pekerja yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2011 sebesar 6,5 persen jauh lebih besar dari pertumbuhan pada triwulan I tahun 2010 yang hanya 5,6 persen. Sebagai dampaknya, pengeluaran rumah tangga pada periode yang sama meningkat sebesar 4,5 persen, yang menunjukkan kenaikan daya beli dan perbaikan tingkat kesejahteraan secara umum.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti mendistribusikan peningkatan pendapatan tidak hanya bagi kelas menengah saja, tetapi juga bagi penduduk dengan jenis pekerjaan berkeahlian dan berpenghasilan rendah. Pada periode ini rata-rata buruh harian mendapatkan upah 7,14 persen lebih tinggi. Rata-rata upah pekerja lepas yang meningkat ini meningkatkan penghasilan masyarakat yang umumnya berada dalam kategori miskin. Pendapatan yang meningkat sementara kenaikan harga yang relatif terjangkau telah meningkatkan konsumsi masyarakat di hampir semua kelas.

Tentunya terdapat perbedaan mendasar mengenai dampak pertumbuhan ekonomi pada penurunan angka kemiskinan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Sementara angka kemiskinan di perkotaan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan upah pekerja lepas, tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian yang sangat dominan.

Sebagai gambaran, penurunan kemiskinan pada daerah perdesaan baru-baru ini salah satunya merupakan kontribusi dari peningkatan produksi padi yang naik sekitar 2,4 persen, dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 (berdasarkan Angka Tetap/ATAP) menjadi 68,06 juta ton GKG pada 2011 (berdasarkan Angka Ramalan/ ARAM II). Selain itu penghasilan petani juga meningkat sebesar 2,09 persen, ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) dari 101,2 pada Maret 2010 menjadi 103,32 pada Maret 2011.

Hal lain yang sangat berpengaruh pada angka kemiskinan adalah inflasi pada garis kemiskinan, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Inflasi yang tinggi pada komoditas-komoditas dasar dapat menyebabkan kenaikan garis kemiskinan lebih cepat dari kenaikan harga secara umum.

Tercatat bahwa pada periode 2000-2010 inflasi pada garis kemiskinan terendah terjadi antara tahun 2003 dan 2004 sebesar 3,56 persen dan tertinggi antara tahun 2004 dan 2005 sebesar 12,87 persen (lihat tabel 11).

Garis kemiskinan makanan hampir selalu berkontribusi jauh lebih besar pada garis kemiskinan secara umum bila dibandingkan dengan garis kemiskinan non-makanan. Oleh sebab itu, inflasi pada komoditas makanan pokok seperti beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu yang secara historis selalu lebih tinggi dari angka inflasi inti seringkali lebih banyak mempengaruhi kemiskinan dibandingkan dengan kenaikan harga perumahan, transportasi atau pendidikan.

Sebagai gambaran, pada tahun 2011 garis kemiskinan makanan bernilai Rp. 171.834 sementara Garis Kemiskinan Non-Makanan hanya senilai Rp. 61.906. Artinya Garis Kemiskinan Makanan berkontribusi 75,35 persen terhadap garis kemiskinan secara umum yang sebesar Rp. 233.740 tahun 2011 (lihat tabel 14).

Tabel 14.
Garis Kemiskinan (GK) Makanan dan Non Makanan Periode 2002-2011
(rupiah/kapita/bulan)

Tahun	GK Makanan		GK Non-Makanan		Garis Kemiskinan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2002	80,068		28,821		108,889	
2003	82,568	3.12%	35,986	24.86%	118,554	8.88%
2004	84,747	2.64%	38,028	5.67%	122,775	3.56%
2005	91,072	7.46%	38,036	0.02%	138,574	12.87%
2006	114,125	25.31%	37,872	-0.43%	151,997	9.69%
2007	123,992	8.65%	42,704	12.76%	166,697	9.67%
2008	135,270	9.10%	47,366	10.92%	182,636	9.56%
2009	147,339	8.92%	52,923	11.73%	200,262	9.65%
2010	155,615	5.62%	56,111	6.02%	211,726	5.72%
2011	171,834	10.42%	61,906	10.33%	233,740	10.40%

Sumber: Diolah dari data BPS.

Inflasi garis kemiskinan pernah melambung pada tingkat 10,40 persen pada tahun 2011 dan 12,87 persen pada tahun 2005. Dengan mengabaikan kedua *outlier* statistik pada tahun-tahun tersebut bisa didapatkan perhitungan nilai rata-rata garis kemiskinan antara tahun 2002 dan 2011 yaitu berada di kisaran 8,1 persen

Sebagai catatan, proyeksi ini menggunakan garis kemiskinan yang resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat

Statistik (BPS). Apabila perhitungan angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan versi *Millennium Development Goals* yang hanya sebesar 1 (satu) USD/kapita/hari, maka persentase penduduk miskin Indonesia hanya mencapai 5,9 persen pada tahun 2009. Ini berarti Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hampir sepertiga dari tingkat kemiskinan pada tahun basis MDG's yaitu tahun 1990 yang besarnya adalah 15,1 persen.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, pada garis kemiskinan versi BPS tingkat konsumsi/pengeluaran yang diukur adalah setara dengan nilai USD 1,55/kapita/hari. Artinya, garis kemiskinan yang digunakan sudah sedikit lebih baik dari tingkat USD 1 yang digunakan dalam standar global. Pada standar perhitungan ini, kemiskinan Indonesia masih berada pada tingkat yang lebih tinggi. Perbandingan dari perhitungan dengan kedua standar tersebut disajikan melalui tabel 15.

Tabel 15.
Tingkat Kemiskinan Menurut Kriteria Garis Kemiskinan
Periode 2000-2010

Tahun	Kriteria MDG's (USD 1)	Kriteria BPS (USD 1,55)
2000	9,9	19,1
2001	9,2	18,4
2002	7,2	18,2
2003	6,6	17,4
2004	7,5	16,7
2005	6,1	16
2006	7,5	17,8
2007	6,7	16,6
2008	5,9	15,42
2009	n.a	14,15
2010	n.a	13,33

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BPS, World Bank)

3.2 Skenario Optimis dan Moderat dalam Proyeksi Kemiskinan 2012-2014

Untuk memproyeksikan penurunan angka kemiskinan pada periode 2012-2014, beberapa variabel ekonomi perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Beberapa variabel yang secara historis sangat mempengaruhi perubahan angka kemiskinan di Indonesia antara lain adalah: (i) pertumbuhan ekonomi makro yang diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB); (ii) pertumbuhan kesempatan kerja serta rasionya terhadap pertumbuhan populasi; (iii) dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan dan pengeluaran perkapita, dan (iv) tingkat inflasi inti dan inflasi pada garis kemiskinan. Berdasarkan kombinasi dari keempat variabel ini,

proyeksi kemiskinan dapat disusun berdasarkan dua skenario, yaitu skenario optimis dan skenario moderat.

3.2.1 Proyeksi Pertumbuhan berdasarkan Skenario Optimis

Pemerintah telah mencanangkan MP3EI untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi pada koridor-koridor pertumbuhan. Skenario yang optimistis ini memproyeksikan bahwa MP3EI dapat terlaksana tanpa hambatan yang berarti sehingga pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional berada pada rentang 6,71 persen (tahun 2012); 7,30 persen (tahun 2013) dan 7,77 persen (tahun 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang sangat agresif ini akan dipicu oleh pertumbuhan yang tinggi dari masing-masing sektor maupun kelompok sektor. Pada proyeksi ini, kelompok sektor jasa diharapkan dapat menyumbangkan pertumbuhan PDB yang paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan antara 9,31 persen (2012); 9,11 persen (2013); dan 9,57 persen (2014). PDB pada kelompok sektor industri diharapkan dapat tumbuh cukup tinggi antara 6,2 persen (2012); 7,65 persen (2013) dan 8,27 persen (2014). Diproyeksikan bahwa pemicu pertumbuhan yang utama pada periode 2012-2014 adalah sektor-sektor produktif seperti Pengangkutan dan Komunikasi (16,1persen pada 2014); Listrik, Gas dan Air Bersih (14,2 persen pada 2014); dan Konstruksi (11,1 persen pada 2014). Sementara itu, PDB pada kelompok sektor pertanian diperkirakan menyumbangkan pertumbuhan yang paling moderat, berkisar antara 2,97 persen (2012) dan 3,41 persen (2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2012-2014 berdasarkan Skenario Optimis

LAPANGAN USAHA	Realisasi			Perkiraan		Proyeksi Pertumbuhan					
	2009		2010	2011		2012		2013		2014	
	PDB (trilyun)	PDB (trilyun)	Growth (%)	PDB (trilyun)	Growth (%)	PDB (trilyun)	Growth (%)	PDB (trilyun)	Growth (%)	PDB (trilyun)	Growth (%)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	295.9	304.4	2.9	313.8	3.1	323.9	3.2	336.2	3.8	349.3	3.9
2. PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	180.2	188.4	3.5	190.9	2.4	195.9	2.6	200.8	2.5	206.0	2.6
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR AGRIKULTUR	476.1	490.8	3.10%	504.8	2.83%	519.8	2.97%	537.0	3.31%	555.3	3.41%
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	589.8	595.3	4.5	628.9	5.3	682.0	5.8	707.0	6.6	758.6	7.3
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	17.1	18.0	5.3	19.8	8.6	21.4	9	24.4	14	27.8	14.2
5. KONSTRUKSI	140.3	150.1	7	161.2	7.4	174.4	8.2	192.0	10.1	213.3	11.1
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR INDUSTRI	727.2	763.4	4.98%	807.9	5.79%	857.7	6.20%	923.3	7.83%	999.7	8.27%
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	388.6	400.8	8.7	435.9	8.8	474.6	8.9	506.0	6.4	536.4	6.6
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	191.8	217.4	13.5	248.5	13.4	278.6	13	322.0	15.6	373.9	16.1
8. KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN	208.8	220.8	5.7	234.5	6.3	249.1	6.2	286.5	7	286.0	7.3
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR JASA	789.0	838.9	9.05%	918.9	9.33%	1,002.3	9.31%	1,093.6	9.11%	1,196.2	9.57%
9. JASA - JASA (LAIN-LAIN)	205.4	217.8	6	231.3	6.2	245.9	6.3	263.6	7.2	283.1	7.4
TOTAL	2,177.7	2,310.7	6.10%	2,460.6	6.48%	2,625.6	6.71%	2,817.4	7.30%	3,036.3	7.77%

Sumber: Bappenas, 2011

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan juga dapat menjadi pemicu pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat tinggi. Secara umum, proyeksi ini menggunakan skenario yang optimistis dengan asumsi bahwa penerapan MP3EI akan mendorong pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 2,83 persen (2012); dan 2,7 persen (2013 dan 2014). Untuk itu, lapangan kerja diharapkan akan tumbuh sebesar lebih dari 3,2 juta kesempatan kerja baru setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang tinggi ini tidak diharapkan untuk tumbuh merata pada setiap sektor dan kelompok sektor. Sektor-sektor yang berada pada kelompok sektor industri, seperti industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan sektor konstruksi diharapkan untuk memimpin pencapaian pertumbuhan kesempatan kerja secara konsisten sebesar 6,35-6,75 persen pertahun. Hal ini konsisten dengan skenario di mana MP3EI mendorong kesempatan investasi pada kelompok sektor ini yang menyumbangkan lapangan kerja dan sumber pemasukan pajak paling besar. Sebaliknya, sektor-sektor yang berada pada kelompok sektor jasa, seperti perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; dan jasa-jasa keuangan diharapkan untuk tumbuh moderat sebesar 3,97 persen pada 2012, dan 3,01 persen pada 2014.

Proyeksi ini juga memperhitungkan tren 5 (lima) tahun terakhir di mana terjadi peralihan sejumlah besar pekerja dari sektor pertanian kepada sektor-sektor jasa. Skenario ini tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan pekerja di sektor pertanian meninggalkan kawasan perdesaan untuk mengadu nasib di kawasan perkotaan. Pada umumnya mereka diserap oleh sektor-sektor perdagangan, terutama di lini perdagangan informal dengan menjadi pedagang lepas. Di satu sisi tren ini positif karena pendapatan pada sektor pertanian umumnya rendah dan dengan terjadinya peralihan ini kalangan yang sebelumnya merupakan petani miskin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Perubahan angka kesempatan kerja yang diserap oleh sektor pertanian akan mengalami penurunan yang semakin cepat, sebesar 1,62 persen pada 2012, dan diperkirakan menurun lebih besar pada periode berikutnya sebesar 1,98 persen pada 2013 dan 2,04 persen pada 2014. Peralihan tenaga kerja kepada sektor perdagangan formal dapat terlihat dari meningkatnya proyeksi kesempatan kerja berkisar antara 6,74 persen (2012) dan 6,48 persen (2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini.

Tabel 17.
Proyeksi Pertumbuhan Kesempatan Kerja 2012-2014
berdasarkan Skenario Optimis

LAPANGAN USAHA	Realisasi	Perkiraan		Pertumbuhan					
	2010	2011		2012		2013		2014	
	Kes.Kerja (ribu)	Kes.Kerja (ribu)	Growth (%)	Kes.Kerja (ribu)	Growth (%)	Kes.Kerja (ribu)	Growth (%)	Kes.Kerja (ribu)	Growth (%)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	41,495	41,302	-0.46	40,633	-1.62	39,829	-1.98	39,018	-2.04
2. PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	1,255	1,366	8.88	1,494	9.36	1,616	8.16	1,753	8.50
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR AGRIKULTUR	42,749	42,668	-0.19	42,127	-1.27	41,444	-1.62	40,771	-1.62
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	13,824	14,484	4.77	15,610	7.78	16,868	8.06	18,228	8.06
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	234	270	15.48	305	12.87	380	18.07	416	15.51
5. KONSTRUKSI	5,593	5,742	2.66	5,882	2.44	6,039	2.87	6,193	2.55
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR INDUSTRI	19,651	20,496	4.30	21,798	6.35	23,288	6.75	24,837	6.74
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	22,492	23,244	3.34	24,010	3.29	24,368	1.49	24,727	1.47
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	6,619	6,761	3.06	6,964	2.99	6,196	3.87	6,438	3.93
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	1,739	2,057	18.27	2,353	14.36	2,694	14.49	3,081	14.76
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR JASA	29,851	31,063	4.16	32,327	3.97	33,257	2.88	34,257	3.01
9. JASA - JASA (LAIN-LAIN)	15,958	17,144	7.44	18,299	6.74	19,676	7.53	20,951	6.48
TOTAL	108,208	111,400	2.95	114,550	2.83	117,645	2.70	120,816	2.70

Sumber: Bappenas, 2011

Pada skenario ini, diproyeksikan bahwa berbagai instrumen moneter diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga inflasi inti berada di kisaran 4,5 persen. Berbagai instrumen fiskal berupa subsidi ataupun bantuan langsung diterapkan untuk mengendalikan harga komoditas secara ketat. Proyeksi ini memberikan perhatian khusus pada pengendalian harga sembilan bahan pokok (sembako), terutama beras, yang berkontribusi hampir 75 persen dari garis kemiskinan makanan. Pada skenario ini, inflasi yang dialami oleh garis kemiskinan makanan tidak melebihi batas 6,5 persen sebagai akibat dari kendali ketat atas kenaikan harga komoditas sembako.

3.2.2 Proyeksi Pertumbuhan berdasarkan Skenario Moderat

Pelaksanaan MP3EI merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah karena berbagai hambatan seperti birokrasi perijinan usaha yang kurang efisien, korupsi pada proses pengurusan perijinan usaha, ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan usaha dan penyelesaian konflik bisnis, dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan terkompromikan. Apabila pemerintah belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut pertumbuhan ekonomi akan terhambat sehingga diproyeksikan untuk tumbuh hanya sebesar 6,71 persen (2012); 6,98 persen (2013); dan 7,33 persen (2014).

Pada skenario ini pertumbuhan terbesar masih diproyeksikan untuk terjadi pada kelompok sektor jasa sebesar 9,31 persen

(2012); 8,60 persen (2013); dan 8,97 persen (2014). Sektor-sektor industri diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 6,20 persen (2012); 7,30 persen (2013); dan 7,76 persen (2014). Proyeksi pertumbuhan sektor industri ini berada jauh di bawah proyeksi pertumbuhan pada skenario optimis, dimana sektor-sektor industri dapat tumbuh di atas 8 persen pada 2014. Sementara itu, sektor pertanian tumbuh moderat sebesar 2,97 persen (2012); 3,25 persen (2013); dan 3,31 persen (2014). Proyeksi pertumbuhan PDB pada sektor pertanian ini tidak berbeda jauh dari proyeksi pada skenario optimis dimana sektor-sektor agrikultur tumbuh 3,41 persen pada 2014. Hal ini disebabkan karena perencanaan MP3EI memfokuskan pada sektor-sektor industri sehingga sektor pertanian umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh terhambatnya pelaksanaan rencana MP3EI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2012-2014 berdasarkan Skenario Moderat

LAPANGAN USAHA	Realisasi			Perkiraan		Proyeksi Pertumbuhan						
	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	PDB	PDB	Growth	PDB	Growth	PDB	Growth	PDB	Growth	PDB	Growth	
	(trilyun)	(trilyun)	(%)	(trilyun)	(%)	(trilyun)	(%)	(trilyun)	(%)	(trilyun)	(%)	
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	295.9	304.4	2.0	313.8	3.1	323.9	3.2	335.9	3.7	348.6	3.8	
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	180.2	186.4	3.5	190.9	2.4	195.9	2.6	200.8	2.5	205.8	2.5	
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR AGRIKULTUR	476.1	490.8	3.10%	504.8	2.83%	519.8	2.97%	536.6	3.25%	554.4	3.31%	
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	569.8	595.3	4.5	626.9	5.3	662.0	5.6	705.0	6.5	753.6	6.9	
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	17.1	18.0	5.3	19.6	8.6	21.4	9	24.4	14	27.8	14.2	
5. KONSTRUKSI	140.3	150.1	7	161.2	7.4	174.4	8.2	191.0	9.5	210.2	10.1	
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR INDUSTRI	727.2	763.4	4.98%	807.6	5.79%	857.7	6.20%	920.3	7.30%	981.7	7.76%	
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	368.6	400.6	8.7	435.9	8.8	474.6	8.9	500.8	5.5	528.8	5.6	
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	191.6	217.4	13.5	246.5	13.4	278.6	13	321.2	15.3	371.3	15.6	
8. KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERUSAHAAN	208.8	220.6	5.7	234.5	6.3	249.1	6.2	266.5	7	286.0	7.3	
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR JASA	769.0	838.6	9.05%	916.9	9.33%	1,002.3	9.31%	1,088.5	8.60%	1,186.1	8.97%	
9. JASA - JASA (LAIN-LAIN)	205.4	217.8	6	231.3	6.2	245.9	6.3	263.6	7.2	282.8	7.3	
TOTAL	2,177.7	2,310.7	6.10%	2,460.6	6.48%	2,625.8	6.71%	2,809.0	6.98%	3,015.0	7.33%	

Sumber: Bappenas, 2011

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja sehingga tumbuh secara moderat. Pertumbuhan kesempatan kerja diproyeksikan akan melambat sebesar 2,83 persen (2012); 2,16 persen (2013); dan 1,72 persen (2014). Sektor-sektor yang berada pada kelompok sektor industri, seperti industri

pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan sektor konstruksi diproyeksikan masih memimpin pencapaian pertumbuhan kesempatan kerja secara konsisten sebesar 6,35-6,53 persen per tahun. Sebaliknya, sektor-sektor yang berada pada kelompok sektor jasa, seperti perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; dan jasa-jasa keuangan diharapkan untuk tumbuh moderat antara 3,97 persen pada 2012 dan 1,37 persen pada 2014.

Kecenderungan peralihan kesempatan kerja dari sektor pertanian kepada sektor perdagangan dan jasa-jasa informal diproyeksikan masih akan terjadi walaupun percepatannya akan lebih rendah dibandingkan proyeksi peralihan pada skenario optimis. Angka kesempatan kerja sektor pertanian diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 1,62 persen pada 2012, dan diperkirakan menurun lebih besar pada periode berikutnya sebesar 1,97 persen pada 2013 dan 2,02 persen pada 2014. Peralihan tenaga kerja pertanian kepada sektor perdagangan dan jasa-jasa informal dapat terlihat dari proyeksi kesempatan kerja berkisar antara 6,74 persen (2012) dan 3,77 persen (2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.

Tabel 19.
Proyeksi Pertumbuhan Kesempatan Kerja 2012-2014
berdasarkan Skenario Moderat

LAPANGAN USAHA	Realisasi	Perkiraan		Pertumbuhan					
	2010	2011		2012		2013		2014	
	Kesempatan Kerja	Kesempatan Kerja	Growth (%)	Kesempatan Kerja	Growth (%)	Kesempatan Kerja	Growth (%)	Kesempatan Kerja	Growth (%)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN,	41,494,941	41,301,990	-0.48	40,833,228	-1.62	39,834,541	-1.97	39,031,277	-2.02
2. PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	1,254,501	1,385,901	8.88	1,493,749	9.39	1,595,449	4.80	1,688,771	7.75
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR AGRIKULTUR	42,749,442	42,687,891	-0.19	42,126,977	-1.27	41,399,990	-1.73	40,719,048	-1.63
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	13,824,251	14,483,888	4.77	15,810,285	7.78	16,737,785	7.22	16,032,483	7.74
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	234,070	270,304	15.48	305,092	12.87	340,291	11.54	388,272	14.10
5. KONSTRUKSI	5,592,897	5,741,892	2.66	5,882,201	2.44	5,985,380	1.77	6,149,806	2.73
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR INDUSTRI	19,651,218	20,495,884	4.30	21,797,558	6.35	23,064,466	5.81	24,370,543	6.53
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	22,492,178	23,244,314	3.34	24,009,750	3.29	24,254,851	1.02	24,453,334	0.82
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5,819,022	5,791,031	3.06	5,964,214	2.99	6,203,329	4.01	6,281,859	1.26
8. KEUANGAN, REAL ESTATE & JASA PERUSAHAAN	1,739,488	2,057,290	18.27	2,352,694	14.36	2,808,214	19.36	2,986,743	6.43
AGREGAT KELOMPOK SEKTOR JASA	29,850,684	31,092,665	4.16	32,326,658	3.87	33,266,394	2.91	33,723,736	1.37
9. JASA - JASA (LAIN-LAIN)	15,958,423	17,143,581	7.44	18,298,807	6.74	19,298,169	5.46	20,025,702	3.77
TOTAL	108,207,767	111,400,001	2.95	114,550,000	2.83	117,029,018	2.16	119,038,030	1.72

Sumber: Bappenas, 2011

Pada skenario ini, stabilitas ekonomi makro dikelola secara lebih longgar sehingga inflasi inti diproyeksikan berada di kisaran 5,5 persen. Subsidi ataupun bantuan langsung tetap

diterapkan untuk mengendalikan harga komoditas, namun tidak seketat pengendalian pada skenario optimis. Pada skenario ini, inflasi yang dialami oleh garis kemiskinan makanan diproyeksikan tidak melebihi inflasi rata-rata pada garis kemiskinan antara tahun 2000 – 2011, yaitu pada tingkat 8,1 persen.

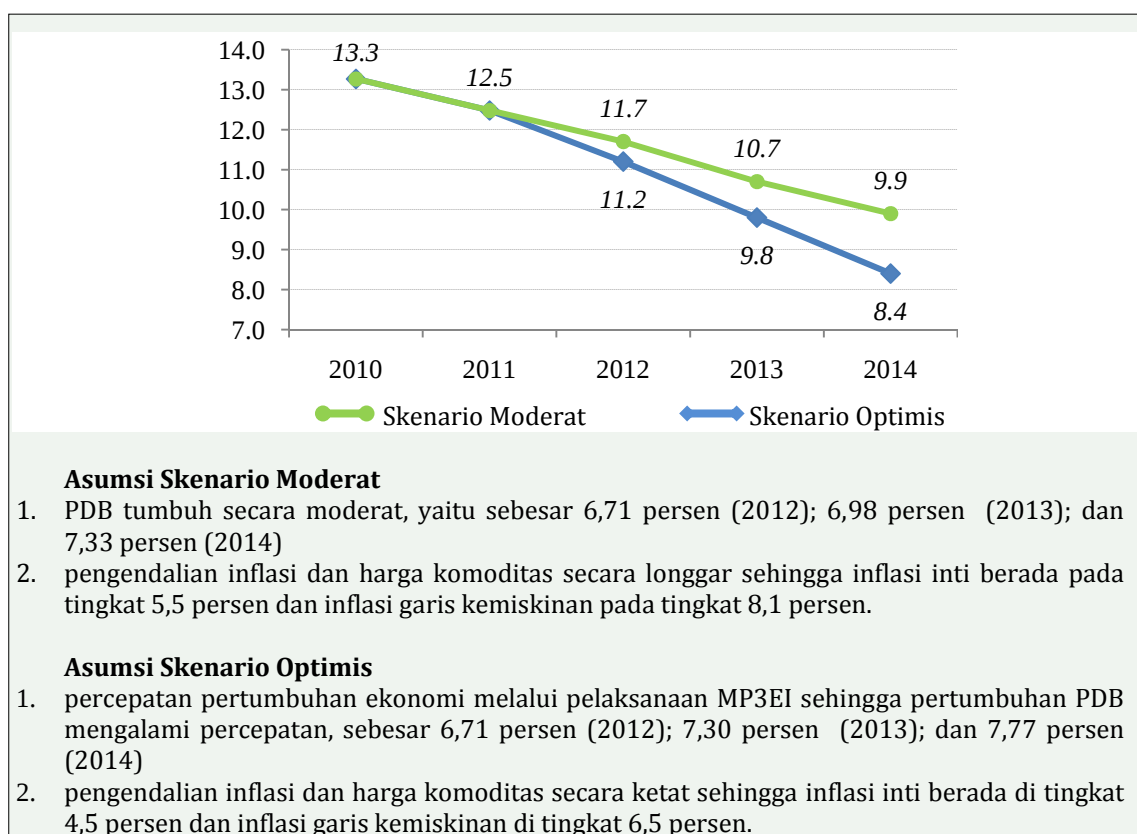
Sebagai catatan, pada tahun 2005 dan 2011 angka inflasi garis kemiskinan pernah mencapai di atas 10 persen. Angka-angka inflasi pada tahun-tahun tersebut (12,87 persen pada 2005 dan 10,40 persen pada 2011) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata inflasi garis kemiskinan dalam proyeksi ini karena tahun-tahun tersebut dianggap mengalami gejolak ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu dalam skenario moderat ini juga berlaku asumsi bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi makro agar tidak mengganggu stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

3.3 Proyeksi Kemiskinan Nasional

Implementasi MP3EI diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi di Indonesia secara sangat agresif, yang ditandai dengan semakin kondusifnya iklim investasi, pertumbuhan lapangan kerja yang konsisten, dan peningkatan pendapatan di hampir semua sektor secara sangat signifikan. Walaupun demikian, berbagai pencapaian dalam skenario MP3EI membutuhkan waktu terutama untuk membangun beberapa infrastruktur pendukung yang teramat penting sebagai prasyarat pembangunan ekonomi.

Diproyeksikan bahwa skenario pencapaian ekonomi makro melalui MP3EI akan mulai menunjukkan dampaknya pada penurunan tingkat kemiskinan secara makro pada tahun 2013. Pada kondisi terbaik skenario optimis ini akan menurunkan kemiskinan menjadi 11,2 persen pada 2012; 9,8 persen pada tahun 2013 dan 8,4 persen pada tahun 2014. Pada skenario yang lebih moderat, maka angka kemiskinan yang terpengaruh juga diproyeksikan untuk menurun secara moderat pula sehingga berada pada tingkat 11,7 persen pada 2012; 10,7 persen pada tahun 2013 dan 9,9 persen pada tahun 2014 (lihat gambar 11).

Gambar 11.
Proyeksi Penurunan Angka Kemiskinan 2012-2014



3.4 Proyeksi Kemiskinan Tingkat Provinsi

Selain memprediksikan tingkat kemiskinan secara nasional, salah satu tujuan utama proyeksi ini adalah memperkirakan tingkat kemiskinan per provinsi. Perkiraan tingkat kemiskinan ini dapat memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan dua hal utama, yaitu kesenjangan antar-provinsi dan distribusi penduduk pada masing-masing provinsi berdasarkan kriteria miskin atau hampir miskin (lihat tabel 20).

Tabel 20.
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Per Provinsi 2012-2014

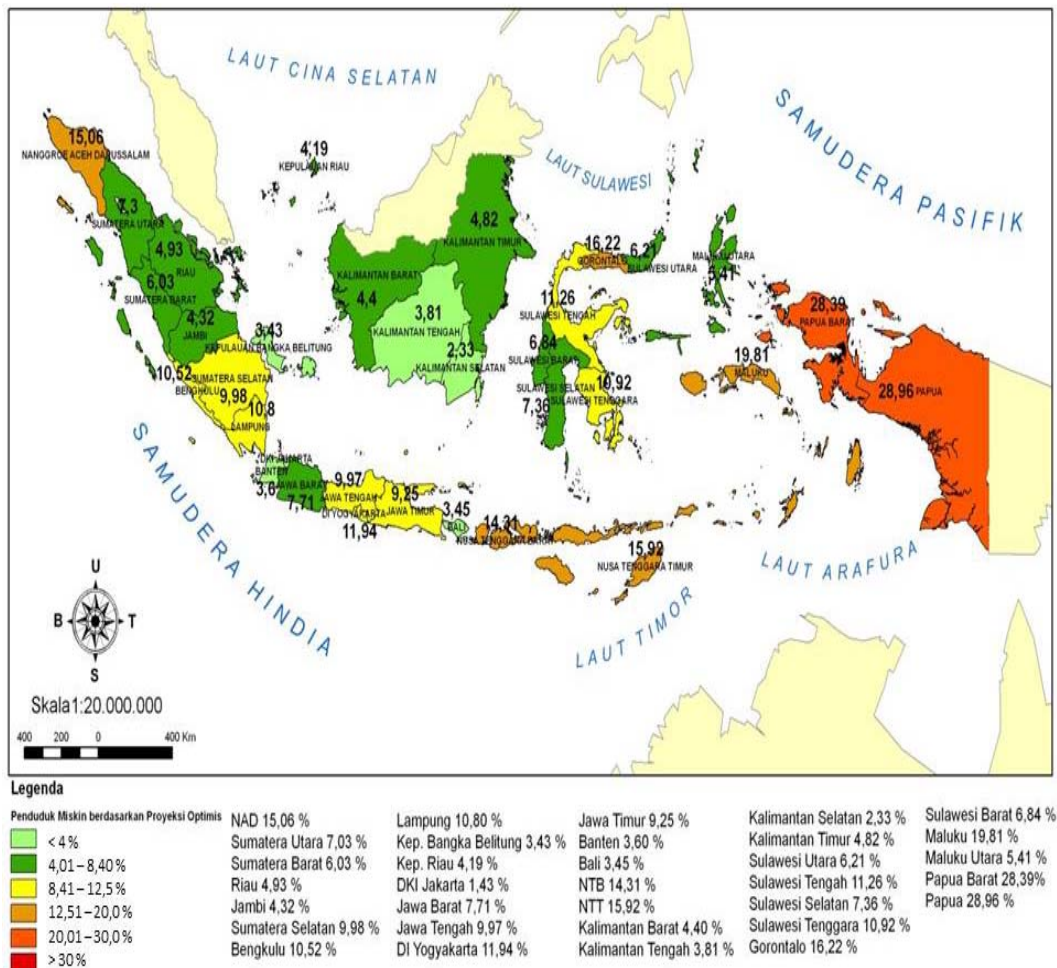
PROVINSI	Persentase Penduduk (Skenario Optimis)						Persentase Penduduk (Skenario Moderat)					
	Miskin			Hampir Miskin			Miskin			Hampir Miskin		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	18.29	16.91	15.06	12.48	11.13	10.23	18.97	18.26	16.96	12.82	11.57	11.04
SUMATERA UTARA	9.72	8.79	7.30	9.10	7.90	7.46	9.99	9.55	8.79	9.86	8.36	8.04
SUMATERA BARAT	8.31	7.10	6.03	7.24	6.73	6.53	8.67	7.94	7.24	8.02	6.89	6.53
RIAU	7.17	5.87	4.93	8.80	8.04	6.94	7.60	6.37	5.69	8.76	8.58	8.03
JAMBI	6.16	4.78	4.32	10.29	9.64	8.78	6.32	5.28	4.92	10.40	10.56	9.87
SUMATERA SELATAN	13.14	11.77	9.98	12.12	11.21	10.59	13.62	12.54	11.63	12.94	12.17	11.38
BENGKULU	14.67	12.26	10.52	14.33	13.57	11.69	15.46	13.48	11.99	15.05	14.72	13.98
LAMPUNG	15.57	13.12	10.80	14.32	14.08	13.95	16.78	14.43	13.19	13.77	14.57	14.09
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5.06	4.89	3.43	6.97	6.39	5.38	5.40	5.06	4.89	7.31	7.11	6.41
KEPULAUAN RIAU	6.83	4.71	4.19	5.89	7.19	6.98	6.92	6.64	4.71	5.95	5.71	6.84
DKI JAKARTA	2.36	1.91	1.43	3.95	3.57	3.57	2.36	2.32	1.93	4.26	3.78	3.58
JAWA BARAT	9.56	8.74	7.71	8.82	8.03	7.42	9.96	9.31	8.88	8.83	8.69	8.03
JAWA TENGAH	13.56	12.02	9.97	13.19	12.54	12.19	14.21	12.98	12.13	13.26	13.25	12.43
DI YOGYAKARTA	15.02	13.28	11.94	11.37	10.97	9.93	15.69	14.51	13.64	11.31	11.24	10.40
JAWA TIMUR	12.71	11.06	9.25	12.14	11.64	10.89	13.14	12.06	10.94	12.55	11.98	11.49
BANTEN	5.62	4.46	3.60	6.89	6.85	6.62	5.89	4.97	4.49	6.95	7.08	6.87
BALI	4.49	4.24	3.45	6.01	5.02	4.99	4.57	4.48	4.44	6.25	5.67	4.88
NUSA TENGGARA BARAT	18.98	16.52	14.31	13.57	13.56	13.21	20.06	18.15	16.39	13.62	13.14	13.68
NUSA TENGGARA TIMUR	20.18	18.14	15.92	14.63	14.09	13.40	21.31	19.19	18.02	14.62	14.50	13.97
KALIMANTAN BARAT	7.11	5.80	4.40	11.58	10.36	8.62	7.77	6.53	6.04	11.84	11.09	10.09
KALIMANTAN TENGAH	5.42	4.30	3.81	7.75	6.61	5.43	5.53	4.56	4.30	8.16	7.37	6.74
KALIMANTAN SELATAN	3.82	3.04	2.33	7.42	6.65	6.49	4.22	3.69	3.04	7.42	7.13	7.09
KALIMANTAN TIMUR	5.86	5.37	4.82	6.69	6.71	6.33	6.08	5.66	5.34	6.76	6.70	6.66
SULAWESI UTARA	8.54	6.92	6.21	10.29	9.24	7.86	8.79	8.10	6.97	10.69	9.74	9.13
SULAWESI TENGAH	16.22	13.40	11.26	11.93	12.33	12.25	16.61	15.06	13.48	12.17	12.09	12.02
SULAWESI SELATAN	9.60	8.29	7.36	9.04	8.92	8.13	10.00	8.97	8.19	9.30	9.12	8.99
SULAWESI TENGGARA	14.69	13.20	10.92	13.91	12.97	12.17	15.56	14.10	13.09	13.63	13.61	12.52
GORONTALO	21.24	19.35	16.22	13.13	12.13	13.20	21.52	20.32	19.35	13.19	12.79	11.87
SULAWESI BARAT	10.21	8.17	6.84	13.89	13.88	11.22	10.56	9.58	7.95	13.82	14.02	14.07
MALUKU	24.75	22.12	19.81	16.65	15.49	14.34	25.41	24.33	22.37	16.82	15.51	15.04
MALUKU UTARA	7.91	7.33	5.41	7.35	6.68	7.31	8.62	8.12	7.33	7.34	6.84	6.88
PAPUA BARAT	32.37	29.31	28.39	11.30	12.64	11.26	32.37	31.45	29.37	11.89	11.42	12.97
PAPUA	33.09	30.63	28.96	11.69	12.75	12.31	34.42	32.08	30.35	11.06	12.27	12.79
INDONESIA	11.17	9.83	8.38	10.42	9.84	9.26	11.65	10.67	9.85	10.62	10.29	9.80

Catatan:

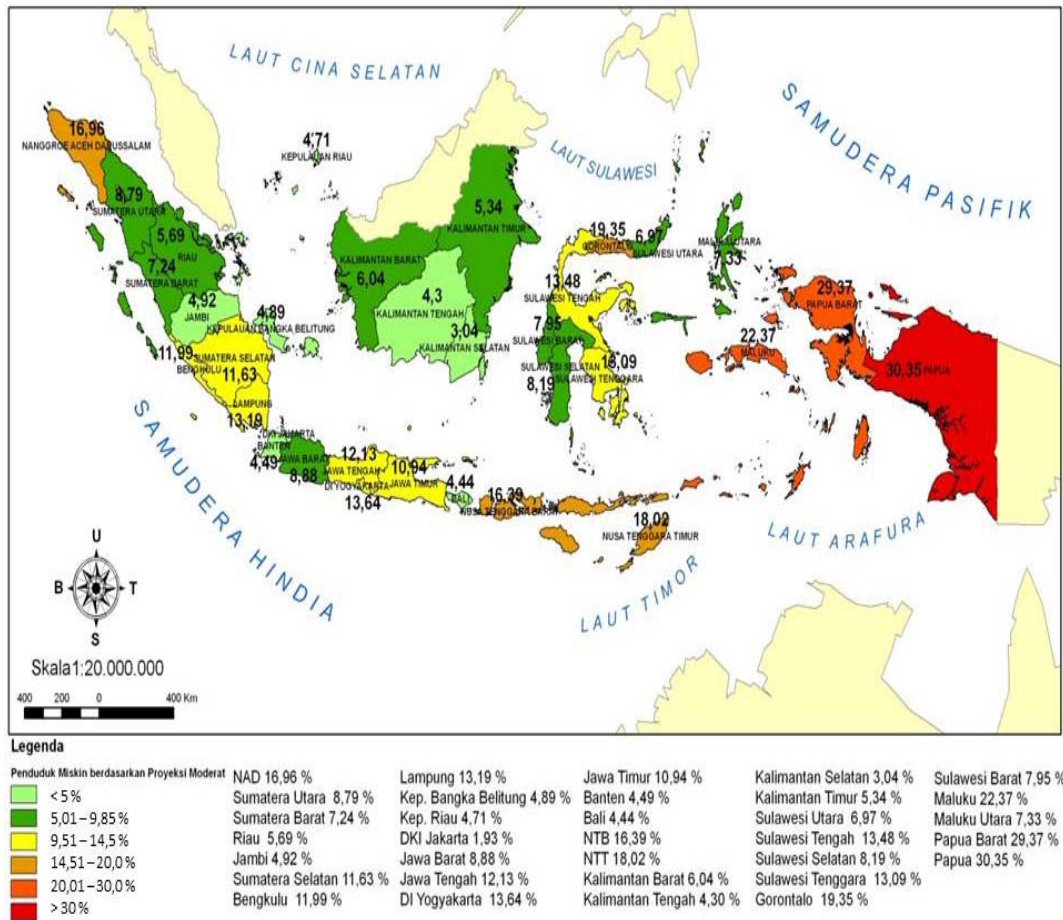
1. Proyeksi Penduduk Hampir Miskin menggunakan asumsi bahwa pendapatan masyarakat hampir miskin berada di antara Garis Kemiskinan (GK) hingga 1,2x GK.
2. Proyeksi ini adalah perkiraan penurunan kemiskinan di tiap provinsi apabila berbagai kriteria skenario terpenuhi, *bukan* merupakan target penurunan kemiskinan di tiap provinsi.

Berbagai indikator tersebut juga masih menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia masih akan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, baik dalam proyeksi optimis maupun moderat. Perhatian khusus masih perlu diberikan kepada provinsi Papua Barat dan Papua yang pada tahun 2014 diproyeksikan masih memiliki angka kemiskinan antara 28,68-32,08 persen, relatif jauh di atas angka proyeksi kemiskinan nasional sebesar 8,4 persen. Selain itu pada tahun 2014, diproyeksikan masih terdapat 9 (sembilan) provinsi dengan tingkat kemiskinan berada di atas kemiskinan nasional antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, NTB, NAD, NTT, Gorontalo dan Maluku (lihat gambar 12 dan 13)

Gambar 12.
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Per Provinsi
berdasarkan skenario Optimis pada Tahun 2014



Gambar 13.
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Per Provinsi
berdasarkan skenario Moderat pada Tahun 2014



Secara kumulatif, kemiskinan diproyeksikan masih akan terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa yang memiliki populasi sangat besar. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing diproyeksikan memiliki lebih dari 4 (empat) juta penduduk miskin pada 2014. Beberapa kantong kemiskinan lainnya di Indonesia diproyeksikan akan berada di Lampung dan Sumatera Utara, masing-masing memiliki lebih dari 1 (satu) juta penduduk miskin. Aceh, Sumatera Selatan, NTB, NTT dan Papua adalah kantong-kantong kemiskinan berikutnya di mana di provinsi-provinsi ini diproyeksikan akan terdapat penduduk miskin mendekati angka 1 (satu) juta orang pada tahun 2014 (lihat tabel 21 dan 22).

Tabel 21.
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi berdasarkan Skenario Optimis

PROVINSI	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)					
	Miskin			Hampir Miskin		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	719.4	672.5	605.2	490.8	442.7	411.4
SUMATERA UTARA	1,291.2	1,180.5	991.5	1,209.5	1,060.9	1,013.1
SUMATERA BARAT	387.2	334.5	286.9	337.2	317.1	311.1
RIAU	427.1	353.3	300.3	523.9	483.8	422.2
JAMBI	177.6	139.4	127.6	296.8	281.2	258.9
SUMATERA SELATAN	943.7	854.7	732.7	870.1	814.3	777.2
BENGKULU	270.1	228.3	198.1	263.9	252.7	220.9
LAMPUNG	1,225.3	1,044.0	869.4	1,127.8	1,120.8	1,122.3
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	53.7	52.5	37.2	74.8	68.5	58.3
KEPULAUAN RIAU	126.9	88.4	79.7	109.4	135.1	132.5
DKI JAKARTA	221.1	180.6	136.7	369.7	338.1	341.7
JAWA BARAT	4,118.8	3,806.8	3,394.5	3,800.1	3,499.4	3,265.5
JAWA TENGAH	4,275.7	3,835.3	3,214.4	4,159.9	3,958.2	3,929.5
DI YOGYAKARTA	515.8	461.4	419.2	390.4	381.2	348.6
JAWA TIMUR	4,647.5	4,089.1	3,456.2	4,438.3	4,302.8	4,070.9
BANTEN	621.2	498.8	407.1	761.9	766.5	748.5
BALI	158.3	150.9	124.2	211.8	179.0	179.9
NUSA TENGGARA BARAT	875.7	770.9	674.3	626.4	632.8	623.3
NUSA TENGGARA TIMUR	924.5	840.3	745.6	670.4	652.9	627.6
KALIMANTAN BARAT	333.5	274.9	210.3	543.2	451.5	413.5
KALIMANTAN TENGAH	126.9	101.9	91.3	181.6	156.6	129.9
KALIMANTAN SELATAN	135.9	109.5	84.3	264.1	239.3	236.3
KALIMANTAN TIMUR	190.9	176.9	160.4	217.9	221.1	210.7
SULAWESI UTARA	193.1	158.3	143.6	232.7	211.3	181.7
SULAWESI TENGAH	438.8	365.8	310.3	322.2	336.6	338.9
SULAWESI SELATAN	763.6	666.5	598.4	718.5	716.9	680.5
SULAWESI TENGGARA	363.6	330.5	276.4	344.5	324.8	308.9
GORONTALO	208.8	191.6	162.3	128.6	120.1	132.1
SULAWESI BARAT	111.9	90.5	76.6	152.2	153.9	125.3
MALUKU	354.3	320.3	289.9	238.5	224.3	209.9
MALUKU UTARA	80.8	75.7	56.5	75.1	69.0	76.3
PAPUA BARAT	250.5	229.4	224.6	87.5	58.9	89.1
PAPUA	734.1	687.2	656.7	259.3	286.0	279.2
INDONESIA	26,265.6	23,361.5	20,144.7	24,497.5	23,378.2	22,253.0

Catatan:

1. Proyeksi Penduduk Hampir Miskin menggunakan asumsi bahwa pendapatan masyarakat hampir miskin berada di antara Garis Kemiskinan (GK) hingga 1,2 x GK.
2. Proyeksi ini adalah perkiraan penurunan kemiskinan di tiap provinsi apabila berbagai kriteria skenario terpenuhi, *bukan* ditujukan untuk menjadi target penurunan kemiskinan di tiap provinsi.

Tabel 22.
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi berdasarkan Skenario Moderat

PROVINSI	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)					
	Miskin			Hampir Miskin		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	745.8	726.1	681.5	504.0	480.0	443.7
SUMATERA UTARA	1,327.7	1,283.2	1,194.1	1,310.6	1,122.6	1,091.4
SUMATERA BARAT	403.8	374.1	344.3	373.6	324.5	311.0
RIAU	452.7	383.6	346.5	521.8	516.8	439.0
JAMBI	182.5	154.1	145.1	300.2	308.1	291.0
SUMATERA SELATAN	978.0	910.8	853.6	929.6	883.4	835.3
BENGKULU	284.7	251.1	225.7	277.1	274.1	263.2
LAMPUNG	1,321.2	1,148.7	1,061.5	1,084.1	1,180.1	1,134.0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	57.2	54.3	53.0	77.5	76.3	89.5
KEPULAUAN RIAU	128.6	124.7	89.4	110.6	107.4	129.9
DKI JAKARTA	221.1	219.6	185.9	358.0	357.9	342.6
JAWA BARAT	4,288.2	4,853.8	3,910.9	3,802.7	3,783.1	3,537.4
JAWA TENGAH	4,480.7	4,138.4	3,912.3	4,183.3	4,226.1	4,038.9
DI YOGYAKARTA	538.5	504.2	479.1	388.4	390.5	365.4
JAWA TIMUR	4,803.3	4,458.2	4,088.9	4,589.0	4,430.9	4,295.8
BANTEN	651.3	555.7	507.9	768.6	792.1	776.2
BALI	161.2	159.7	159.3	220.1	202.1	175.9
NUSA TENGGARA BARAT	925.5	847.0	772.9	628.6	613.2	645.2
NUSA TENGGARA TIMUR	976.1	888.9	843.3	669.9	671.7	654.1
KALIMANTAN BARAT	364.2	309.8	289.4	555.4	526.1	483.6
KALIMANTAN TENGAH	129.4	108.0	103.1	151.2	174.5	161.5
KALIMANTAN SELATAN	150.2	132.9	110.7	264.1	256.8	258.0
KALIMANTAN TIMUR	198.2	186.5	177.3	220.4	220.7	222.0
SULAWESI UTARA	198.8	185.2	161.9	241.6	222.6	211.0
SULAWESI TENGAH	448.4	411.2	372.1	328.7	330.1	331.6
SULAWESI SELATAN	795.5	721.0	665.7	739.8	733.1	730.4
SULAWESI TENGGARA	385.2	352.9	331.1	337.4	340.8	316.8
GORONTALO	210.8	201.3	193.7	129.2	126.7	118.8
SULAWESI BARAT	115.8	106.2	89.9	151.5	155.4	157.7
MALUKU	363.8	352.3	327.4	240.9	224.7	220.2
MALUKU UTARA	88.1	83.9	76.5	75.0	70.7	71.9
PAPUA BARAT	250.5	246.1	232.4	52.0	89.4	132.6
PAPUA	763.5	719.7	688.4	245.3	275.2	290.1
INDONESIA	27,390.9	25,353.3	23,672.6	24,950.3	24,447.5	23,535.4

Catatan:

1. Proyeksi Penduduk Hampir Miskin menggunakan asumsi bahwa pendapatan masyarakat hampir miskin berada di antara Garis Kemiskinan (GK) hingga 1,2 x GK.
2. Proyeksi ini adalah perkiraan penurunan kemiskinan di tiap provinsi apabila berbagai kriteria skenario terpenuhi, *bukan* ditujukan untuk menjadi target penurunan kemiskinan di tiap provinsi.



BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu 1) strategi dan kebijakan makro; dan 2) strategi dan kebijakan klaster. Strategi dan kebijakan makro secara umum berkaitan dengan upaya untuk menjaga kinerja perekonomian nasional secara makro, yang secara tidak langsung diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian target penanggulangan kemiskinan sesuai dengan RPJMN 2010-2014. Sementara, strategi dan kebijakan klaster secara umum berkaitan dengan upaya yang bersifat afirmatif, yang secara langsung diharapkan dapat mencapai target penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan keempat klaster penanggulangan kemiskinan.

4.1 Strategi dan Kebijakan Makro

Secara makro, strategi pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan upaya mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Strategi pertama ini akan ditempuh melalui kebijakan peningkatan investasi terutama melalui implementasi MP3EI secara tepat waktu dan tepat rencana. Adanya peningkatan realisasi investasi melalui pelaksanaan proyek-proyek yang masuk dalam dokumen MP3EI diharapkan secara makro akan mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Diharapkan pula, realisasi dari proyek-proyek MP3EI dapat berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan baru, yang pada gilirannya diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran secara nasional. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Koordinator Perekonomian dapat mengkoordinasikan implementasi proyek-proyek MP3EI tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya, strategi kedua adalah perlunya upaya untuk menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat miskin tidak jatuh sehingga kualitas kehidupan masyarakat miskin tidak semakin buruk. Strategi kedua ini dapat dilakukan melalui implementasi 2 (dua) kebijakan yaitu:

1. Pengamanan stok bahan pangan pokok yang berkontribusi sekitar 75 persen terhadap garis kemiskinan.

2. Pengamanan distribusi bahan pangan pokok di daerah-daerah yang merupakan konsentrasi penduduk miskin.

Pengamanan stok bahan pangan pokok perlu dilakukan dengan menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan melalui koordinasi antara Bulog, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perhubungan. Selain itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi bahan pangan pokok untuk menjaga agar disparitas harga antar wilayah dan antar waktu tetap terkendali dalam rentang harga yang wajar. Disamping itu, perlu pula adanya dukungan ketersediaan sarana, prasarana, dan moda yang mampu menunjang penyediaan dan distribusi bahan pangan pokok secara nasional.

Kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah dengan upaya meningkatkan besaran subsidi melalui program-program penanggulangan kemiskinan pada Klaster I, terutama subsidi melalui Raskin. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat Garis Kemiskinan Makanan menyumbang 73,5 persen terhadap Garis Kemiskinan pada 2010, dimana komoditas beras berkontribusi pada Garis Kemiskinan sebesar 25,20 persen di kawasan perkotaan dan 34,11 persen di kawasan perdesaan.

Secara kelembagaan, pembagian tugas diantara kementerian/lembaga terkait dalam mengimplementasikan strategi dan kebijakan makro penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Tabel 23.
Instansi Pelaksana Strategi Makro Penanggulangan Kemiskinan

Strategi	Tujuan Pencapaian	Instansi Pelaksana Terkait
Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, padat karya, dan memberikan upah yang layak	Mengawal implementasi MP3EI agar berjalan sesuai rencana	Kementerian Koordinator Perekonomian dan kementerian teknis terkait
	Mendorong pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi, sehingga mengurangi pengangguran (<i>unemployment</i> dan <i>underemployment</i>)	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, dan Pemerintah Provinsi
	Mengadvokasi peningkatan upah minimum	
Menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak jatuh melalui kestabilan harga bahan pangan pokok	Mengamankan ketersediaan stok bahan pangan pokok	Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, BULOG, Bappenas, Kementerian Keuangan
	Mengamankan distribusi bahan pangan pokok	BULOG, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah
	Menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, Kementerian Keuangan

4.2 Strategi dan Kebijakan Kluster

4.2.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kluster 1

Perluasan Program Keluarga Harapan

Pada Program Keluarga Harapan (PKH) direncanakan untuk dilakukan perluasan cakupan sasaran dengan menjangkau Rumah Tangga Miskin (RTM), dimana sebelumnya hanya mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Perluasan PKH akan dapat dicapai secara maksimal dengan tetap memperhatikan 4 (empat) faktor yang merupakan siklus pelaksanaan program antara lain: 1) Pemutakhiran Data, 2) Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Persyaratan, 3) Proses Pembayaran, 4) Sistem Pangaduan Masyarakat dan Penyelesaiannya, 5) Sosialisasi dan Pelatihan, dan 6) Koordinasi antar lembaga.

Pada tahun 2011, PKH mulai dilaksanakan di Indonesia bagian Timur khususnya Provinsi Maluku Utara. Pelaksanaan ini merupakan uji coba untuk pelaksanaan yang lebih luas di tahun 2012 yang direncanakan akan dilaksanakan di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Tahun 2013, PKH direncanakan untuk perluasan sasaran menjadi 2,4 juta peserta, sedangkan, pada tahun 2014, direncanakan menjadi 3 juta peserta (lihat tabel 24). Meskipun demikian beberapa hal perlu disiapkan guna mendukung rencana perluasan PKH tersebut, antara lain: metode penargetan, struktur organisasi, sistem informasi, sisi penyediaan layanan, dan lain-lain.

Tabel 24.
Perencanaan PKH 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Keluarga sasaran (juta)	1,116	1,516	2,4	3,0
Provinsi	25	33	33	33
Kabupaten/Kota	103	166	350	500
Kebutuhan dana (Rp triliun)	1,6	1,8	3,4	4,2

Sumber : Kementerian Sosial dan TNP2K, 2011

Strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dalam periode 2012-2014, antara lain adalah:

1. Penyempurnaan proses penentuan sasaran (*targeting*) melalui pengembangan metode penargetan dan

memaksimalkan mekanisme pendataan yang disediakan oleh BPS melalui PPLS 2011 dan Survey Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP).

2. Meningkatkan sosialisasi terhadap peserta PKH untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Menyempurnakan proses verifikasi kepatuhan peserta PKH.
4. Menyempurnakan proses dan ketepatan pembayaran melalui berbagai mekanisme pembayaran bantuan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan rekening giro/tabungan.
5. Menyempurnakan strategi sosialisasi terhadap masyarakat luas dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka sehingga dukungan terhadap pelaksanaan program dapat diberikan.
6. Meningkatkan koordinasi dan validasi data silang dengan program bantuan sosial lainnya, sehingga peserta PKH juga bisa mendapatkan fasilitas Subsidi Siswa Miskin, Jamkesmas dan program lainnya, seperti Raskin.

**Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
Raskin**

Secara umum, program Raskin ke depan akan tetap diupayakan untuk dapat mencakup seluruh rumah tangga sasaran sesuai dengan data kemiskinan dari BPS (atau selama ini berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008). Strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dalam kurun waktu 2012-2014, antara lain adalah:

1. Menyempurnakan proses penentuan sasaran (*targeting*) untuk keperluan pengembangan metode penargetan dan pemaksimalan mekanisme pendataan melalui PPLS 2011.
2. Mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk memfokuskan upaya dukungan bagi pelaksanaan Raskin dan mematuhi ketentuan penggunaan data *by name by address* yang telah dihasilkan melalui PPLS 2011.
3. Meningkatkan efektifitas dengan cara mempertajam fokus penerima Raskin menjadi Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin dan meningkatkan signifikansi Raskin dengan menaikkan jumlah beras yang dapat diterima oleh setiap Rumah Tangga.
4. Mengubah proses penetapan alokasi pendanaan Raskin sehingga tidak didasarkan pada kuota tetapi pada perencanaan berdasarkan pendataan target (PPLS 2011).
5. Mengupayakan seoptimal mungkin agar data rumah tangga sasaran berdasarkan data kemiskinan BPS (PPLS) tidak mengalami keterlambatan dan perubahan pada tengah waktu.

6. Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik pusat dan daerah, pada seluruh tahap Program Raskin.
7. Menyempurnakan dan lebih mengaktifkan mekanisme dan proses pengaduan terhadap kekurangan dan kelemahan Program Raskin.
8. Meningkatkan koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya.

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Jamkesmas

Strategi yang akan dilakukan adalah pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, melalui:

1. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan secara bertahap.
2. Peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
3. Penyediaan pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal) yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan KB.
4. Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit.
5. Perbaikan kualitas sosialisasi pelaksanaan Jamkesmas kepada penerima manfaat.
6. Peleburan Jamkesmas dan Jampersal ke dalam skema Asuransi Kesehatan di mana Pemerintah membayar premi bagi masyarakat miskin.

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Subsidi Siswa Miskin (SSM)

Strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program subsidi siswa miskin dalam kurun waktu 2012-2014, antara lain adalah:

1. Menyempurnakan proses penentuan sasaran (*targeting*) melalui metode pengumpulan data siswa yang di dapat dari sekolah yang dikonfirmasi oleh daftar penerima yang *eligible* di dalam PPLS 2011.
2. Terus menerus memperbaharui target penerima setiap tahun untuk mengakomodasi penerima yang tidak tercatat melalui PPLS 2011 (*self-application*) sehingga pendaftar dapat menerima subsidi siswa miskin di tahun berikutnya.
3. Memberikan sosialisasi program subsidi siswa miskin baik kepada pemerintah daerah maupun instansi vertikal di daerah (Kanwil dan SKPD), maupun satuan pendidikan agar pelaksanaan pemberian bantuan berjalan dengan baik dan lancar.
4. Meningkatkan monitoring dan pelaporan untuk menjamin

ketepatan sasaran subsidi siswa miskin di daerah.

5. Menyempurnakan proses perencanaan, pendataan siswa, maupun sistem dan mekanisme penyaluran subsidi siswa miskin.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak pemberian subsidi siswa miskin.
7. Menyediakan pemberian beasiswa transisi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Mendorong sekolah untuk memberikan fasilitas pengayaan kepada siswa-siswi penerima subsidi siswa miskin untuk meningkatkan kemampuan mereka berkompetisi dengan rekan-rekannya yang tidak miskin.
9. Melakukan kajian terhadap lingkup subsidi siswa miskin yang mencakup SPP (*tuition*), biaya transport, buku, baju seragam, atau termasuk juga sebagai kompensasi adanya pendapatan yang hilang bagi keluarga miskin (*forgone earning*) karena anaknya bersekolah.
10. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian subsidi siswa miskin.
11. Meningkatkan peran *public private partnership* (PPP) dalam pemberian subsidi siswa miskin termasuk juga upaya pemetaan dalam rangka pemerataan target.
12. Meningkatkan koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya, seperti program PKH agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 25.
Perencanaan Subsidi Siswa Miskin 2012-2014

Sasaran Penerima Subsidi Siswa Miskin	2012		2013		2014	
	Target	Alokasi	Target	Alokasi	Target	Alokasi
SD	3.530.305	1.285,0	3.370.200	1.213,3	3.103.210	1.117,2
SMP	1.295.450	777,3	1.275.840	701,7	1.195.700	657,6
SMA	505.290	397,7	714.653	557,4	800.000	624,0
SMK	617.576	485,5	560.358	437,1	645.298	503,3
PT	80.000	820,0	110.000	1.180,0	140.000	1.360,0
MI	750.000	270,0	840.000	302,4	840.000	302,4
MTs	600.000	432,0	540.000	388,8	540.000	388,8
MA	400.000	304,0	320.000	243,2	320.000	243,2
PTA	63.856	76,6	59.538	71,4	59.538	71,4

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Kementerian Agama, 2011

**Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Pertanahan
Nasional**

Berbagai permasalahan yang terkait redistribusi tanah tidak bisa diatasi hanya oleh BPN karena terkait dengan sektor-sektor lain serta adanya ketidaksinkronan berbagai peraturan terkait pertanahan. Tindak lanjut atau kebijakan yang akan ditempuh yang dapat dilaksanakan oleh BPN untuk memperbaiki berbagai permasalahan di bidang pertanahan diantaranya adalah:

1. Meneruskan penyelenggaraan agenda kebijakan Reforma Agraria secara gradual dan komprehensif.
2. Finalisasi Rancangan Undang-undang di bidang pertanahan serta menindaklanjuti proses pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria menjadi Peraturan Pemerintah.
3. Pemetaan potensi redistribusi yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pelaksanaan redistribusi tanah untuk mendapatkan target obyek redistribusi yang tepat.

Untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui redistribusi tanah, maka pada tahun 2012-2014 ditargetkan agar dilakukan redistribusi tanah yakni sebanyak 182.575 bidang pada tahun 2012, 200.833 bidang pada tahun 2013, dan 220.916 bidang pada tahun 2014.

**Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
Kegiatan
Keluarga
Berencana (KB)**

Penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dilakukan melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan kegiatan prioritasnya adalah:

1. Peningkatan pembinaan ber-KB melalui jalur pemerintah.
2. Peningkatan kesertaan KB di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas), wilayah khusus, dan sasaran khusus.
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi.

Penguatan akses dan kualitas pelayanan program KB, yang ditekankan pada penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan, yaitu dalam rangka pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian KB; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB.

**Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
Kegiatan
Penarikan
Pekerja Anak**

Sejalan dengan meningkatnya jumlah sasaran RTSM/RTM dalam Program PKH, maka sasaran jumlah pekerja anak yang ditarik juga meningkat. Pada tahun 2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menarik 3.360 pekerja anak. Pada tahun 2012, jumlah tersebut meningkat menjadi 10.750 anak. Tahun 2013, dengan sasaran PKH yang menjadi 1,75 juta RTSM di 33 provinsi, maka sasaran PPA-PKH menjadi 17.500 anak. Tahun 2014, sasaran tersebut menjadi 30.000 anak.

Strategi rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program PPA-PKH adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L), terutama antara K/L yang melaksanakan PPA-PKH (Kemenakertrans) dengan K/L yang memberikan layanan satuan pendidikan seperti Kemendikbud dan Kemenag untuk memastikan semua pekerja anak yang ditarik dapat kembali ke satuan pendidikan;
2. Sejalan dengan strategi rencana aksi PKH, meningkatkan koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya, terutama Subsidi Siswa Miskin dan Jamkesmas.

**Peningkatan
Kualitas
Pelaksanaan
Kegiatan
Rehabilitasi
Sosial (Anak,
Lanjut Usia, dan
Orang dengan
Kecacatan)**

Rencana tindak lanjut penyelenggaraan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak 2012-2014 meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan studi kajian dan evaluasi tentang kebutuhan bantuan sosial bagi anak;
2. Advokasi anggaran dan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada proses penyusunan RKP;
3. Memperbaiki penargetan melalui PPLS 2011;
4. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Sosial, PT. POS dan LKSA
5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga donor luar negeri, seperti Unicef, ILO, *Save The Children*, *Plan Indonesia*, Bank Dunia, *British Council*, IOM, dan sebagainya, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan asistensi teknis. Selain itu, upaya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya juga diintensifkan.
6. Penyusunan sejumlah kesepakatan bersama (MoU) antar berbagai K/L, diikuti dengan penyusunan SOP dan aksi bersama, termasuk Rapat Koordinasi Nasional yang ditindaklanjuti hingga di tingkat daerah.

Rencana tindak lanjut pelayanan sosial lanjut usia adalah:

1. Mensinkronkan program bantuan tunai lansia dengan Sistem

Jaminan Sosial Nasional (JSN) terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi seluruh lansia;

2. Melaksanakan studi kebijakan dan evaluasi mengenai pelayanan sosial lansia non bantuan tunai, seperti pemberdayaan, layanan *home care* dan *day care*, pelayanan panti;
3. Advokasi anggaran dan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada proses penyusunan RKP;
4. Perluasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan program uji coba serta penambahan jumlah penerima sasaran jaminan sosial lanjut usia.

Rencana tindak lanjut kegiatan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan studi kajian dan evaluasi tentang kebutuhan pelayanan dan bantuan sosial bagi penyandang cacat;
2. Memperbaiki metode pendataan penyandang cacat pada PPLS 2011;
3. Advokasi anggaran dan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada proses penyusunan RKP;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pemberian bantuan sosial bagi orang dengan kecacatan berat;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat untuk mengidentifikasi organisasi sosial yang menangani orang dengan kecacatan eks-kusta.

4.2.2 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 2

Sebagaimana telah digariskan dalam RPJMN 2010-2014, salah satu fokus pembangunan terkait penanggulangan kemiskinan adalah menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, manfaat dan fungsi kelembagaan yang dibangun melalui partisipasi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur dan akses pelayanan dasar, dan integrasi secara selektif program-program pendukung untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah digariskan dalam RPJMN tersebut, dan mempertimbangkan hasil dan temuan beberapa studi evaluasi di atas, maka dalam kurun waktu 3 tahun ke

depan diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai berikut:

1. Memperbaiki desain program dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan, melalui antara lain penguatan kegiatan khusus untuk perempuan kepala keluarga, kelompok masyarakat rentan terkena dampak krisis, dan percepatan pencapaian target-target MDGs yang masih tertinggal.
2. Penguatan integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan reguler antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor planning and budgeting*), pemberian insentif pemerintah daerah untuk memfokuskan berbagai programnya pada pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan perluasan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan penyempurnaan peraturan terkait diharapkan akan dapat mendukung terjadinya sinergi antar program dan efektivitasnya di tingkat masyarakat. Penguatan integrasi perencanaan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi sinergi program-program sektor dan daerah lainnya yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan.
3. Memperbaiki kompetensi dan profesi tenaga pendamping atau fasilitator PNPM Mandiri melalui antara lain sertifikasi, perbaikan pelatihan, dan pengembangan basis data profil dan kinerja fasilitator. Selain itu juga perlu dikembangkan sistem *reward* yang akan memotivasi fasilitator untuk lebih berdedikasi dan berprestasi.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk koordinasi pelaksanaan dan pengembangan sistem pendukung program seperti data dan informasi, supervisi dan monitoring, serta penanganan pengaduan masyarakat. Terkait hal ini, perlu dilakukan pula penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui antara lain dengan membentuk struktur kelembagaan sesuai kebutuhan daerah dan menyusun dan melaksanakan agenda bersama antara kelembagaan terkait di daerah, termasuk perguruan tinggi, LSM, dan CSR.
5. Meningkatkan efektifitas BLM melalui perbaikan kriteria alokasi yang tidak saja mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan wilayah (kecamatan atau desa/kelurahan) seperti yang selama ini digunakan, namun juga memasukkan kriteria tingkat kesulitan wilayah agar keseimbangan biaya dan efektivitas hasil yang didapat lebih baik.

4.2.3 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 3

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Klaster 3 akan ditangani melalui optimalisasi dan perbaikan kegiatan-kegiatan prioritas melalui strategi: (1) meningkatkan akses ke permodalan, khususnya bagi usaha mikro dan kecil; (2) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM; (3) meningkatkan akses pemasaran; (4) meningkatkan kualitas produksi; dan (5) penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, kebijakan untuk mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan tidak hanya mencakup program KUR dan upaya peningkatan akses kepada sumber-sumber permodalan, namun juga mencakup penguatan kapasitas SDM, produksi, pemasaran dan kelembagaan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut di atas, beberapa langkah tindak lanjut yang masih perlu dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di Klaster 3 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada (i) informasi mengenai sumber dan skema pembiayaan, termasuk skema pembiayaan melalui *linkage*; (ii) bantuan permodalan; dan (iii) layanan pendampingan keuangan yang disediakan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).
2. Pengembangan database sumber-sumber permodalan, terutama database lembaga keuangan mikro, serta database UMK yang sudah menerima hak atas tanah (SHAT) dan berhasil mengakses pembiayaan.
3. Peningkatan jangkauan program KUR yang didukung penyediaan pendampingan bagi koperasi dan UMKM di sektor hulu dan industri kecil untuk dapat mengakses KUR.
4. Penguatan wirausaha pemula untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, melalui pemasyarakatan, pelatihan dan pendidikan yang didukung penyediaan modal awal (*start-up capital*).
5. Dukungan bagi peningkatan produksi dan akses pemasaran melalui pemberian insentif bagi usaha mikro dan kecil dalam penerapan teknologi tepat guna, serta revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi.
6. Peningkatan kualitas kelembagaan dan anggota koperasi melalui penguatan organisasi dan kinerja usaha, yang didukung diklat, penyuluhan perkoperasian dan bimbingan

penguatan kelembagaan dan usaha.

Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendukung usaha mikro dan kecil untuk tumbuh menjadi usaha yang memiliki daya tahan yang tinggi sehingga mempunyai kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Rincian dari langkah-langkah tindak lanjut tersebut di atas dapat dilihat pada Bab V.

4.2.4 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Klaster 4

Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan/penghunian dari rumah yang terbangun, berikut ini arah kebijakan penyediaan rumah sangat murah dan murah tahun 2011:

1. Kesesuaian antara *demand dan supply*

Kriteria *Demand*

- a. Penentuan kelompok sasaran menggunakan prinsip tanggap kebutuhan (*demand responsive*).
- b. Kelompok sasaran diidentifikasi melalui pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- c. Penanganan setiap kelompok sasaran akan disesuaikan dengan penghasilan yang memungkinkan kelompok sasaran tersebut mengakses perbankan (*bankable*).
- d. Penanganan kelompok sasaran rumah sangat murah mencakup masyarakat yang tidak terjangkau dengan perbankan (*non-bankable*).

Kriteria *Supply*

- a. Rumah sangat murah memiliki konsep rumah berbasis keswadayaan masyarakat, dengan kriteria semi permanen, menggunakan bahan lokal, dan kearifan lokal untuk desain rumah.
 - b. Fasilitasi pembangunan rumah murah dilakukan melalui pembangunan PSU Kawasan dan pemberian bantuan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
 - c. Memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan jarak terhadap pusat aktivitas.
 - d. Keterpaduan dengan penyediaan PSU (listrik, air minum, sanitasi, jalan, sarana sosial, sarana ekonomi).
2. Pelaksanaan kegiatan sedapat mungkin berbasis masyarakat (tidak sepenuhnya *top-down*). Penjaringan dan verifikasi demand dari masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga/forum keswadayaan masyarakat (sedapat mungkin

memanfaatkan lembaga yang telah terbentuk).

3. Pembentukan Tim Pengarah (*Steering Committee*) di tingkat nasional ditujukan untuk menjamin keterpaduan/sinergi Program Rumah Murah dan Sangat Mudah dengan program/kegiatan lainnya yang mendukung seperti penyediaan PSU (listrik, air minum, sanitasi, jalan, sarana sosial, sarana ekonomi), kredit mikro perumahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Lokus Program Rumah Murah dan Sangat Murah mencakup rumah untuk nelayan (mendukung Program peningkatan kehidupan nelayan), rumah untuk masyarakat daerah tertinggal, dan rumah untuk masyarakat miskin perkotaan (mendukung Program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan).

Kebijakan untuk penyediaan air bersih untuk rakyat adalah peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap:

1. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak melalui penyediaan perangkat peraturan, memastikan ketersediaan air baku air minum, meningkatkan kinerja manajemen penyelenggara penyedia/operator, mengembangkan alternatif sumber pendanaan; dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta.
2. Penyediaan air minum layak sesuai target MDG's melalui: (a) pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; (b) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan dan saluran pembawa air baku; (c) prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Kebijakan tersebut didukung dengan prinsip-prinsip:

1. *No fully top-down approach* (tetap mengakomodasi pendekatan tanggap kebutuhan).
2. Keseimbangan suplai dan demand termasuk penciptaan *enabling environment*, yaitu dengan penyediaan pilihan teknologi yang dapat diaplikasikan bagi daerah-daerah khusus, misalnya aplikasi teknologi tepat guna seperti *rain harvesting* untuk melayani daerah perdesaan, daerah rawan air, dan terpencil dan penyediaan suplai guna memenuhi pelayanan 100 persen pada tahun 2025.
3. Peningkatan layanan sanitasi dalam rangka pengamanan air baku air minum.

4. Implementasi sesuai dengan kerangka regulasi yang ada saat ini (PP 38/2007, UU 4/2004 tentang SDA, SKB Menteri PPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan).

Kebijakan dalam rangka penyediaan tenaga listrik adalah:

1. Meningkatkan program diversifikasi energi primer dalam pembangkit tenaga listrik.
2. Mengembangkan iklim investasi dan pendanaan dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
3. Meningkatkan efisiensi tenaga listrik.
4. Menerapkan peningkatan pemanfaatan komponen dalam negeri.

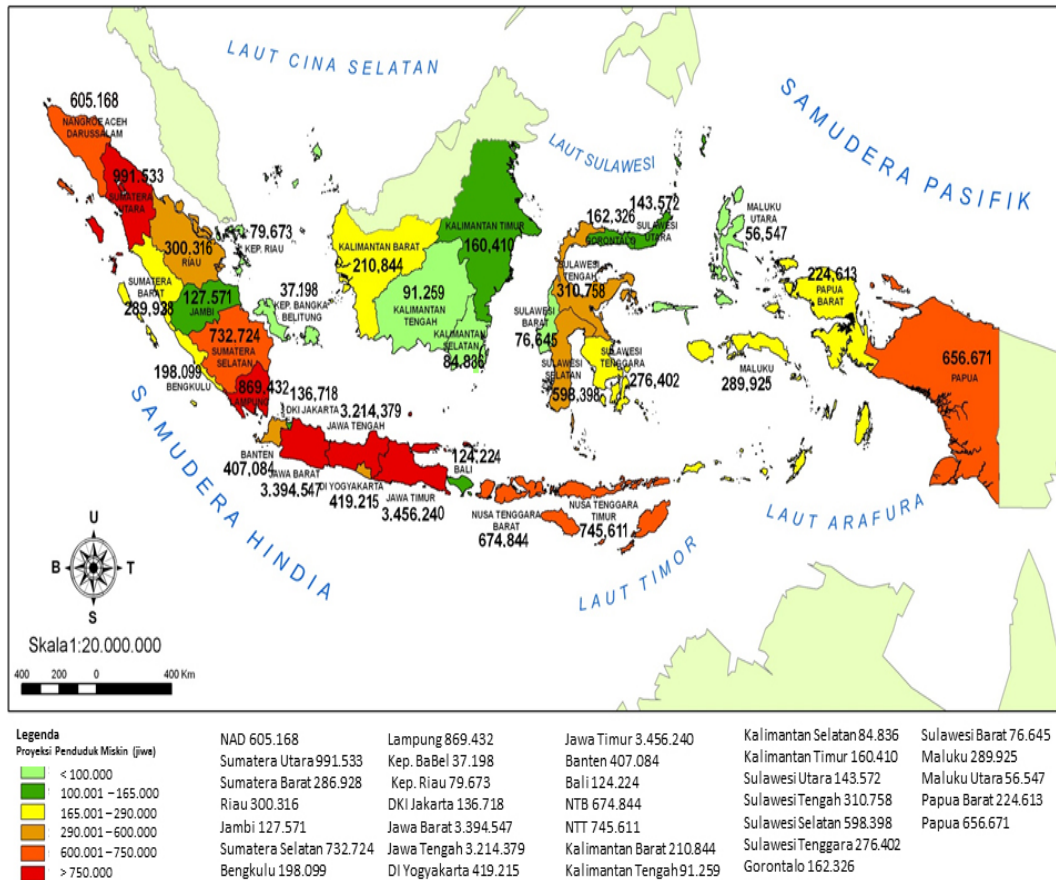
Untuk peningkatan kehidupan nelayan, arah kebijakannya tercakup dalam arah kebijakan peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan, yang akan difokuskan pada:

1. Peningkatan akses nelayan dan kelompok nelayan ke permodalan dan input produksi lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan nelayan dalam berusaha.
2. Penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.
4. Pemberian perlindungan kepada nelayan untuk meningkatkan ketahanan nelayan terhadap perubahan iklim dan cuaca buruk.

4.3 Strategi Khusus

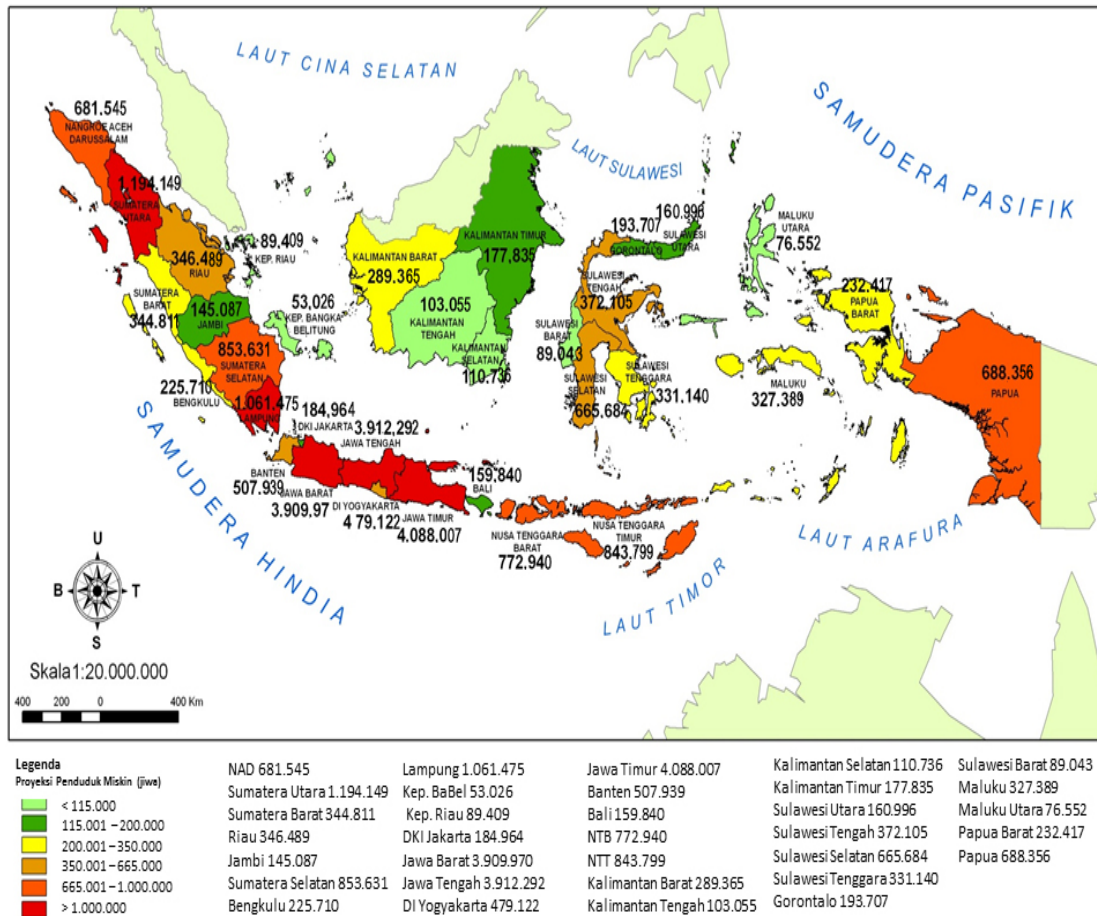
Perlu disadari bahwa kemiskinan terjadi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia, seperti di pulau Jawa dan Sumatera, karena terpusatnya penduduk di kedua pulau ini, memiliki penduduk miskin yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya, masing-masing diproyeksikan masih memiliki jumlah penduduk miskin di atas 3 juta jiwa pada tahun 2014. Bahkan bila pelaksanaan MP3EI berjalan sesuai skenario optimis, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut masih tetap besar (lihat gambar 14). Apabila pelaksanaan MP3EI berjalan secara moderat, setidaknya Provinsi Jawa Timur akan memiliki penduduk miskin lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2014 (lihat gambar 15).

Gambar 14.
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi
berdasarkan skenario Optimis Tahun 2014



Daerah lainnya yang masih akan menjadi kantong kemiskinan meskipun seluruh pelaksanaan MP3EI berjalan sesuai skenario optimis antara lain adalah Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, yang diproyeksikan akan memiliki penduduk miskin antara 600.000 sampai dengan 745.000 jiwa, (lihat gambar 14). Apabila pelaksanaan MP3EI berjalan secara moderat, provinsi-provinsi ini akan memiliki penduduk miskin antara 680.000 sampai dengan 770.000 jiwa pada tahun 2014 (lihat gambar 15).

Gambar 15.
Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi
berdasarkan skenario Moderat Tahun 2014



Untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka program-program perlindungan dan bantuan sosial yang ada perlu dipastikan efektivitasnya untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS), diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif dan memadai, khususnya bagi masyarakat miskin.

Penggunaan basis data terpadu sebagai acuan sasaran, pemutakhiran dan verifikasi data di tingkat lokal, penajaman ketepatan sasaran (*targeting*) di setiap program, monitoring terhadap ketepatan waktu penyaluran dan jumlah bantuan, ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar, hingga *safeguarding* atau supervisi dan pengendalian pelaksanaan setiap program terkait menjadi kunci untuk untuk menjamin efektifitas program dan keberhasilannya dalam menangani keluarga miskin secara komprehensif. Bila berbagai program perlindungan sosial telah terlaksana secara optimal, maka tahap

berikutnya adalah membantu penduduk miskin dan dekat miskin untuk mendapatkan penghidupan secara mandiri. Dengan kata lain penciptaan program-program yang membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha perlu terus dikembangkan agar pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus berlanjut.

Sementara itu, terdapat daerah yang jumlah penduduknya relatif lebih kecil, namun tingkat kemiskinannya tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin di daerah-daerah Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat dan Maluku yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Dengan perbedaan karakteristik kemiskinan di atas, maka penanganan kemiskinan di Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada pola kebijakan yang sama atau seragam di semua wilayah, namun perlu strategi khusus agar permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan tidak saja sesuai dengan kondisi ekonominya, namun juga kondisi sosial, budaya, dan wilayahnya.

Untuk mengetahui dampak pelaksanaan MP3EI terhadap penurunan kemiskinan, dilakukan proyeksi penurunan kemiskinan hingga 2014 dalam setiap koridor MP3EI. Dari proyeksi penurunan kemiskinan, terlihat bahwa terdapat daerah-daerah yang perlu perhatian khusus terutama pada koridor Papua-Maluku. Tingkat kemiskinan di daerah ini, bahkan bila pelaksanaan MP3EI berjalan sesuai skenario optimis, masih akan berada pada kisaran di atas 22 persen, jauh di atas tingkat kemiskinan nasional yang diproyeksikan turun menjadi 8,4 persen pada skenario optimis.

Tantangan utama dari pembangunan pada koridor ini adalah rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dan keterjangkauan daerah-daerah industri dari kantong-kantong penduduk miskin yang banyak tersebar di daerah-daerah terpencil. Sementara sebagian penduduk miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan adanya kesempatan kerja yang lebih besar dari industri pertambangan dan *food estate* yang menjadi fokus MP3EI di koridor ini, sebagian penduduknya masih akan berada di sekitar garis kemiskinan. Penduduk hampir miskin adalah mereka yang rentan terhadap berbagai guncangan (*shocks*) seperti antara lain gejolak harga, sakit, kematian, krisis ekonomi, atau dampak perubahan iklim.

Untuk penanganan kemiskinan di daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus ini perlu diupayakan berbagai terobosan peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta kebijakan afirmatif (*affirmative*

action) dari berbagai program pembangunan, baik pusat, daerah, maupun swasta dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mengarahkan target program dan kegiatan, serta anggaran dan sumber pembiayaan lainnya untuk mensasar daerah dan kelompok masyarakat miskin sesuai kebutuhan dan kondisi ketertinggalannya. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang terisolir dan terpencil, dan keterbatasan pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar di wilayah tersebut, penguatan kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kemiskinan dan mengembangkan ekonomi di tingkat lokal menjadi salah satu kunci untuk pengurangan kemiskinan.

Skenario penurunan tingkat kemiskinan pada setiap koridor dapat dilihat pada tabel 26 di bawah ini:

Tabel 26.
Proyeksi Kemiskinan per Koridor Tahun 2012-2014

PROVINSI	Tingkat Kemiskinan (%)											
	(Skenario Optimis)						(Skenario Moderat)					
	Miskin			Hampir Miskin			Miskin			Hampir Miskin		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
KORIDOR SUMATERA	10.14	8.75	7.36	9.85	9.22	8.70	10.61	9.58	8.74	10.16	9.67	9.27
KORIDOR JAWA	11.11	9.87	8.38	10.61	9.99	9.43	11.56	10.67	9.92	10.78	10.52	9.90
KORIDOR BALI-NUSA TENGGARA	15.40	13.70	11.88	11.86	11.39	11.00	16.22	14.74	13.66	11.94	11.56	11.35
KORIDOR KALIMANTAN	5.68	4.74	3.87	8.71	7.91	7.00	6.08	5.26	4.81	8.89	8.41	7.95
KORIDOR SULAWESI	11.90	10.21	8.78	10.87	10.55	9.78	12.34	11.20	10.15	11.04	10.81	10.45
KORIDOR PAPUA-MALUKU	26.07	23.84	22.05	12.13	12.32	11.76	26.92	25.46	23.80	12.00	11.98	12.30

Catatan: Pada Koridor Papua-Maluku, angka yang diberi pewarna kuning menunjukkan adanya peningkatan pada persentase masyarakat yang masuk kategori hampir miskin.

Selain sinergi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, dan peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah-wilayah sulit juga memerlukan penanganan khusus. Secara kelembagaan telah terbentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diharapkan dapat menjadi katalis proses pembangunan daerah melalui fasilitasi perencanaan, penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan di kedua provinsi tersebut. Pembelajaran selama ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah ini membutuhkan penanganan khusus yang tidak dapat mengikuti mekanisme dan prosedur reguler,

seperti misalnya mobilisasi alat berat dan fasilitator serta penyaluran bantuan yang memerlukan waktu yang lebih lama atau biaya yang lebih besar. Untuk itu, UP4B perlu diberikan tidak hanya wewenang koordinatif tetapi juga keleluasaan melakukan eksekusi kebijakan seperti pola yang pernah diterapkan pada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) untuk pasca-tsunami Aceh agar berbagai kebuntuan dan permasalahan yang menghambat dapat diselesaikan.

4.4 Keterkaitan Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan Prioritas Nasional Bidang Lainnya

Berbagai strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai program pemerintah yang tercantum dalam amanat prioritas pembangunan nasional. Beberapa prioritas nasional yang sangat terkait dengan pelaksanaan kemiskinan antara lain adalah:

1. Prioritas Nasional 2 (Bidang Pendidikan) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Prioritas Nasional mengamanatkan agar pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: i) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan ii) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Dalam Prioritas Nasional ini Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, dan Program Pendidikan Islam bersentuhan langsung dengan Program Subsidi Siswa Miskin (BSM) yang dikelola pada Klaster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan.
2. Prioritas Nasional 3 (Bidang Kesehatan) yang bertujuan untuk membangun bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015. Dalam Prioritas Nasional ini:
 - a. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, terutama Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

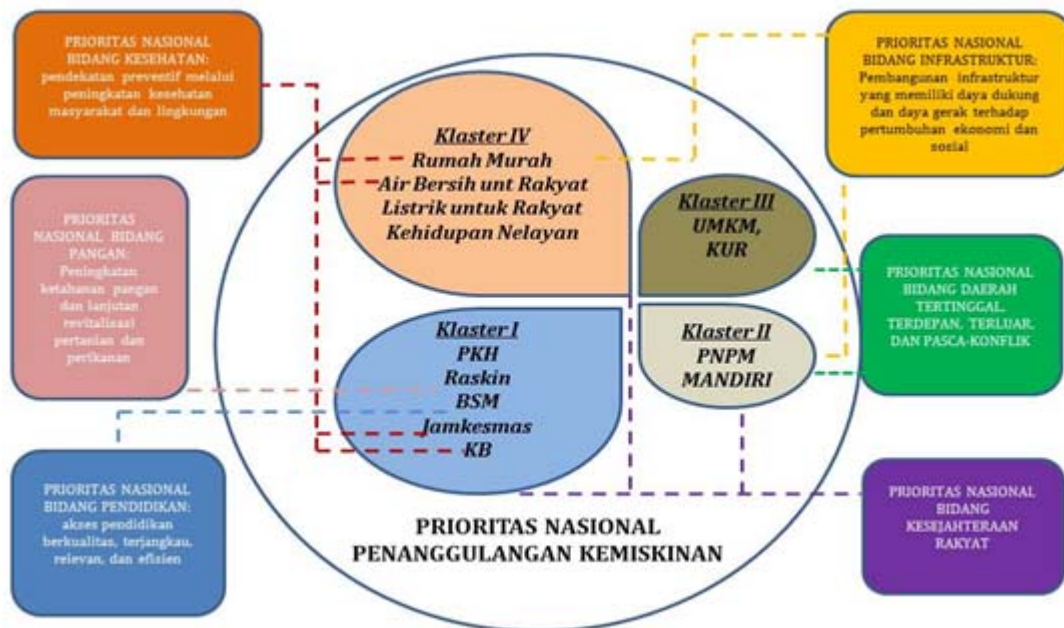
Reproduksi berhubungan langsung dengan Program KB yang dikelola pada Klaster 1.

- b. Program Pembinaan Upaya Kesehatan berhubungan langsung dengan Program Jamkesmas dan Jampersal yang dikelola pada Klaster 1.
 - c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terutama Kegiatan Penyehatan Lingkungan berhubungan erat dengan pelaksanaan Program Air Bersih untuk Rakyat yang dikelola oleh Klaster 4 dan PNPM Sanimas yang dikelola pada Klaster 2.
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang memfokuskan pada peningkatan kualitas air minum dan sanitasi amat berhubungan erat dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri yang dikelola pada Klaster 2.
 - e. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki tujuan yang luas, yaitu pengendalian jumlah penduduk. Secara khusus Program KB yang dikelola pada Klaster 1 mensasar kalangan miskin agar dapat mengikuti program KB dengan subsidi dari pemerintah.
3. Prioritas Nasional 5 (Bidang Pangan) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi pertanian dan perikanan demi terwujudnya kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- a. Kegiatan Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat yang bertujuan melindungi lahan pertanian pangan untuk keberlanjutan pasokan pangan amat berhubungan erat dengan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional yang dikelola pada Klaster 1.
 - b. Keberhasilan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sangat diharapkan untuk berperan dalam kerangka Strategi Makro Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini karena kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok akan mulai berkurang sehingga subsidi pemerintah dalam Program Raskin yang dikelola oleh Klaster 1 dapat sedikit demi sedikit dikurangi tanpa beresiko mengurangi kemampuan masyarakat untuk menyediakan bahan pangan pokok di setiap rumah tangga, terutama rumah tangga miskin.

4. Secara umum, Prioritas Nasional 6 (Bidang Infrastruktur) yang bertujuan untuk membangun infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan Klaster 4, yaitu Program-Program Pro Rakyat.
 - a. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman amat berhubungan dengan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman berhubungan erat dengan PNPM Perumahan dan Permukiman yang dikelola pada Klaster 4
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Baru Swadaya dan Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya berhubungan erat dengan Pelaksanaan PNPM Mandiri yang dikelola pada Klaster 2.
5. Prioritas Nasional 10 (Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik) bertujuan mengutamakan menjamin agar pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik tetap terjadi. Prioritas Nasional ini amat erat kaitannya dengan Penanggulangan Kemiskinan karena umumnya daerah-daerah ini dihuni oleh penduduk yang miskin atau termiskinkan karena situasi dan kondisi.
 - a. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Kegiatan Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Daerah Tertinggal amat berhubungan dengan pelaksanaan Klaster 3.
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah melalui Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu dilaksanakan berkoordinasi dengan pelaksanaan PNPM PISEW yang dikelola pada Klaster 2.
6. Secara umum Prioritas Nasional Bidang Kesejahteraan Rakyat berhubungan dengan seluruh kegiatan dalam Prioritas Nasional Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Beberapa Program dan Kegiatan yang secara khusus terkait adalah:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berhubungan erat dengan Kegiatan PNPM Pariwisata yang dikelola pada Kluster 2.
- b. Program Perlindungan Anak yang berhubungan erat dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan Penarikan Pekerja Anak yang dikelola pada Kluster 1.

Gambar 16.
Keterkaitan Prioritas Nasional Bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Prioritas Lainnya



BAB V RENCANA AKSI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Penjelasan Matriks Rencana Aksi RAN-PPK 2012-2014 disajikan dalam bentuk matriks dengan delapan kolom, yaitu: 1) Program; 2) Kegiatan; 3) Hambatan; 4) Tindakan/Aksi; 5) Indikator; 6) Target; 7) Anggaran; dan 8) Instansi Pelaksana. Kolom-kolom tersebut merupakan penjabaran dari 5 (lima) fokus prioritas arah kebijakan lainnya yang dijelaskan pada Buku II RKP 2012.

Tabel 27.
Penjelasan Matriks RAN-PPK 2012-2014

Kolom	Penjelasan
1	Program Program merupakan penjabaran dari fokus prioritas arah kebijakan lainnya yang dijelaskan pada Buku II RKP 2012.
2	Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran dari program.
3	Hambatan Hambatan merupakan penjabaran kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan.
4	Tindakan/Aksi Tindakan/aksi sebagai langkah dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada dalam setiap program/kegiatan.
5	Indikator Hasil diperoleh dari setiap program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang direncanakan.
6	Target Target merupakan sasaran perolehan yang diharapkan dari setiap program dan setiap kegiatan.
7	Anggaran Sumber pendanaan menjelaskan anggaran kegiatan berasal dari APBN atau sumber pendanaan lainnya.
8	Instansi Pelaksana Instansi yang melaksanakan kegiatan (kementerian/lembaga terkait).

5.2 Ringkasan Rencana Aksi

Secara ringkas RAN-PPK 2012-2014, dapat disajikan melalui intisari sebagai berikut: Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RAN-PPK 2012-2014 adalah sebanyak 60 kegiatan per tahun, dengan rincian untuk klaster 1 sebanyak 23 kegiatan, klaster 2 sebanyak 12 kegiatan, klaster 3 sebanyak 17 kegiatan, dan klaster 4 sebanyak 9 kegiatan. Usulan pendanaan RAN-PPK 2012-2014 sebesar Rp.200, trilyun, dengan rincian tiap tahunnya adalah tahun 2012 sebesar Rp. 55,38 trilyun, 2013 sebesar Rp. 70,78 trilyun, dan 2014 sebesar Rp. 73,89 trilyun. Sementara, untuk rincian tiap klasternya dijabarkan oleh tabel 28 sebagai berikut:

Tabel 28.
Ringkasan Anggaran RAN-PPK 2012-2014

Klaster	Pendanaan (trilyun rupiah)		
	2012	2013	2014
Klaster I <i>Bantuan dan Jaminan Sosial</i>	31,65	34,42	36,22
Klaster II <i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)</i>	15,52	16,09	16,50
Klaster III <i>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	2,15	2,28	2,32
Klaster IV <i>Program-Program Pro-Rakyat</i>	6,06	17,99	18,85
Sub Total	55,38	70,78	73,89
Total 2012-2014	200,05		

Catatan: Total alokasi pada Klaster 1 untuk tahun 2014 belum termasuk Asuransi Kesehatan

Usulan pendanaan yang paling banyak terdapat pada kegiatan Raskin, yaitu sebesar 15,607 trilyun pada tahun 2012. Ini sejalan dengan strategi kebijakan makro yaitu pengendalian harga bahan pangan pokok untuk mengendalikan inflasi pada garis kemiskinan. Usulan pendanaan terbanyak berikutnya adalah pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 4,935 trilyun, 2013 sebesar Rp. 5,779 trilyun, dan Rp. 6,322 trilyun untuk 2014. Pada tahun 2014, pemerintah akan mulai meleburkan program Jamkesmas dan Jampersal menjadi program Asuransi Kesehatan. Jumlah premi yang akan dibayarkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin mencapai 36,9 trilyun.

Hal ini menggambarkan bahwa prioritas kegiatan ditujukan untuk peningkatan kualitas kesehatan terutama pada masyarakat miskin yang mengacu pada klaster 1 yaitu kegiatan bantuan sosial. Kegiatan yang mendapatkan alokasi pendanaan terbanyak berikutnya adalah Program Rumah Sangat Murah dan Murah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp. 817 milyar pada 2012, Rp. 5,807 trilyun pada 2013, dan Rp. 6,790 trilyun pada 2014. Disertai dengan adanya Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga banyak mendapatkan alokasi pendanaan sebesar Rp. 800 milyar pada 2012, Rp. 6 trilyun pada 2013, dan Rp. 6 trilyun pada 2014. Hal ini juga menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran yang besar juga terjadi di klaster 4 terkait adanya Direktif Presiden mengenai klaster 4 Program Rumah Murah dan Sangat Murah.

5.3 Matriks Rencana Aksi

5.3.1 Rencana Aksi Klaster 1

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Tunai Bersyarat	Proses penargetan, validasi, dan verifikasi komitmen peserta PKH belum optimal	Penyempurnaan proses penentuan sasaran (<i>targeting</i>) melalui pengembangan metode penargetan dan memaksimalkan mekanisme pendataan yang disediakan oleh BPS (PPLS 2011 dan Survey Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP))	Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH (RTSM)	1.516.000	2.400.000	3.000.000	2.084,90	3.390,00	4.237,50	Kementerian Sosial
			Menyempurnakan proses verifikasi kepatuhan peserta PKH									
			Sistem pengaduan masyarakat, prosedur dan tindak lanjut pengaduan belum berjalan dengan baik	Menyediakan bantuan Teknis untuk mendukung organisasi pelaksana PKH (UPPKH Pusat), termasuk memperbaiki fungsi-fungsi yang belum berjalan maksimal (verifikasi, sistem pengaduan, kualitas pelatihan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			Sosialisasi belum berjalan optimal	Mengalihkan pelaksanaan sosialisasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Kementerian Sosial untuk meningkatkan efektivitas								
				Meningkatkan sosialisasi terhadap peserta PKH untuk meningkatkan kepatuhan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan								
			Koordinasi antar instansi belum berjalan maksimal	Meminta TNP2K sebagai koordinator implementasi untuk mendukung koordinasi lintas sektor terkait PKH								
			Di beberapa tempat masih terjadi keterlambatan pembayaran bantuan PKH	Menyempurnakan proses dan ketepatan pembayaran melalui berbagai mekanisme pembayaran bantuan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan rekening giro/ tabungan								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			Dukungan sarana dan prasarana Pemda belum optimal	Menyempurnakan strategi sosialisasi terhadap masyarakat luas dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka sehingga dukungan terhadap pelaksanaan program dapat diberikan								
			Masih banyak penerima PKH yang belum dapat mengakses program bantuan sosial lainnya, misalnya Subsidi Siswa Miskin, Jamkesmas, Raskin	Meningkatan koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya, sehingga peserta PKH juga bisa mendapatkan fasilitas Subsidi Siswa Miskin, Jamkesmas dan Raskin								
			Struktur kelembagaan dan peran koordinator wilayah (Korwil) masih belum optimal	Meningkatkan koordinasi antara UPPKH dengan Korwil dan diantara Korwil								
			Kualitas pelatihan personil PKH masih belum maksimal	Mekanisme perekrutan personil PKH yang lebih baik								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
				Peningkatan kapasitas untuk pendamping dan operator								
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	1. Metode pelaksanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial anak belum benar (masih berorientasi pada institusi/panti, metode pemberian bantuan tunai yang kurang tepat); 2. Cakupan bantuan dan layanan sangat kecil; 3. Proses penargetan yang belum baik.	1. Melakukan studi kajian dan evaluasi tentang kebutuhan bantuan sosial bagi anak; 2. Advokasi anggaran dan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada proses penyusunan RKP; 3. Memperbaiki penargetan melalui PPLS 2011;	Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik didalam maupun diluar panti (jiwa)	171.000	234.100	263.000	305,69	421,59	489,41	Kementerian Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
3		Pelayanan Sosial Lanjut Usia	1. Metode pelaksanaan pelayanan sosial pada lansia potensial masih perlu dikembangkan; 2. Cakupan bantuan dan layanan sangat kecil.	1. Mensinkronkan program bantuan tunai lansia dengan SJSN terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi seluruh lansia; 2. Melaksanakan studi kebijakan dan evaluasi mengenai pelayanan sosial lansia non bantuan tunai, seperti pemberdayaan, layanan <i>Homecare</i> dan <i>daycare</i> , pelayanan panti; 3.Advokasi anggaran dan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada proses penyusunan RKP.	Jumlah lanjut usia yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik didalam maupun diluar panti (jiwa)	38.365	45.750	60.240	135,48	161,54	212,73	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
4		Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	1. Metode pelaksanaan pelayanan sosial pada penyandang cacat masih perlu dikembangkan; 2. Pendataan penyandang cacat masih sulit dilakukan; 3. Cakupan bantuan dan layanan sangat kecil.	1. Melakukan studi kajian dan evaluasi tentang kebutuhan pelayanan dan bantuan sosial bagi penyandang cacat; 2. Advokasi anggaran dan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial pada proses penyusunan RKP; 3. Memperbaiki metode pendataan penyandang cacat pada PPLS 2011.	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik didalam maupun diluar panti (jiwa)	51.922	60.180	75.640	223,94	315,82	419,88	
5	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Penyediaan Subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN)	1. Keterlambatan penetapan dan penyaluran Program Raskin 2. Masih terjadi beberapa ketidaktepatan (kuantitas, kualitas, dan harga) dalam penyaluran Program Raskin	1. Menyempurnakan proses penentuan sasaran(targeting) melaluiPPLS 2011; 2. Mengupayakan agar data rumah tangga sasaran berdasarkan data PPLS tidak mengalami keterlambatan dan perubahan pada tengah waktu;	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima RASKIN (15kg beras per RTS selama 12 bulan)	17.488.007	17.488.007*)	17.488.007*)	15.607,00	15.607,00*)	15.607,00*)	Kemenko Kesra/Perum Bulog

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			3. Belum menjangkau seluruh masyarakat miskin	3. Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik pusat dan daerah, pada seluruh tahapProgram Raskin;								
			4. Ketersediaan beras untuk Program Raskin tidak mencukupi di gudang Perum BULOG	4. Menyempurnakan dan lebih mengaktifkan mekanisme dan proses pengaduan terhadap kekurangan Program Raskin;								
			5. Berkembang pembahasan untuk menggunakan bahan pangan lokal, sehingga jenis komoditas pangan tidak harus beras	5. Meningkatkan koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya;								
				6. Mendorong kontribusi Pemda untuk membantu penyediaan bahan pangan bagi masyarakat miskin di daerahnya dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
6	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Pemberian subsidi siswa miskin belum optimal dalam mengurangi angka putus sekolah (<i>DropOut</i>), mengulang kelas, dan lama penyelesaian sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah	Optimalisasi pemberian subsidi siswa miskin untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan	1. Jumlah siswa SD/SDLB penerima subsidi siswa miskin	3.530.305	3.370.200	3.103.210	1.285,00	1.213,27	1.117,16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7		Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	Terbatasnya kapasitas pengelolaan pemberian subsidi siswa miskin		2. Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima subsidi siswa miskin	1.295.450	1.275.840	1.195.700	777,30	701,71	657,64	
8	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA	Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak pemberian Bidik Misi	Peningkatan kapasitas pengelolaan pemberian subsidi siswa miskin di tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan, termasuk pendataan, targeting, dan mekanisme penyaluran	1. Jumlah siswa SMA penerima subsidi siswa miskin	505.290	714.653	800.000	397,70	557,43	624,00	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9		Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK			2. Jumlah siswa SMK penerima Subsidi siswa miskin	617.576	560.358	645.298	485,50	437,08	503,33	
10	Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	Belum tersedianya subsidi siswa miskin transisi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah		Jumlah mahasiswa miskin penerima Bidik Misi	80.000	110.000	140.000	820,00	1.180,00	1.360,00	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
11	Program Pendidikan Islam	Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu	1. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian subsidi siswa miskin, yang meliputi antara lain mencakup proses pendataan siswa miskin, verifikasi, penyaluran dana, dan monitoring dan evaluasi (monev)	Perlunya penyediaan pemberian subsidi siswa miskin transisi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; Perlu dilakukan review terhadap lingkup subsidi siswa miskin yang mencakup tuition, biaya transpor, buku, baju seragam, atau termasuk juga <i>for gone earning</i> ;	1. Siswa miskin MI penerima subsidi siswa miskin	750.000	840.000	840.000	270,00	302,40	302,40	Kementerian Agama
					2. Siswa miskin MTs penerima subsidi siswa miskin	600.000	540.000	540.000	432,00	388,80	388,80	
					3. Siswa miskin MA penerima subsidi siswa miskin	400.000	320.000	320.000	304,00	243,20	243,20	
12		Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	2. Meningkatkan peran <i>Public Private Partnership</i> (PPP) dalam pemberian subsidi siswa miskin	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian subsidi siswa miskin maupun koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya; Peningkatan PPP dalam pemberian subsidi siswa miskin termasuk juga upaya pemetaan dalam rangka pemerataan target.	Mahasiswa miskin penerima subsidi siswa miskin	63.856	59.538	59.538	76,63	71,40	71,40	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
13	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1. Kepesertaan: (a) Belum seluruh penduduk tercakup dalam Jamkesmas; (b) Sumber data masih menggunakan PPLS 2008; (c) Banyak daerah meminta tambahan kuota. 2. Pelayanan Kesehatan: (a) masih terdapat penolakan pasien Jamkesmas dengan alasan kapasitas RS sudah penuh; (b) sistem rujukan belum optimal; (c) belum semua RS menerapkan kendali mutu dan kendali biaya; (d) peserta masih dikenakan urun biaya dalam mendapatkan obat, Alat Medis Habis Pakai (AMHP) atau darah; (e) penyediaan dan	1. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan secara bertahap; 2. Peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; 3. Koordinasi dengan BPS untuk penggunaan data PPLS 2011; 4. Penyediaan pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal) yang mencakup pelayanan ante natal, persalinan, nifas, dan KB	Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	67,50	75,70	80,10	122,00	140,50	152,70	Kementerian Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
14	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan; dan (f) penetapan status kepesertaan 3.Pendanaan Program: (a) teknis penerapan INA-DRGs: (i) belum komprehensifnya pemahaman penyelenggaraan pola pembayaran dengan INA-DRGs yang menye- babkan belum terlaksananya pelayanan yang efisien; (ii) belum semua RS memiliki kode RS dan penetapan kelas RS; dan (iii) belum semua RS pengampu dapat memberikan pembinaan tentang pola pembayaran dengan INA- DRGs; dan (b)	5. Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	9.236	9.386	9.536	1.000,00	1.123,50	1.221,20	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
15		Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	ketidaktepatan waktu mengirimkan pertanggungjawa ban klaim, bahkan beberapa RS belum dapat menggunakan format INA-DRGs.	5.Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	85,00	90,00	95,00	4.935,30	5.779,00	6.322,30	Kementerian Kesehatan
			4. Pengorganisasian Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah: (a) Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Provinsi/ Kab/	6.Peleburan Jamkesmas dan Jampersal ke dalam Program Asuransi Kesehatan mulai Tanggal 1 Januari 2014	Persentase Tempat tidur (TT) kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan jaminan kesehatan	39,00	45,00	51,00				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
16		Asuransi Kesehatan	Kota belum optimal sehingga sosialisasi, advokasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan serta kinerja pelayanan kesehatan masih belum optimal; (b) Beban kerja Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi dan Kab/Kota semakin tinggi dengan adanya daerah-daerah yang melaksanakan Jamkesda dan pemanfaatan tenaga verifikator independen oleh daerah.	7.Pemerintah menanggung premi asuransi sosial kesehatan (paket manfaat dasar) sebesar Rp.40.246/orang/ bulan	Jumlah penduduk yang ditanggung premi asuransinya oleh pemerintah	0	0	76,4 juta	0,00	0,00	36.900,00 **)	BPJS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
17	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	1. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi 2. Sulitnya meningkatkan angka kesertaan ber-KB. Penggunaan kontrasepsi lebih banyak pada metode jangka pendek dibandingkan metode kontrasepsi jangka panjang. 3. Terbatasnya kapasitas tenaga lini lapangan KB Sebagai penggerak program KB di tingkat <i>grass root</i>	1. Peningkatan upaya-upaya promosi, advokasi, dan KIE program KKB 2. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah dalam melaksanakan program KKB 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui pemberian alat/obat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta, serta pemenuhan sarana prasarana KB melalui DAK KB	1. Jumlah Peserta KB baru KPS dan KS1 yang mendapatkan alat kontrasepsi (dalam juta)	3,89	3,97	4,05	683,72	676,63	641,00	BKKBN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			4. Lemahnya kelembagaan KB pasca desentralisasi terlihat dari lemahnya komitmen dandukungan daerah terhadap program KKB 5. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi KKB 6. Capaian pemakaian alat dan obat kontrasepsi (alokon)/CPR serta kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) masih terdapat kesenjangan antar tingkat kesejahteraan. CPR kelompok miskin sebesar 53,0%	4. Pelatihan berkala bagi tenaga lini lapangan KB, berupa latihan dasar umum, resfreshing, dan pelatihan teknis, serta pelatihan medis teknis bagi bidan dan dokter 5. Pemberian dukungan operasional bagi tenaga lapangan KB dan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan serta dukungan penyelenggaraan mekanisme perasional program Kependudukan danKB; 6. Telah dikeluarkan UU 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perpres No.62/2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Peraturan Kepala (Perka) BKKBN	2. Jumlah Peserta KB aktif KPS dan KS1 yang mendapatkan alat/obat kontrasepsi (dalam juta)	12,50	12,80	13,10				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
18		Peningkatan Kesertaan KB Galciltas (tertinggal, terpencil, dan perbatasan), Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus	Sedangkan CPR Pada kelompok Kaya sebesar 63,5%. <i>Unmetneed</i> pada kelompok miskin adalah sebesar 12,7% sedangkan <i>unmetneed</i> pada kelompok kaya sebesar 8,2%.	No.72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN; dan Perka BKKBN No.82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi 7. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan KKB 8. Dilakukan survei pendataan keluarga (tahunan) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (3-5 th sekali) 9. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi 10. Promosi dan pergerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk;	1. Jumlah kebijakan, strategidan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat di operasionalkan di daerah galciltas, wilayah khusus, sasaran khusus dan berwawasan gender (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, petakerja)	7	7	7	5,50	5,44	5,16	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
					2. Jumlah mitra Kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus	4	4	6				
19		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			1. Persentase PUS KPS dan KSI anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	74,90 (dari 1.775.000)	75,10 (dari 1.850.000)	75,30 (dari 1.925.000)				
					2. JumlahPUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1,1 jt Peserta KB kelompok usaha ekonomi produktif)	66.000	88.000	110.000				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
					3. Persentase kelompok UPPKS yang mendapatkan pendampingan dalam pembinaan manajemen kewirausahaan	10	10	10				
20		Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi			1. Jumlah frekuensi pelayanan KB <i>mobile</i> di wilayah galciltas (12 kali dalam 1 tahun)	12 kali	12 kali	12 kali	1.321,81	1.308,11	1.239,24	BKKBN Provinsi
					2. Jumlah frekuensi pelayanan KB <i>mobile</i> di wilayah khusus di 33 provinsi	6 kali	6 kali	6 kali				
					3. Persentase komplikasi berat yang dilayani	0,11	0,11	0,11				
					4. Persentase Kegagalan KB yang dilayani	0,03	0,03	0,03				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
					5. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) percontohan	13.000	13.000	13.000				
					6. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) percontohan	6.500	6.500	6.500				
					7. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) percontohan	6.500	6.500	6.500				
					8. Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	90	91	92				
21	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak (Program Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH))	Koordinasi antara Kementerian dan Dinas pelaksana penarikan pekerja anak dengan Kementerian/ Lembaga atau institusi yang memberikan layanan pendidikan formal dan non-	1. Memperkuat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), terutama antara K/L yang melaksanakan PPA-PKH (Kemenakertrans) dengan K/L yang memberikan layanan satuan pendidikan seperti Kemendikbud dan Kemenag untuk	1. Jumlah Pekerja anak yang ditarik dari BPTA	10.750	11.000	11.000	71,20	72,00	72,00	Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			formal dan pelatihan keterampilan belum berjalan efektif	memastikan semua pekerja anak yang ditarik dapat kembali ke satuan pendidikan; 2. Sejalan dengan strategi rencana aksi PKH, meningkatkan koordinasi dengan program bantuan sosial lainnya, terutama Subsidi Siswa Miskin dan Jamkesmas.	2. Persentase pekerja-pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	100	100	100				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
22	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	1. Tidak jelasnya batas kawasan hutan sehingga tanah yang ditetapkan sebagai obyek <i>landreform</i> pada waktu pengukuran di gugat oleh pihak kehutanan; 2. Adanya penetapan kawasan pertambangan yang tumpang tindih dengan yang ditetapkan sebagai obyek <i>landreform</i> dikarenakan tidak adanya koordinasi antara pihak pertambangan dengan pihak BPN;	1. Meneruskan Penyelenggaraan agenda kebijakan reforma Agraria secara gradual dan komprehensif; 2. Finalisasi Rancangan Undang-undang di bidang pertanahan serta menindaklanjuti proses pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Reformasi Agraria menjadi Peraturan Pemerintah. 3. Melakukan pemetaan potensi redistribusi untuk mendapatkan target obyek redistribusi yang tepat pada satu tahun sebelum pelaksanaan redistribusi tanah;	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang)	182.575	200.833	220.916	128,90	141,80	155,90	Badan Pertanahan Nasional

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			3. Kurangnya koordinasi dengan pihak lain sehingga tanah obyek <i>landreform</i> tumpang tindih dengan aset milik TNI, PT. Perkebunan Nusantara, dan sebagainya;	4. Meningkatkan jumlah bidang tanah yang didistribusi untuk mengurangi ketimpangan struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)								
			4. Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi obyek <i>landreform</i> ada yang sudah berubah penggunaannya atau dikuasai oleh pihak lain. Hal ini dapat dikarenakan adanya perubahan penggunaan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah tersebut;									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
			5. Permasalahan lain di lapangan diantaranya: (a) Masih ada tanah-tanah eks-HGU (Hak Guna Usaha) yang disengketakan oleh masyarakat dan bekas pemilik; (b) tanah-tanah obyek <i>landreform</i> yang didistribusikan namun belum digantirugi, (c) penggarap bukan petani dan tidak menguasai tanah tersebut.									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 1												
23	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja***	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Penentuan lokasi padat karya masih belum sepenuhnya didasarkan pada data pengangguran yang tersedia, khususnya hasil survey BPS	1. Meningkatkan penggunaan hasil-hasil survey angkatan kerja yang dilaksanakan oleh BPS setempat sebagai dasar utama penentuan lokasi padat karya	1. Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara (orang)	105.000	90.000	90.000	174,06	174,06*	174,06*	Kemenakertrans
			2. Terbatasnya bantuan sarana usaha khususnya untuk kegiatan padat karya produktif sehingga upaya pengembangan usahanya masih belum optimal	2. Penyelarasan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, khususnya untuk pengembangan usaha	2. Jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara (kab/kota)	360 kab/kota	360 kab/kota	360 kab/kota				
TOTAL ANGGARAN KLASSTER 1									31.652,7	34.417,3	36.222,8	

Keterangan:

*) Jumlah target dan anggaran kegiatan-kegiatan ini pada tahun 2013 dan 2014 akan disesuaikan dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

**) Total anggaran Klaster 1 tahun 2014 belum memperhitungkan program Asuransi Kesehatan.

***) Mulai tahun 2013 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja akan mulai dilaksanakan sebagai bagian dari Klaster 2.

5.3.2 Rencana Aksi Klaster 2

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara (PNPM Perkotaan)	-	-	Keswadayaan Masyarakat	10.948	10.948	10.948	2.017,90	2.017,90	2.017,90	Kementerian PU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)			Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM:							Kementerian Dalam Negeri
			1. Ketersediaan DDUB di daerah	Daerah harus membuat Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)	a. PNPM-MP inti (KEC)	5.102	5.230	5.361	9.597,60	9.647,00	9.647,00	
			2. Terjadinya kekosongan fasilitator sehingga memperlambat kemajuan pelaksanaan program	Melakukan seleksi fasilitator untuk mengisi kekosongan yang ada didaerah								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
			3. Propinsi sulit melakukan lelang EO untuk dana Dekon guna Pelatihan	Satker Pusat melakukan pendampingan dalam mekanisme pelelangan terkait dokumen lelang								
			4. Keterlambatan dalam pencairan dana DDUB/APBD	Penetapan ancar-ancar lokasi dan alokasi sebelum penetapan anggaran daerah paling lambat Januari tahun berikut								
					b. PNPM-MP Penguatan							
			1. Lokasi-lokasi kegiatan yang sangat sulit untuk dikunjungi sehingga proses monitoring dan supervisi terhambat	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah sebelum melakukan supervisi	- PNPM-MP Perbatasan (KEC)	80	80	80	80,00	80,00	80,00	
			2. Sulitnya komunikasi sehingga memperlambat alur pengiriman data dan informasi	Koordinasi lebih intens antara pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi dalam mengirimkan data dan informasi terkait pelaksanaan program								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
			3. Masih kurangnya pemahaman mengenai program PNPM Perbatasan	Melakukan koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah								
			1. Kualitas Musrenbang (Desa dan Kecamatan) masih kurang memadai	Melakukan fasilitasi musrenbang (desa dan kelurahan) lebih intens dan memperkuat kualitas fasilitator pendampingnya	- PNPM-MP Integrasi SP-SPPN (KAB)	85	85	85	369,80	382,80	382,80	
			2. Kualitas Program Pendataan Desa yang masih kurang memadai	Melakukan fasilitasi dalam penyediaan DOK penyusunan RPJMDes, pendampingan penyusunan RPJMDes serta penyediaan manual teknis cara-cara fasilitasi								
			3. Dukungan Pemkab terhadap peningkatan manajemen pemerintahan desa kurang memadai	Mendorong penyelarasan pendekatan perencanaan teknokratis dengan partisipatif Penguatan Musrenbang (Desa dan Kecamatan)								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
			1. Masih kurangnya pemahaman mengenai program PNPM Respek Pertanian antar SKPD di daerah	Melakukan koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut antar SKPD dengan didampingi Satker Pusat	- PNPM Mandiri Respek Pertanian (KEC)	43	43	43	40,90	-	-	
			2. Masih terbatasnya SDM yang ada untuk menunjang pelaksanaan program di daerah	Melakukan Pelatihan, OJT serta IST yang lebih sering								
			3. Lokasi-lokasi kegiatan yang sangat sulit untuk dikunjungi sehingga proses monitoring dan supervisi terhambat	Melakukan koordinasi lebih intens dengan pemerintah daerah sebelum melakukan supervisi								
3		Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	1. Grant Agreement yang terlambat, sehingga mengganggu proses DIPA dan proses perencanaan terutama lokasi baru	Melakukan negosiasi antara Pemerintah RI dengan pihak Bank Dunia	Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi (KEC)	290	290	290	406,40	404,50	404,50	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
			2. Koordinasi dengan lintas sektoral / penyedia layanan (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) dirasakan masih kurang	Melakukan koordnasi dengan pihak sektoral melalui Workshop Bulanan serta Workshop Nasional								
			3. Terjadinya kekosongan fasilitator sehingga memperlambat kemajuan pelaksanaan program	Melakukan seleksi fasilitator untuk mengisi kekosongan yang ada di daerah								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
4		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan Pilot Project Kredit Mikro di 24 Kecamatan di 24 kabupaten Lokasi PNPM PISEW tidak segera mendapatkan persetujuan dari JICA	- Telah Dikirim Surat Pembatalan Kegiatan kepada JICA melalui Executing Agency dan Bappenas, dan telah ditindaklanjuti dengan Permintaan Relokasi kepada JICA oleh kementerian keuangan pada bulan Desember 2010. Saat ini masih dalam review JICA melalui surat No.270/PRJ/06/11 Tanggal 20 Juni Tahun 2011 tentang L/A No. IP-543 <i>Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project</i> (RISE)	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW	9 Provinsi Mengingat adanya perpanjangan pelaksanaan PNPM PISEW sampai tahun 2012 dan adanya rencana RISE II, maka sebagai persiapan akan dilaksanakan kegiatan Lokakarya dan FGD Potensi dan Kebutuhan Keuangan Mikro di 9 provinsi untuk Mengembangkan Wilayah Perdesaan di lokasi PNPM PISEW.	9 Provinsi Hasil yang diharapkan dari Lokakarya dan FGD dimaksud adalah pemberian bantuan BLM Kredit Mikro di 34 Kecamatan di 34 kabupaten Lokasi PNPM PISEW dapat dimplementasikan pada RISE ke II (dua), yang saat ini sedang dalam proses pengusulan/pembahasan untuk dilaksanakan pada tahun 2013 s/d 2014	9 Provinsi	28,15	28,14	-	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
5		Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	-	-	- Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS							
			-	Penguatan Sekretariat Pamsimas	1. Dukungan terhadap kelembagaan Program PAMSIMAS melalui operasional kegiatan, administrasi, pendataan sebanyak 1 Laporan	1 dok laporan			0,91			
			-	Monev program Pamsimas	2. Data perkembangan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan keterlibatan BPMPD dalam Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten terkait Program PAMSIMAS	15 prov			0,37			
			-	Pelatihan Monitoring Kesinambungan	3. Terlatihnya 300 orang SKPD terkait PAMSIMAS dalam 2 Regional (Timur dan Tengah)	300 orang			2,08			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
					dan tersusunnya 2 Laporan dan Dokumen RTL							
			-	Workshop bagi aparat pemerintah tentang perencanaan, keuangan dan monitoring program Pamsimas	4.Terfasilitasi-nya perencanaan, keuangan dan monitoring program terhadap 320 orang <i>stakeholder</i> terkait program Pamsimas dalam 2 regional (barat dan tengah) dan tersusunnya 2 laporan	320 orang			1,55			
			-	Pelatihan Pasca konstruksi Program Pamsimas	5. Terlatihnya 180 orang SKPD terkait PAMSIMAS dalam 3 Regional barat dan tersusunnya 1 Laporan dan Dokumen RTL	180 orang			0,85			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
			-	Workshop Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tingkat Desa	6. Terlatihnya 3300 orang di 15 Provinsi 110 Kabupaten/ Kota masing-masing 10 Desa dan tersusunnya 4 laporan dan dokumen RTL	15 provinsi 110 kab/kota			10,36			
			-	TOT Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tingkat Desa Program PAMSIMAS	7.Terfasilitasiny a penguatan kelembagaan terhadap 170 orang aparat BPMPD dari 15 prov. 110 kab/kota sebanyak 1 angkatan dan tersusunnya 1 Laporan	170 orang			1,66			
			-	-	- Cakupan PNPM-LMP							
			-	1. Pelatihan GOI lebih sering dilakukan; 2. Pelatihan dan Kegiatan Bersama dengan Tim Koordinasi lebih sering dilakukan ;	1.Terlaksananya pelatihan GOI di lokasi PNPM LMP ; 2.Terlaksananya pelatihan dan rapat koordinasi bersama dengan Tim	26 kab			80,80			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman	Untuk Tahun 2013-2014, diperlukan pinjaman baru yang usulannya telah dicantumkan dalam <i>Blue Book</i> . Namun demikian jumlah usulan anggaran yang tercantum dalam <i>blue book</i> belum sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan . Hal itu terjadi karena secara umum, pagu PHLN Kemen PU tidak mencukupi untuk menampung usulan kebutuhan yang sesungguhnya.	Ditjen. Ciptakarya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku <i>Executing Agency</i> perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan revisi anggaran pada blue book	1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi	237 kec	237 kec	237 kec	536,50	540,0	540,0	Kementerian Pekerjaan Umum
					2. Jumlah KSK yang dilayani oleh infrastrutktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (PISEW)	34 kab	34 kab	34 kab				
7		Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP & RIS)			Jumlah desa yang mendapatkan bantuan fasilitasi dari RIS atau PPIP	2.600	3.000	2.103	862,50	450,0	450,0	Kementerian Pekerjaan Umum
8	Program Bina Pembangunan Daerah	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu			Terfasilitasinya Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE	9 prov. 34 kab.	9 prov. 34 kab.	9 prov. 34 kab.	31,09	30,00	30,00	Kementerian Dalam Negeri

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
9	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan	-	-	Infrastruktur air limbah	51 kab/kota	61 kab/kota	66 kab/kota	525,70	957,00	1.172,00	Kemen PU
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)	-	-	1. Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi	2.0	2.0	2.0	2,40	2,52	2,64	Kementan
			-	-	2. Optimasi dan Pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian	300 LKM-A	350 LKM-A	400 LKM-A	7,26	9,62	10,00	
			-	-	3. Penguatan modal Gapoktan PUAP	7.000	10.000	10.000	753,00	1.183,41	1.221,58	
			-	-	4. Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2,00	2,10	2,20	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 2												
11	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengemba-ngan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik	Rendahnya koordinasi para <i>stakeholder</i> dalam peningkatan peluang investasi swasta di daerah tertinggal Belum tersedianya infrastruktur pendukung investasi swasta di daerah tertinggal Rendahnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi terciptanya investasi di daerah tertinggal Belum tersedianya data terkait peluang-peluang investasi di daerah tertinggal.	Peningkatan koordinasi para <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan peluang investasi swasta di daerah tertinggal Penyediaan infrastruktur yang mendukung investasi di daerah tertinggal Optimalisasi pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penciptaan investasi di daerah tertinggal Penyediaan data-data pendukung dalam rangka penyusunan peluang-peluang investasi di daerah tertinggal.	Jumlah kabupaten yang mendapatkan stimulan infrastruktur pendukung investasi untuk percepatan pembangunan Jumlah kabupaten yang mendapatkan stimulan untuk peningkatan kapasitas pengembangan investasi daerah Jumlah kabupaten tertinggal yang mempunyai basis data investasi di daerah	0 kab	75 kab	75 kab	42,30	270,00	450,00	KPDT
12	Pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan PNPM Mandiri Pariwisata	-	-	Jumlah desa wisata	978	700	822	121,45	90,00	97,20	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
TOTAL ANGGARAN KLASTER 2									15.523,53	16.094,99	16.507,82	

5.3.3 Rencana Aksi Klaster 3

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
Fokus: Peningkatan Akses ke Permodalan									2.085,17	2.181,06	2.209,88	
1	Program Penempatan Modal Negara dalam rangka mendukung program KUR	Dukungan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *)	-	-	Presentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	100	100	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	KemenKeu
2	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Koordinasi Kebijakan KUR	-	-	Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasi	70	75	80	1,50	1,10	1,20	Kemenko Perekonomian
3	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM	Kurang optimalnya layanan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha	Peningkatan kapasitas lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha	(1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha	100 KSP/KJKS	100 KSP/KJKS	100 KSP/KJKS	0,50	1,01	1,08	Kemen KUKM
			Masih belum optimalnya skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil	Penyusunan konsep pengembangan dan bimbingan teknis untuk skema pendanaan bagi usaha mikro dan kecil	(2) Fasilitasi pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil	1 Skim	1 Skim	1 Skim	0,52	0,36	0,38	Kemen KUKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
4	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Kurangnya sosialisasi peluang akses kredit/ pembiayaan bank melalui <i>linkage</i>	Sosialisasi peluang akses kredit/pembiayaan bank melalui <i>linkage</i>	(1) Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat meng- akses kredit/ pembiayaan bank melalui <i>linkage</i>	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	0,35	0,39	0,42	Kemen KUKM
			Kurang optimalnya penyediaan bantuan dana bagi koperasi perkotaan dan perdesaan	Penyaluran bantuan, perbaikan kriteria dan proses seleksi koperasi perkotaan dan perdesaan	(2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana	1.250 Koperasi	2.000 Koperasi **)	2.500 Koperasi **)	62,50	100,00	125,00	Kemen KUKM
			Masih rendahnya kemauan pelaku usaha mikro pemula untuk membayar layanan pendampingan keuangan dari KKMB	Sosialisasi dan temu konsultasi bagi koperasi dan UMK untuk memanfaatkan jasa KKMB	(3) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan	50 Koperasi 100 UMK	50 Koperasi 100 UMK	50 Koperasi 100 UMK	0,35	0,56	0,60	Kemen KUKM
			-	-	(4) Jumlah koperasi yang menyalurkan <i>start up capital</i> bagi wirausaha pemula		10 koperasi/ 2000 UMi	10 koperasi/ 2000 UMi		55,00	55,00	Kemen KUKM
5	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM	Kurangnya data- data lembaga keuangan mikro yang aktif memberikan kredit/	Pengembangan database lembaga keuangan mikro yang aktif memberikan kredit/pembiayaan	(1) Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan	100 LKM	100 LKM	100 LKM	0,70	0,78	0,83	Kemen KUKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
			pembiayaan bagi koperasi dan UMKM	bagi koperasi dan UMKM	kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM							
6	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM	-	-	(1) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD	2 Provinsi/ 2 PPKD	2 Provinsi/ 2 PPKD	2 Provinsi/ 2 PPKD	0,30	0,59	0,62	Kemen KUKM
			-	-	(2) Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan <i>co-guarantee</i> dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional	2 Provinsi, 2 PPKD	2 Provinsi, 2 PPKD	2 Provinsi, 2 PPKD	0,30	0,88	0,93	Kemen KUKM
			Belum adanya database UMK yang layak untuk diseleksi mendapatkan SHAT	Penyusunan database UMK yang sudah diseleksi untuk mendapatkan SHAT	(3) Jumlah UMK yang telah diseleksi untuk mendapatkan sertifikasi hak atas tanah (SHAT)	20.000 UMK	20.000 UMK	20.000 UMK	0,30	0,18	0,20	Kemen KUKM
			Belum efektifnya hasil pemberian SHAT dalam rangka meningkatkan akses UMK kepada pembiayaan	Pemantauan dan penyusunan database UMK penerima SHAT yang sudah mengakses pembiayaan	(4) Jumlah UMK yang telah memanfaatkan SHAT untuk mengakses pembiayaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,30	0,11	0,12	Kemen KUKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
7	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Perluasan KUR	Kurangnya pemahaman KUMKM, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengenai Program KUR	Peningkatan jangkauan dan kualitas sosialisasi program KUR bagi KUMKM, Pemerintah Daerah dan masyarakat	(1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	2,95	3,34	3,54	Kemen KUKM
			Kurangnya kesiapan KUMKM, khususnya di sektor hulu dan industri kecil, untuk mengakses KUR	Penyediaan pendampingan KUMKM di sektor hulu dan industri kecil untuk dapat mengakses KUR	(2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR	27.520 UMKM	27.520 UMKM	27.520 UMKM	14,25	16,76	19,96	Kemen KUKM
Fokus: Peningkatan Kapasitas SDM									46,50	49,20	57,56	
8	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis	Rendahnya ketersediaan jasa konsultasi bisnis bagi KUMKM	Meningkatkan KKMB	Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya	150 KKMB	150 KKMB	150 KKMB	0,35	0,53	0,53	Kemen KUKM
9	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan	Kurangnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk berwirausaha	Pemasyarakatan kewirausahaan bagi masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif	(1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan	3.000 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang	1,00	1,13	1,19	Kemen KUKM
			Rendahnya kemauan dan kapasitas UMKM dalam menerapkan kewirausahaan	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	(2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan	1.400 Orang	1.600 Orang	1.700 Orang	4,50	5,07	5,37	Kemen KUKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
10	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan KUMKM	-	-	(1) Jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat	7.200 orang	6.000 orang	6.000 orang	41,00	43,00	51,00	Kemen KUKM
Fokus: Peningkatan Akses Pemasaran									2,00	18,00	18,00	
11	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM	Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pemasaran bagi KUMKM di daerah tertinggal/perbatasan	Penyediaan dukungan pembangunan dan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi	Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi	3 Unit	20 Unit	20 Unit	2,00	18,00	18,00	Kemen KUKM
Fokus: Peningkatan Kualitas Produksi									2,64	3,14	2,97	
12	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM	Kurangnya kesadaran dan kapasitas KUMKM untuk menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna	Sosialisasi dan penyediaan insentif bagi KUMKM dalam penerapan inovasi dan teknologi tepat guna	Jumlah KUMKM yang memahami dan menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna	350 KUMK	350 KUMK	350 KUMK	2,64	3,14	2,97	Kemen KUKM
Fokus: Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMK									16,40	33,13	33,15	
13	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi	Belum adanya skema peningkatan kelembagaan koperasi	Penyusunan skema fasilitasi peningkatan kelembagaan koperasi	Jumlah provinsi pelaksana peningkatan kelembagaan koperasi	-	18 Provinsi	15 Provinsi		9,00	7,50	Kemen KUKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
14	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)	Banyaknya masyarakat dan gerakan koperasi yang belum memahami perkoperasian dan manfaat berkoperasi	Penyusunan konsep GEMASKOP yang menjadi rujukan bagi lintas pelaku dalam pelaksanaan GEMASKOP	(1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi	3 event / provinsi	4 event / provinsi	4 event / provinsi	1,50	2,20	2,33	Kemen KUKM
			Kurangnya penyuluhan dan pendampingan perkoperasian di daerah	Peningkatan jumlah penyuluh secara bertahap untuk meningkatkan jangkauan penyuluhan perkoperasian	(2) Jumlah petugas penyuluh lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat	425 Orang	450 Orang	450 Orang	12,60	18,10	18,10	Kemen KUKM
15	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP- Koperasi, KJKS/UJKS- Koperasi dan LKM	Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum	Sosialisasi badan hukum koperasi bagi LKM dan fasilitasi transformasi LKM menjadi KSP/ KJKS	Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum koperasi	100 LKM	100 LKM	100 LKM	0,50	0,80	0,80	Kemen KUKM

No	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN / AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 3												
16	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian	Rendahnya pemahaman perkoperasian	Pendidikan dalam rangka peningkatan pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian	600 Orang	600 Orang	600 Orang	1,30	1,46	1,55	Kemen KUKM
17	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/USP	-		Diklat Pengelola LKM	100 Orang	250 Orang	300 Orang	0,50	1,57	2,87	Kemen KUKM
TOTAL ANGGARAN KLASER 3									2.152,71	2.284,53	2.321,56	

Keterangan:

*) Pada tahun 2012, target penyaluran KUR ditingkatkan menjadi Rp 30 triliun. Dukungan penjaminan KUR pada tahun 2012, 2013 dan 2014 masih menggunakan alokasi baseline Rp 2 triliun, namun bisa bertambah sesuai dengan peningkatan target penyaluran KUR.

**) Diusulkan tambahan target koperasi dengan tambahan dana *on top* yang dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Dana Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan sebanyak 2.000 koperasi.
2. Bantuan Dana bagi Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Koperasi di Daerah Miskin

5.3.4 Rencana Aksi Klaster 4

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 4												
1	Program Rumah Sangat Murah dan Murah	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah	Kurangnya alokasi anggaran	Mengusulkan tambahan untuk alokasi anggaran	Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah swadaya	60.000	440.000	450.000	816,95	5.807,15	6.790,50	Kemen Perumahan Rakyat
2	Program Pembangunan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Persyaratan akuntabilitas dalam tatakelola secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan	Sosialisasi kebijakan KPR-FLPP kepada para pemangku kepentingan dari unsur-unsur Pemerintahan, Perbankan, dan Asosiasi Pengembang, Perum Perumnas, dan Asosiasi Pekerja baik di tingkat pusat (Jakarta) maupun di daerah	Jumlah KPR Rumah Murah yang mendapat bantuan pembiayaan perumahan dengan dukungan FLPP	40.000	300.000	300.000	800,00	6.000,00	6.000,00	Kemen Perumahan Rakyat
			Bank Pelaksana masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap persyaratan baru pada kebijakan KPR-FLPP	Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan KPR-FLPP dengan Bank Pelaksana dan para Asosiasi Pengembang (REI dan Apersi) secara periodik								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 4												
			Masyarakat kelompok sasaran masih memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap persyaratan baru pada kebijakan KPR-FLPP, seperti: ketentuan NPWP/SPT, subsidi uang muka dihapuskan	Mendorong perbankan dan pengembang serta pemerintah daerah untuk mencari inovasi dalam mengatasi persoalan uang muka dan memberikan bantuan teknis serta advokasi kepada masyarakat kelompok sasaran dalam mengatasi persoalan NPWP/SPT								
			Bank Pelaksana KPR-FLPP masih didominasi Bank BTN karena infrastruktur tata kelolanya paling siap	Mendorong perbankan termasuk Bank Daerah lainnya untuk berpartisipasi								
3	Program Rumah Sangat Murah dan Murah	Fasilitasi Penyediaan PSU	Kurangnya alokasi anggaran	Mengusulkan tambahan untuk alokasi anggaran	Jumlah unit rumahmurah yang terbangun	40.000	300.000	300.000	262,35	1.888,59	1.888,59	Kemen Perumahan Rakyat
			Belum optimalnya dukungan perbankan									
			Ketersediaan tanah									
			Dukungan PSU									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 4												
4	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	SPAM dikawasan MBR	249 kawasan	249 kawasan	249 kawasan	639,90	639,90	639,90	KemenPU
					SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK)	124 IKK	124 IKK	124 IKK	731,90	731,90	731,90	
					SPAM perdesaan	894 desa	894 desa	894 desa	829,20	829,20	829,20	
					SPAM kawasan Khusus	140 kawasan	140 kawasan	140 kawasan	519,10	519,10	519,10	
					SPAM regional	3 kawasan	3 kawasan	3 kawasan	77,80	77,80	77,80	
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	1. Kelengkapan dan akurasi data kelayakan teknis (data potensi energi setempat, data geografis, supply dan demand)	1. Merumuskan arah dan kebijakan untuk kelancaran program terkait 2. Memonitor/ evaluasi kemajuan implementasi program/ kegiatan 3. Biaya pemasangan ditanggung Pemerintah: (i) Biaya pemeriksaan instalasi listrik; (ii) Uang Jaminan Langganan	Program listrik murah dan hemat	Penyambungan listrik bagi 83.000 RTS:	86.460 RTS:	89.340 RTS:	288,00	300,00	310,00	Kemen ESDM
						Program Terpadu 28.930 RTS	Program Terpadu 30.000 RTS	Program Terpadu 32.000 RTS				
			2. Data dukung lokasi hingga level desa/ penerima			Program Non-Terpadu 54.070 RTS	Program Non-Terpadu 56.460 RTS	Program Non-Terpadu 56.340 RTS				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 4												
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Ketersediaan BBM untuk nelayan terbatas untuk beberapa wilayah pesisir	Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Jumlah unit sarana usaha mikro (SPDN) yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.	50	50	50	45,00	45,00	45,00	KKP
			Terbatasnya kemampuan usaha (modal) untuk kelompok petambak garam serta rendahnya produksi garam rakyat (masih impor)	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)	Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat / PUGAR	900	750	750	140,00	110,00	110,00	KKP
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Rendahnya kemampuan nelayan dalam berusaha	Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP	3.700	3.000	2.000	380,00	300,00	200,00	KKP
			Menurunnya produksi perikanan tangkap di perairan pantai, sehingga diperlukan penambahan kapasitas kapal perikanan	Pengembangan kapal perikanan ≥ 30 GT (kapal)	Jumlah pengadaan kapal perikanan ≥ 30 GT (kapal)	125 (125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK)	250 unit	190 unit	200,00	400,00	285,00	KKP

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HAMBATAN	TINDAKAN /AKSI	INDIKATOR	TARGET			ANGGARAN (dalam milyar Rp ,-)			INSTANSI PELAKSANA
						2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Klaster 4												
8	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan dalam berusaha, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memenuhi target produksi budidaya	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan budidaya	Jumlah kelompok pembudidaya penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP	3.340	4.000	5.000	250,50	300,00	375,00	KKP
9	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan	Rendahnya kemampuan pengolah dan pemasar dalam berusaha	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pengolah dan pemasar hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat kompetensinya dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP	1.500	800	1.000	78,60	40,00	50,00	KKP
TOTAL ANGGARAN KLASER 4									6.059,30	17.988,64	18.851,99	

Catatan:

1. Target kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah yang telah teramankan alokasi anggarannya adalah 15.000 unit (2013) dan 9.250 unit (2014).
2. Target kegiatan Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditentukan pertahun karena menggunakan alokasi anggaran subsidi.
3. Alokasi anggaran untuk target penyediaan PSU untuk Program Rumah untuk tahun 2013 dan 2014 belum tersedia.

BAB VI PENUTUP

RAN-PPK 2012-2014 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi untuk mengamankan pencapaian sasaran dan target penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014. RAN-PPK 2012-2014 berisi penajaman strategi, kebijakan dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan agar target pengurangan kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN dapat dicapai. Seluruh kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah menjadi bahan evaluasi (*subject to review*) agar dapat dilakukan penyempurnaan baik dalam bentuk peningkatan kualitas pelaksanaan, perbaikan implementasi, perluasan cakupan, ataupun peningkatan pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Dalam kerangka perencanaan, dokumen RAN-PPK 2012-2014 akan menjadi rujukan untuk penajaman perencanaan program-program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan RKP setiap tahunnya hingga 2014. Amanat RAN-PPK perlu diterjemahkan dalam perencanaan setiap sektor yang memiliki program yang bersentuhan langsung dengan isu kemiskinan.

Dalam kerangka penganggaran, rincian dari matriks RAN-PPK 2012-2014 akan menjadi rujukan untuk proses penganggaran tahunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan APBN setiap tahunnya. Rencana tahunan ini akan menjadi bagian dari RKP yang merupakan acuan bagi pelaksanaan APBN. Peran serta seluruh pihak terkait sangat diharapkan dalam proses perencanaan, penyediaan dana, dan terutama dalam pelaksanaannya, agar target pengurangan kemiskinan dapat terwujud sebagai bagian dari amanat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara merata.